

**PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI  
KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN JENJANG  
SEKOLAH DASAR DI KAWASAN PERBATASAN**

**(Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan  
Provinsi Kalimantan Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh gelar sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**PUTRI PERMATA TAQWA**

**105030100111127**



Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
2. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2014**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

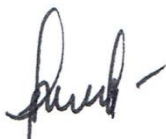
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi  
Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 Juli 2014  
Pukul : 08.00 WIB  
Skripsi atas nama : Putri Permata Taqwa  
Judul : "Perencanaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus  
(DAK) Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar di  
Kawasan Perbatasan". (Studi Pada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

KETUA



Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
NIP. 19610905 198601 1 002

ANGGOTA



Ainul Hayat, S.Pd, M.Si  
NIP. 19730713 200604 1 001

ANGGOTA



Dr. Siti Rochmah, M.Si  
NIP. 19570313 198601 2 001

ANGGOTA



Drs. Minto Hadi, M.Si  
NIP. 19540127 198103 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

---

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, Saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 20).

Malang, 19 Juni 2014



**Putri Permata Taqwa**  
NIM. 10503010011127

## RINGKASAN

Putri Permata Taqwa, 2014. **PERENCANAAN DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DI KAWASAN PERBATASAN (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)**. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Ainul Hayat, S.Pd, M.Si. 177 Hal + xiii.

---

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional. Tetapi kenyataannya, pelaksanaan DAK di kawasan perbatasan mengalami banyak kesulitan. Salah satu kawasan perbatasan tersebut yaitu Kabupaten Nunukan. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, *pertama* bagaimana gambaran permasalahan pendidikan di Kabupaten Nunukan, *kedua* bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK di Bidang Pendidikan, dan *ketiga* apa faktor pendukung dan penghambat dari perencanaan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan.

Penelitian ini adalah penelitian yang berbasis pada penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini mengambil kesimpulan, yakni (1) Kondisi pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan masih sangat kurang, dilihat dari aspek akses pendidikan, tenaga pengajar, dan sarana dan prasarana. (2) Walaupun perencanaan berjalan dengan baik, namun dalam penggunaan DAK tidak terlaksana dengan baik karena ketidakmerataan sosialisasi dan fungsi alat peraga yang tidak tepat sasaran. (3) Adapun faktor pendukung dalam perencanaan dan penggunaan DAK tersebut antara lain bentuk perhatian dari pemerintah pusat, kebutuhan sekolah akan sarana dan prasarana, serta kesiapan sekolah dalam hal menerima bantuan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: Petunjuk teknis yang sering datang terlambat, standarisasi petunjuk teknis yang terlalu kaku, dan mobilisasi yang sulit. Saran dalam penelitian ini yaitu agar pemerintah pusat lebih mendahulukan daerah-daerah khusus dalam hal sosialisasi sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam hal pelaksanaan DAK. Selain itu standarisasi petunjuk teknis seharusnya tidak dibuat terlalu kaku agar daerah dapat melaksanakan DAK sesuai dengan kondisi daerahnya. Saran yang terakhir ditujukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan agar membangun jaringan komunikasi yang kuat antar aktor pelaksana melalui pembentukan tim komunikasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga sekolah sasaran.

**Kata Kunci : Perencanaan, Penggunaan, Dana Alokasi Khusus, Kawasan Perbatasan**

## SUMMARY

Putri Permata Taqwa, 2014. **PLANNING AND USING OF SPECIFIC GRANT OF EDUCATION FIELD ELEMENTARY SCHOOL LEVEL IN BORDER AREA (Study at Education Department, Nunukan Regency, North Borneo Province)**. Supervisor Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Ainul Hayat, S.Pd, M.Si. 177 pages + xiii.

---

Specific Grant in the field of Education was a fund that sourced from the state budget which was allocated to certain region to fund special activities that were a part of the national priority programs. Although in fact, the implementation of SAF in the border area was facing a lot of problems. One of those border areas was Nunukan Regency. Based on that matter, the problems that was brought in this study were, *first* how was the picture of education problems in the Nunukan Regency, *second* how was the planning and using of SAF in the Field of Education, *third* what were the supporting and inhibiting factors of planning and using of SAF in the Field of Education.

This study was a study that based on qualitative study with descriptive approach. The data source used was primary and secondary data. The collection data techniques were through observation, interview, and documentation. The analitical methods used were data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

This study was taking a conclusion, that (1) the condition of Elementaries in Nunukan Regency was so poor, it was seen from some aspects, like the access of education, teachers, facilities and infrastructures. (2) Although the planning was well done, but in reality, the using of SAF was not implemented well due to inequality of socialization and props functions which are not effective. (3) The supporting factors in the planning and using of SAF were attention from central government, the schools' needs of facillities and infrastructures, as well as the readiness of the school towards the helps. Whereas the inhibiting factors were: Technical Guidance which often came late, standardization of technical guidelines that were too rigid, and hard mobilization. Suggestion in this study were central government more prioritize specific regions in terms of socialization so there was no delay in the implementation of SAF. Beside that, the standardization of technical guidance should not be too rigid so the region can do the SAF according to the condition of the region. The last suggestion was directed to local government of Nunukan Regency in order to build a strong communication network between implementers through the establishment of the communication team at the district, sub-district to school.

**Key words: Planning, using, Special Allocation Funds, Border Area.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perencanaan Dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Di Kawasan Perbatasan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sekaligus sebagai Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan masukan dan bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bantuan bimbingan dan pengarahan dari awal proses penyusunan skripsi ini.

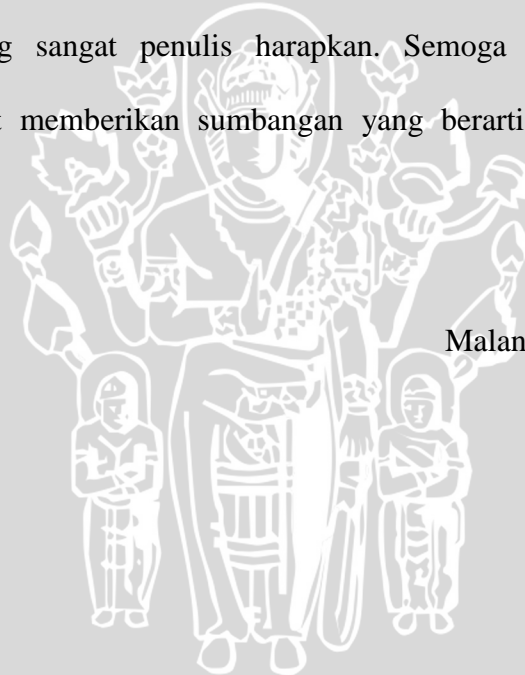
5. Ayahanda Tohar Mustofa, S.Pd dan Ibunda Winariyani tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik moral dan materiil.
6. Bapak Drs. Hasmuni, sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian tersebut.
7. Bapak Ramdan Yusuf selaku Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, TK/PAUD yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Bapak Saparudin, sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan yang telah membantu dalam penelitian ini.
9. Bapak Zainal dan Bapak Murad selaku Kepala Sekolah SDN 004 Sembakung dan SDN 018 Sembakung yang telah membantu dalam penelitian ini.
10. Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan yang telah membantu dalam penelitian ini.
11. Kedua adik tersayang, Zulva Zannatin Alia dan Bilqis Tarakanita Al Farabi yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama pengerjaan skripsi ini.
12. Segenap keluarga besar KH. Romlan dan Hj. Rupiah yang selalu memberikan doa serta dukungan selama pengerjaan skripsi ini.
13. Kelima sahabat tersayang, Nurul Afifah, Zaskya Karundini, Nofriana Devi, Henny Prasetyowati, dan Dian Purnama Sari. Terima kasih atas doa, dukungan, dan toleransi kalian.

14. Kedua sahabat jauh, Indah Andriyani dan Mariyani yang senantiasa mengirimkan doa dan dukungannya selama pengerjaan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabatku Muchammad Dzulfikar, Fitron Fahmi Faruqi, Nurul Yaqin, Peter Andre Endarto serta seluruh Ranger I Publik 2010 yang tidak putus memberikan dukungan dan doa selama pengerjaan skripsi ini.
16. Rekan-rekan seperjuangan FIA angkatan 2010, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun menjadi sesuatu yang sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2014

Penulis





## DAFTAR ISI

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**  
**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

<b>RINGKASAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XIII</b>

### **BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14**

A. Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Administrasi Publik.....	14
1. Administrasi Publik.....	14
2. Administrasi Pembangunan.....	15
3. Manajemen Publik.....	17
4. Perencanaan.....	21
5. Perencanaan Pendidikan.....	23
B. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi.....	30
1. Konsep Otonomi Daerah.....	30
2. Konsep Desentralisasi.....	34
C. <i>Public Finance</i> .....	37
1. <i>Public Finance</i> .....	37
2. Desentralisasi Fiskal.....	38
3. Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia.....	40
4. Dana Alokasi Khusus.....	45
5. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar.....	51
D. Pendidikan di Kawasan Perbatasan.....	57
1. Kawasan Perbatasan.....	57
2. Pendidikan di Kawasan Perbatasan.....	59

### **BAB III METODE PENELITIAN..... 62**

A. Jenis Penelitian.....	62
B. Fokus Penelitian.....	63
C. Lokasi Dan Situs Penelitian.....	64
D. Sumber Data.....	65
E. Teknik Pengumpulan Data.....	66

F. Instrumen Penelitian .....	68
G. Analisis Data.....	69

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 72**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	72
---	----

1. Profil Kabupaten Nunukan .....	72
-----------------------------------	----

a. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan.....	72
---	----

b. Sejarah Singkat Kabupaten Nunukan .....	74
--	----

c. Kondisi Geografis Kabupaten Nunukan .....	77
--	----

d. Demografi .....	82
--------------------	----

e. Keuangan Daerah.....	83
-------------------------	----

f. Transportasi dan Komunikasi .....	87
--------------------------------------	----

2. Profil Kecamatan Sembakung .....	88
-------------------------------------	----

3. Gambaran Umum Instansi .....	90
---------------------------------	----

a. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan .....	90
---	----

b. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.....	91
--	----

B. Penyajian Data Fokus Penelitian .....	94
--	----

1. Gambaran Permasalahan Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan .....	94
--	----

a. Akses Pendidikan.....	97
--------------------------	----

b. Tenaga Pengajar.....	99
-------------------------	----

c. Sarana dan Prasarana .....	102
-------------------------------	-----

2. Perencanaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan .....	105
---	-----

a. Perencanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan ...	105
--	-----

b. Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan .....	123
--	-----

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Perencanaan Dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Nunukan. ....	129
--	-----

a. Faktor Pendukung Perencanaan dan Penggunaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Nunukan.....	129
--	-----

b. Faktor Penghambat Perencanaan dan Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Nunukan .....	132
--	-----

C. Pembahasan .....	141
---------------------	-----

1. Gambaran Permasalahan Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan .....	141
--	-----

a. Akses Pendidikan.....	143
--------------------------	-----

b. Tenaga Pengajar.....	144
-------------------------	-----

c. Sarana dan Prasarana .....	146
-------------------------------	-----

2. Perencanaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan .....	147
---	-----

a. Perencanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan ...	149
--	-----

b. Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan .....	161
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan.....	169
a. Faktor Pendukung Perencanaan dan Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Nunukan .....	169
b. Faktor Penghambat Perencanaan dan Penggunaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Nunukan.....	172
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>179</b>
A. Kesimpulan .....	179
B. Saran .....	182
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>185</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN .....</b>	<b>189</b>



## DAFTAR TABEL

NO	TABEL	HAL
2.1	Penghambat Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus .....	48
4.1	Luas Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Nunukan .....	78
4.2	Daerah Aliran Sungai Kabupaten Nunukan.....	80
4.3	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari.....	81
4.4	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan.....	83
4.5	Rekapitulasi APBD Kabupaten Nunukan 2009-2013.....	84
4.6	Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2008-2012 .....	87
4.7	Jumlah SD Negeri/Swasta dan MI Negeri/Swasta di Kabupaten Nunukan Tahun Ajaran 2013/2014.....	96
4.8	Data Guru PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan SD/MI Negeri Dan Swasta Tahun Ajaran 2013/2014 .....	100
4.9	Data Guru Non PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan SD/MI Negeri Dan Swasta Tahun Ajaran 2013/2014 .....	101
4.10	Data Ruang Kelas SD/MI Negeri dan Swasta Tahun Ajaran 2013/2014 Kabupaten Nunukan .....	97
4.11	Data Ruang Kelas SD/MI Negeri dan Swasta Tahun Ajaran 2013/2014 Kecamatan Sembakung.....	103
4.12	Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012 Nunukan .....	107
4.13	Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Jenjang SD Tahun 2012 .....	109
4.14	Alokasi Pengadaan Peralatan Pendidikan .....	112
4.15	Nama-Nama Sekolah Calon Penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012 Tingkat SD.....	115
4.16	Daftar Rincian 30 SD Penerima DAK 2012 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun 2012 .....	118
4.17	Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga/RAB Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD/SDLB Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2013.....	122
4.18	Realisasi Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012 .....	124
4.19	Daftar Sekolah Dasar Penerima DAK 2012 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Kec. Sembakung.....	125

## DAFTAR GAMBAR

NO	TABEL	HAL
2.1.	Proses Perencanaan Pendidikan .....	27
2.2..	Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.....	43
3.1	Bagan Analisis Data Model Interaktif .....	70
4.1	Peta Kabupaten Nunukan.....	74
4.2	Persentase Penyebaran dan Luas Ketinggian.....	79
4.3	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.....	94
4.4	Transportasi di Sungai Sembakung .....	98
4.5	SDN 004 Sembakung.....	125
4.6	SDN 004 Sembakung yang Terendam Banjir.....	126
4.7	Kegiatan Olahraga di SDN 018 Sembakung .....	127
4.8	Alat Peraga DAK Bidang Pendidikan SDN 018 Sembakung.....	128
4.9	Akses Menuju Kecamatan Sembakung .....	140



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, pendidikan bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder bagi masyarakat. Masyarakat sudah memulai memandang pendidikan sebagai sebuah kebutuhan primer. Sebuah bangsa yang maju akan menjadikan pendidikan sebagai prioritas kebutuhan yang wajib untuk disediakan secara merata bagi penduduknya.

Pendidikan merupakan pilar yang sangat fundamental bagi peningkatan daya saing suatu bangsa, karena pendidikan memegang peranan penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Persaingan global yang terjadi memaksa bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya manusianya. Pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat merupakan upaya pengejawantahan salah satu cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Pada pasal 31 Ayat (1) diatur bahwa Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Perhatian bangsa Indonesia terhadap pentingnya pendidikan sangat besar. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini, pembangunan pendidikan telah mengalami kemajuan yang berarti. Reformasi pendidikan nasional secara mendasar melalui tata aturan perundang-undangan telah dimulai sejak tahun 1999, yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam undang-undang tersebut dicantumkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Selain Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Amandemen II UUD 1945 tahun 2000 juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia.

Usaha pemerintah membangun pelayanan pendidikan juga terlihat melalui langkah-langkah penyiapan dan penyesuaian perangkat perundang-undangannya. Langkah-langkah itu dilakukan seiring dengan perubahan tatanan politik pemerintahan sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Salah satu langkah yang dimaksud adalah dengan disahkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pengelolaan pendidikan berdasarkan tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam prakteknya, tekad untuk membangun pendidikan tersebut dihadapkan pada berbagai masalah, sehingga jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan dan mengikuti pendidikan masih belum

memadai. Secara umum, saat ini pendidikan nasional dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar, seperti :

1. Rendahnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan baik antar wilayah, antar tingkat pendapatan penduduk, maupun antar gender.
2. Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, antara lain karena kurikulum yang tidak terkait dengan kebutuhan lapangan kerja, rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan
3. Lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan dasar nasional, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional. DAK Bidang Pendidikan Dasar merupakan anggaran stimulan yang digunakan untuk rehabilitasi gedung atau ruang belajar sekolah melalui pemberdayaan kapasitas dan kapabilitas masyarakat melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator dan kepala sekolah sebagai inisiator dan pengelola kegiatan. Rehabilitasi bangunan sekolah tersebut dilakukan oleh kepala sekolah secara swakelola dengan dibantu dan diawasi oleh Komite Sekolah (Peraturan DAK DIKDAS 2013).



Pada tahun anggaran 2012, pemerintah menganggarkan DAK untuk bidang pendidikan sebesar Rp. 10.041.300.000.000,00. Adapun anggaran tersebut dialokasikan kepada:

1. Jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar 8.033.040.000.000; dan
2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp.2.008.260.000.000,00.

(Sumber : PMK Nomor 209/PMK.07/2011)

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar tidak dapat terlepas dari konsep perencanaan pendidikan. Pengimplementasian DAK Bidang Pendidikan Dasar membutuhkan perencanaan yang matang agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Menurut Sa'ud dan Makmun (2009:9), terdapat beberapa unsur penting yang terkandung dalam perencanaan pendidikan, yaitu:

- 1) Penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis dalam perencanaan pendidikan, hal ini menyangkut metodologi dalam perencanaan.
- 2) Proses pembangunan dan pengembangan pendidikan, artinya bahwa perencanaan pendidikan itu dilakukan dalam rangka reformasi pendidikan.
- 3) Prinsip efektivitas dan efisiensi, artinya dalam perencanaan pendidikan itu pemikiran secara ekonomis sangat menonjol.
- 4) Kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat

Sejalan dengan itu, prinsip pemerataan tidak bisa ditawar lagi. Seluruh anak bangsa tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Schiefelbein dan Farrell dalam Suryadi dan Tilaar (1993) menyatakan bahwa

“..pemerataan pendidikan atau *equality of educational oportunity* tidak terbatas pada, apakah murid memiliki kesempatan yang sama untuk masuk sekolah saja, tetapi lebih dari itu, murid tersebut harus memperoleh perlakuan yang sama sejak masuk, belajar, lulus sampai

dengan memperoleh manfaat dari pendidikan yang mereka ikuti dalam kehidupan masyarakat...”

**Pertama**, pemerataan kesempatan memasuki sekolah (*equality of access*). Konsep ini berkaitan erat dengan tingkat partisipasi pendidikan sebagai indikator kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan ini dapat dikaji berdasarkan dua konsep yang berlainan, yaitu pemerataan kesempatan (*equality of access*) dan keadilan (*equity*) di dalam memperoleh pendidikan.

**Kedua**, pemerataan kesempatan untuk bertahan di sekolah (*equality of survival*). Konsep ini menitikberatkan pada kesempatan setiap individu untuk memperoleh keberhasilan dalam pendidikan dan pelatihan. Jenis analisis ini mencurahkan perhatian pada tingkat efisiensi internal sistem pendidikan dilihat dari beberapa indikator yang dihasilkan dari metode kohort. Metode ini mempelajari efisiensi pendidikan berdasarkan murid murid dibandingkan dengan murid murid yang mengulang kelas dan putus sekolah.

**Ketiga**, pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (*equality of output*). Dilihat dari sudut pandang perseorangan, equality of output ini menggambarkan kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan kemampuan dan ketrampilan yang tinggi kepada lulusan tanpa membedakan variable suku bangsa, daerah, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Konsep output pendidikan biasanya diukur dengan prestasi belajar akademis. Konsep ini menggambarkan seberapa jauh sistem pendidikan itu efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas, efektif dalam mengisi kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan mampu melakukan kontrol terhadap kemungkinan kelebihan tenaga kerja dalam hubungannya dengan jumlah yang dibutuhkan oleh lapangan kerja.

**Keempat**, pemerataan kesempatan dalam menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (*equality of outcome*). Konsep ini menggambarkan keberhasilan pendidikan secara eksternal (*eksternal efficiency*) dari suatu sistem pendidikan dan pelatihan dihubungkan dengan penghasilan lulusan individu, jumlah dan komposisi lulusan disesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja (masyarakat), dan yang lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi (masyarakat). Teknik yang biasa digunakan adalah biasanya meliputi *analisis rate of return to education*, hubungan pendidikan dengan kesempatan kerja, fungsi produksi pendidikan dengan menggunakan pendekatan “*status attainment analytical model*” dan sebagainya.

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan kita. Pemerataan tersebut berlaku bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali, bahkan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan dan atau daerah tertinggal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 5, pasal 3 menyatakan bahwa warga negara yang ada di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus.

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. Pemerataan pendidikan di negara seluas Indonesia merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2012, tercatat 183 daerah di Indonesia masuk kategori tertinggal. Dari jumlah tersebut, 27 daerah merupakan daerah perbatasan, dan 67 daerah merupakan pulau terluar (<http://republika.co.id>). Seluruh daerah tersebut juga memiliki hak yang sama untuk juga bisa mendapatkan kemudahan dalam akses pendidikan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, Kementerian Pendidikan Nasional mencoba untuk mengembangkan strategi terkait dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang meliputi tiga hal yang mendasar yaitu:

- a. Persamaan kesempatan dalam memperoleh pendidikan seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- b. Aksesibilitas, dapat dijelaskan bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis dan jalur pendidikan;
- c. Keadilan dan atau kewajaran (equity) dijelaskan bahwa perlakuan kepada peserta didik sesuai dengan keadaan internal dan eksternal peserta didik, dalam arti adalah wajar dan adil jika peserta didik diperlakukan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

Tujuan terpenting dari kebijakan pemerataan kesempatan belajar pada dasarnya ialah mengurangi kesenjangan sosial yang selalu terjadi di dalam masyarakat yang menuju arah modernisasi dan industrialisasi. Pendidikan merupakan faktor yang dianggap paling menentukan terhadap tumbuhnya kesempatan kerja, peningkatan status dan kedudukan, serta hal-hal penting lainnya dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat akan dapat dicapai melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu (Suryadi, 2002)

Prinsip pemerataan tersebut juga seharusnya diterapkan dalam penyaluran DAK bidang Pendidikan Dasar ke daerah, khususnya untuk kawasan perbatasan. Salah satu kabupaten penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar ini adalah Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten tertinggal dan terluar yang ada di Indonesia. Untuk tahun anggaran 2012, pemerintah mengalokasikan DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp.12.579.900.000,00 yang kemudian dibagi kepada:

1. Untuk Jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 8.678.270.000,00; dan
2. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp.3.901.630.000,00.

*(PMK Nomor 209/PMK.07/2011)*

Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang terletak di bagian paling utara dari provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten ini terdiri dari 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Lumbis Ogong, Sembakung, Nunukan, Sei Menggaris, Nunukan Selatan, Tulin Onsoi, Sembakung,

Sembakung Timur, Sembakung Tengah, Sembakung Utara, Sembakung Barat dan Kecamatan Sebuku. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah.

Letak geografis Kabupaten Nunukan merupakan satu tantangan yang masih belum bisa diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam hal penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Keadaan dan letak geografis Kabupaten Nunukan menjadi faktor penghambat utama dalam usaha pemerintah untuk pemerataan pembangunan pendidikan. Akses yang terbatas sehingga sulit ditempuh dengan menggunakan alat transportasi darat merupakan salah satu hal yang menghambat pemerataan tersebut. Beberapa sekolah terletak di pedalaman hutan dan atau di tepi sungai yang hanya bisa dijangkau dengan menggunakan transportasi air.

Masalah sosialisasi juga menjadi penyebab lain penyaluran DAK menjadi tidak merata. Sekolah-sekolah penerima DAK harus menjadi 'penjemput bola' ketika mereka sebenarnya bisa menjadi 'penerima bola'. Hal ini dikarenakan seringkali sosialisasi dan informasi mengenai DAK tidak sampai ke tangan mereka. Oleh karena itu, mereka sendiri yang harus selalu mencari informasi sendiri mengenai DAK.

Salah satu kecamatan yang menjadi bahasan disini adalah Kecamatan Sembakung. Penyelenggaraan pendidikan dasar di Kecamatan Sembakung masih bisa dianggap tertinggal. Hingga tahun 2011 terdapat 18 Sekolah Dasar Negeri dan 6 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Kondisi infrastruktur sekolah di kecamatan tersebut sebagian besar juga cukup memprihatinkan. Beberapa sekolah

terletak di tepian sungai, sehingga ketika air sungai mulai pasang, banjir menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Alat penunjang mutu pendidikan seperti peralatan laboratorium dan buku penunjang jumlahnya juga sangat terbatas.

Letak geografis dari sekolah-sekolah yang susah dijangkau mengakibatkan penyaluran DAK di Kecamatan Sembakung menjadi terhambat. Sebagian besar dari sekolah tersebut terletak di kawasan tepi hutan yang hanya bisa diakses melalui transportasi air. Tidak adanya alokasi khusus untuk biaya transportasi yang digunakan saat penyaluran DAK mengakibatkan seringkali penyaluran DAK kepada sekolah tujuan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Itulah mengapa penyaluran DAK yang tidak merata di Kecamatan Sembakung tidak dapat dihindari.

Berdasarkan fenomena dari permasalahan pemerataan pendidikan seperti yang telah disebutkan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perencanaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar di Kawasan Perbatasan (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)”**. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat mengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar tersebut, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap penggunaan. Peneliti juga akan meninjau mengenai apa saja faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan dari kebijakan tersebut serta langkah apa yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengatasinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran permasalahan pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara?
2. Bagaimanakah perencanaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perencanaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan bentuk dari kegiatan yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis gambaran permasalahan pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademik**

- a. Bagi mahasiswa adalah untuk melatih agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama studinya berlangsung guna mengembangkan berbagai teori ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian sehingga diharapkan mampu menemukan dan menyimpulkan dan menganalisis masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
- b. Bagi perguruan tinggi adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik dengan memberikan sumbangan pemikiran bagi calon peneliti berikutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan pemikiran kepada pemerintah atau instansi terkait untuk memperbaiki implementasi kebijakan yang terkait dengan pemerataan pembangunan pendidikan di kawasan Perbatasan.
- b. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat menjadi informasi pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah lalu dan peneliti yang akan melakukan penelitian di masa mendatang dalam topik yang sama.



## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran menyeluruh tentang isi penulisan. Dibawah ini disampaikan pokok-pokok bahasan yang ada pada setiap bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab yang memuat tentang Mengemukakan tentang beberapa konsep atau teori atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, desertasi) yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan peneliti.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode yang akan dipakai dalam penelitian, di antaranya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan diakhiri dengan analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang

telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan penelitian ini.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Administrasi Publik

##### 1. Administrasi Publik

Dalam Darmadi dan Sukidin (2009:4), disebutkan bahwa kata administrasi berasal dari kata *to administer*, yang berarti *to manage* (mengelola). Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam mengelola informasi, manusia, harta benda, hingga tercapainya tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Dalam arti sempit menurut Darmadi dan Sukidin (2009:4), administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta untuk memudahkan memperolehnya kembali. Sedangkan administrasi dalam arti luas menurut Darmadi dan Sukidin (2009:4) berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Namun tidak semua kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang bisa disebut sebagai administrasi.

Nicholas Henry (Keban, 2008:5) memberi batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Menurut Henry, administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Dengan

demikian definisi ini melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

. Barton dan Chappel, seperti yang dikutip oleh Stillman II dalam Keban (2008:5) melihat administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini melibatkan aspek keterlibatan personil dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sedangkan Starling, yang dikutip oleh Stillman (Keban, 2008:5) melihat administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Dengan kata lain batasan tersebut menekankan aspek *the accomplishing side of government* dan seleksi kebijakan publik.

## 2. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmiah merupakan orientasi baru dalam Ilmu Administrasi. Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu yang lain, pengembangan prinsip-prinsip Administrasi Pembangunan kiranya memerlukan usaha yang intensif agar prinsip-prinsip Administrasi Pembangunan itu diakui sejajar dengan ilmu pengetahuan sosial lainnya (Siagian, 1988:2).

Administrasi Pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu: *pertama*, tentang administrasi dan *kedua*, tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan

pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*) (Siagian, 1988:2-3).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat, maupun bangsa atau negara untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1988:4).

Menurut Tjokroamidjojo (1986:8), dalam Administrasi Pembangunan administrator juga diharapkan sebagai unsur pembaharu. Dan kecuali itu juga dapat menciptakan suatu sistem dan praktek administrasi yang membina partisipasi dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa Administrasi Pembangunan lebih berorientasi kepada peranan serta fungsi pemerintah negara-negara yang baru berkembang dalam pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Pada dasarnya pendekatan Administrasi Pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dalam proses tersebut diperlukan ruang lingkup Administrasi Pembangunan. Ruang lingkup Administrasi Pembangunan menurut Tjokroamindjojo (1986:14) yaitu:

“Pertama, ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara. Dalam hal ini usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut sebagai *the development of administration*. Fungsi lainnya adalah merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (diberbagai bidang) serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut juga sebagai *the administration of development*.

Kedua, administrasi untuk pembangunan ini dapat pula dibagi dalam dua sub fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan kebijaksanaan pembangunan  
Berperan dalam formulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan negara/pemerintah (*public policies*) dilakukan dalam proses administrasi tetapi juga dalam tingkat tertentu dalam proses politik. Seringkali kebijaksanaan dan program-program itu dirumuskan dalam suatu rencana pembangunan. Namun tidak selalu demikian, apabila terdapat suatu kerangka kebijaksanaan dan program yang konsisten.
- 2) Pelaksanaan kebijaksanaan secara efektif  
Pelaksanaan dari pada kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program tersebut terdahulu secara efektif. Untuk ini diperlukan penyusunan instrumen-instrumen yang baik. Penyempurnaan administrasi negara perlu ditujukan pula bagi kepentingan ini. Seperti telah dikemukakan terdahulu ada dua bagian kegiatan yang perlu mendapat perhatian disini. Pertama adalah masalah kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan fungsi dari administrator sebagai unsur pembaharu. Kedua adalah pengendalian atau pengurusan yang baik dari administrasi fungsional seperti perlembagaan dalam arti sempit, kepegawaian, pembiayaan pembangunan dan lain-lain sebagai sarana pencapaian tujuan kebijaksanaan dan program-program pembangunan. Pencapaian tujuan-tujuan pembangunan dalam arti modernisasi, pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintah saja. Akan tetapi salah satu fungsi lain yang penting dalam administrasi pembangunan ialah membangun partisipasi masyarakat”.

### 3. Manajemen Publik

Manajemen menurut Shafritz dan Russel dalam Hakim (2011:140) berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu organisasi, dan proses yang menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi, yaitu pemanfaatan sumber daya (seperti orang dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Sondang P. Siagian dalam Darmadi dan

Sukidin (2009:239) mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Secara umum menurut Darmadi dan Sudikin (2009:239), manajemen bisa diartikan sebagai seni dan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola manusia dan material untuk mncapai tujuan. Sebagai alat pelaksana administrasi, manajemen diperlukan agar tujuan organisasi bisa dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Sementara itu, pengertian manajemen publik menurut Hakim (2011:140) adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning* (perencanaan), *organizing* (organisasi), dan *controlling* (pengawasan) di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan fisik, informasi, dan politik di sisi lain. Dengan kata lain manajemen publik merupakan proses penggerakan sumber daya manusia dan non-manusia dan non manusia sesuai ‘perintah’ kebijakan publik. Sedangkan Ott, Hyde dan Shafrtz dalam Darmadi dan Sukidin (2009:243) melihat manajemen publik sebagai suatu cabang dari bidang administrasi publik atau urusan publik yang lebih besar; bagian yang meninjau secara luas seni dan ilmu metodologi-metodologi yang diterapkan bagi rancangan program administrasi publik dan restrukturisasi organisasional, perencanaan kebijakan dan manajemen, pengalokasian sumber daya melalui sistem-sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan pengevaluasian serta audit program.

Hakim (2011:150) menyatakan bahwa manajemen dalam sektor publik berbeda dengan manajemen dalam sektor swasta dalam beberapa hal, seperti skala

yang lebih besar, lebih kompleks, jangkauan wilayah yang lebih luas, tuntutan yang lebih konsisten, tuntutan politis lebih tinggi, tuntutan akuntabilitas yang lebih besar, dan lebih bersifat hierarkis, birokratis, *system reward* yang lebih terbatas, dan tuntutan profesionalitas yang lebih kompleks. Hakim (2011:151) juga berpendapat bahwa manajemen sektor publik disarankan untuk selalu memusatkan perhatian pada manajemen kinerja (*Performance Management*). Tujuan manajemen kinerja ini adalah untuk melakukan pengikatan dan jalinan hubungan (*alignment*) antara tujuan individu dengan tujuan organisasi.

Adapun fungsi manajemen menurut Luther M. Gullick dalam Darmadi dan Sukidin (2009:247), terdiri dari:

- a. Perencanaan (*Planning*), yaitu teknik-teknik/metoda-metoda penetapan tujuan yang diterapkan oleh eksekutif sebagai alat menyiapkan serangkaian tindakan organisasional di masa akan datang
- b. Pengorganisasian (*Organizing*), yaitu mengatur struktur dan proses-proses organisasional dengan cara yang pantas dan penting untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- c. Penstafan (*Staffing*), yaitu merekrut dan mempekerjakan personalia untuk melaksanakan pekerjaan agen yang penting.
- d. Pengarahan (*Directing*), yaitu mengawasi proses-proses aktual dalam melaksanakan tugas-tugas.
- e. Koordinasi (*coordinating*), yaitu mengintegrasikan berbagai elemen detail dari tugas-tugas di dalam kerjasama dengan unit-unit lain dari orang-orang di dalam pemerintahan.



- f. Pelaporang (*reporting*), yaitu menelusuri dan mengkomunikasikan kemajuan kerja di dalam organisasi.
- g. Penganggaran (*budgeting*), yaitu aktivitas-aktivitas fiskal dan keuangan yang penting untuk mendukung secara ekonomi penyelesaian program-program, layanan-layanan, atau aktivitas-aktivitas.

Sedangkan menurut George R. Terry dalam Darmadi dan Sukidin (2009:247), manajemen memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan), yaitu merupakan dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- b. *Organizing* (pengorganisasian), yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c. *Actuating* (penggerakan), yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- d. *Controlling* (pengawasan), yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi

penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

#### 4. Perencanaan.

Administrasi publik diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar. Dalam proses tersebut, perencanaan merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dilepaskan. Pengertian perencanaan menurut Sa'ud dan Makmun (2009:3) adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya) dan apa yang dilakukan (intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi dan sebagainya). Sedangkan perencanaan menurut Fakry dalam Sa'ud dan Makmun (2009:4) dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tjokroamidjojo dalam Sa'ud dan Makmun (2009:4) juga mengartikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Fredman dan Hudson dalam Soenarya (2000:32) membagi 4 kategori utama dalam teori perencanaan. Keempat kategori tersebut antara lain : (a) penganut filsafat sintesis; (b) penganut filsafat rasionalisme; (c) penganut pengembangan organisasi; dan (d) penganut empirisme. Perencanaan dalam pandangan penganut filsafat sintesis menurut Mannheim dalam Soenarya (2000:33) dipandang sebagai suatu 'Cara Berpikir, sedangkan Dahl dan Lindblom dalam Soenarya (2000:33) memandang perencanaan sebagai suatu 'Proses Pengambilan Keputusan'. Etzioni

seperti yang dikutip oleh Soenarya (2000:33) mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses Bimbingan Sosial (*Societal Guidelines*), yaitu suatu proses dimana kontrol sosial dan konsensus harus diarahkan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara pengawasan yang ketat dengan konsensus yang lemah.

Dalam pandangan penganut rasionalisme, perencanaan merupakan suatu bentuk pengambilan keputusan, suatu proses yang mengikuti langkah-langkah prosedural dalam rangka pengambilan keputusan (Soenarya, 2000:33). Pandangan tersebut mendapat tantangan dari para penganut *Policy Analysis* dan para penganut Teori Umum Sistem yang mengatakan bahwa para penganut rasionalisme mengabaikan realitas sosial dan aspek kemanusiaan dalam proses perencanaan. Pandangan ketiga yaitu pandangan penganut pengembangan organisasi (*Organizational Development*). Salah seorang penganut, Bennis seperti yang dikutip oleh Soenarya (2000:33) mengungkapkan bahwa pengembangan organisasi dapat dipandang sebagai salah satu metode perencanaan dimana perubahan dan pengembangan organisasi akan berpengaruh terhadap perubahan eksternal suatu sistem.

Pandangan yang terakhir yaitu penganut empirisme (*The Tradition of Empiricism*). Menurut Fredman dan Hudson dalam Soenarya (3000:34) menyebutkan dua aliran yang terdapat dalam teori perencanaan, yaitu *aliran pertama* yang memusatkan perhatiannya pada aspek politik dan realitas fungsi ekonomi pada skala nasional. *Aliran kedua*, perhatiannya difokuskan kepada berbagai studi mengenai politik pembangunan perkotaan.

Disamping keempat pandangan tersebut terdapat juga pandangan para penganut Teori Umum Sistem yang mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses dimana berbagai masalah sistem sosial dipecahkan secara sistematis (Soenarya, 2000:34). Pada bagian lain, Ozbekhan dalam Soenarya (2000:34) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu metode untuk mereduksi kompleksitas yang ada, dan memajukan organisasi yang ditujukan langsung.

Henry Fayol dalam Darmadi dan Sukidin (2009:113) mengemukakan kualifikasi rencana yang baik, yang terdiri dari :

- a. Didasarkan pada tujuan-tujuan yang ditetapkan secara jelas dan dinyatakan dengan cara lugas;
- b. Meliputi seluruh tindakan yang diperlukan bagi implementasi rencana;
- c. Cukup fleksibel sehingga memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi yang tidak diharapkan;
- d. Berisi rencana-rencana kontingensi yang meliputi wilayah-wilayah yang amat tidak menentu, memungkinkan pengecekan yang berulang kali, secara layak telah disebarkan kepada siapa saja yang berkepentingan dengan rencana, ada keseimbangan antara sumber dengan kegiatan yang akan dilakukan, pekerjaan tulis menulis menjadi berkurang.

## **5. Perencanaan Pendidikan**

### **a. Definisi Perencanaan Pendidikan**

Perencanaan pendidikan menurut Guruge dalam Sa'ud dan Makmun (2009:8) adalah *“The process of preparing decisions for actions in the future in*

*the field of educational development is the functional of educational planning.”*

(proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan adalah tugas dari perencanaan pendidikan). Definisi lain perencanaan pendidikan juga diungkapkan oleh Waterston yang dikutip oleh Sa'ud dan Makmun (2009:8) yaitu *“Functional planning involves the application of a rational system of choices among feasible courses of educational investment and the other development actions based on a consideration of economic and social cost and benefits.”* (Perencanaan fungsional yang terdiri dari pengajuan pilihan sistem yang rasional pada investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan pembangunan-pembangunan lain yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial).

Sedangkan perencanaan pendidikan menurut Coombs dalam Sa'ud dan Makmun (2009:8) adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya

Perencanaan pendidikan menurut Sa'ud dan Makmun (2009:18) terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari sisi mana melihatnya. Dari tinjauan tataran dan cakupannya, perencanaan pendidikan ada yang bersifat nasional, yaitu perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh usaha pendidikan untuk mencerdaskan atau membangun bangsa termasuk seluruh jenjang, jenis, dan isinya. Ada pula perencanaan pendidikan yang bersifat regional, yaitu perencanaan pada tingkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang

mencakup seluruh jenis dan jenjang untuk daerah dan provinsi tersebut. Sedangkan perencanaan pendidikan yang bersifat kelembagaan yaitu perencanaan pendidikan yang mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu saja, misalnya perencanaan sekolah, perencanaan universitas, pusdiklat, dll.

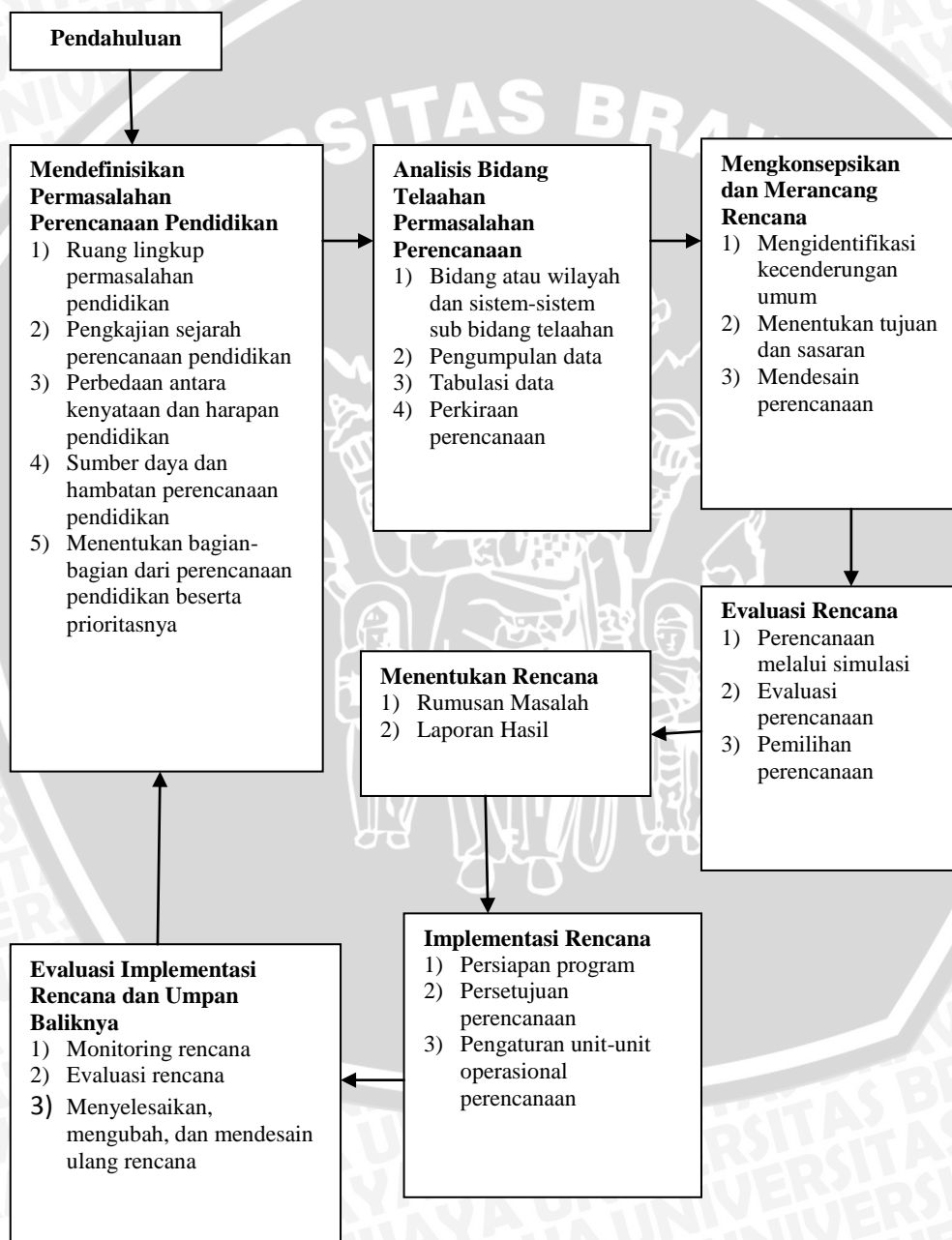
Perencanaan pendidikan jika ditinjau dari sisi metodologi menurut Sa'ud dan Makmun (2009:20), dibagi menjadi *Rational* atau *Systematic Planning* dan *Transactional Planning*. *Systematic Planning* menggunakan prinsip-prinsip dan teknik-teknik berpikir sistematis dan rasional ilmiah. Metodologi ini bercirikan keterikatan pada ketentuan dan peraturan perhitungan yang rasional dan teliti (Sa'ud dan Makmun, 2009:20). Sedangkan *Transactional Planning* dapat diartikan sebagai jaringan yang kuat untuk menghubungkan antara perencanaan dengan implementasi dari perencanaan dalam suatu program. Metode ini memilih program yang efektif dalam perencanaan dan implementasinya (Sa'ud dan Makmun, 2009:20).

Karakteristik perencanaan pendidikan ditentukan oleh konsep dan pemahaman tentang pendidikan. Perencanaan pendidikan memiliki ciri unik dalam kaitannya dengan pembangunan nasional. Berikut merupakan ciri-ciri perencanaan pendidikan menurut Sa'ud dan Makmun (2009:13):

- 1) Perencanaan pendidikan harus mengutamakan nilai-nilai manusiawi;
- 2) Perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi peserta didik seoptimal mungkin;

- 3) Perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta didik;
- 4) Perencanaan pendidikan harus komprehensif dan sistematis;
- 5) Perencanaan pendidikan harus berorientasi harus diorientasikan pada pembangunan;
- 6) Perencanaan pendidikan harus dikembangkan dengan memerhatikan keterkaitannya dengan komponen pendidikan yang lain;
- 7) Perencanaan pendidikan harus menggunakan sumber daya secermat mungkin;
- 8) Perencanaan pendidikan harus berorientasi pada masa depan;
- 9) Perencanaan pendidikan harus kenyal dan responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat;
- 10) Perencanaan pendidikan haruslah merupakan sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan.

Proses perencanaan pendidikan merupakan tahapan-tahapan dalam perencanaan pendidikan yang diterapkan pada semua tataran sistemnya, baik operasional, institusional maupun struktural (Sa'ud & Makmun, 2009:47). Berikut merupakan alur proses perencanaan pendidikan:



Gambar 2.1. Proses Perencanaan Pendidikan

Sumber : Sa'ud dan Makmun, (2009 : 45)



Untuk memahami arti perencanaan pendidikan secara lebih mendalam, maka perlu untuk mengetahui dimensi dari perencanaan pendidikan. Dimensi perencanaan pendidikan yaitu tingkat, ukuran dan besaran masalah yang terkait dengan perencanaan pendidikan. Berikut merupakan 9 (sembilan) dimensi perencanaan pendidikan menurut Sa'ud dan Makmun (2009:55), yakni:

- 1) **Significance**, yaitu tingkat kebermaknaan yang tergantung dari kepentingan sosial dari tujuan pendidikan yang diusulkan;
- 2) **Feasibility**, yaitu kelayakan teknis dan perkiraan biaya merupakan aspek yang harus dilihat secara realistis;
- 3) **Relevance**, yaitu konsep relevan mutlak perlu bagi implementasi rencana pendidikan;
- 4) **Definitiveness**, yaitu penggunaan teknik simulasi untuk menjalankan rencana dengan menggunakan data model buatan;
- 5) **Parsimoniousness**, yaitu perencanaan haruslah digambarkan secara sederhana;
- 6) **Adaptability**, yaitu perencanaan pendidikan haruslah dinamis dan dapat berubah sesuai informasi sebagai umpan balik sistem;
- 7) **Time**, yaitu siklus alamiah pokok bahasan pada perencanaan, kebutuhan untuk merubah situasi yang tidak dapat dipikul, keterbatasan perencanaan pendidikan dalam meramalkan masa depan merupakan beberapa faktor yang berkaitan dengan waktu;
- 8) **Monitoring**, yaitu melibatkan penegakkan kriteria pendidikan untuk menjamin berbagai komponen rencana bekerja secara efektif;
- 9) **Subject matter**, pokok bahasan yang akan direncanakan yang terdiri dari:
  - a) Sasaran dan tujuan;
  - b) Program dan pelayanan;
  - c) Sumber daya manusia;
  - d) Sumber daya fisik;
  - e) Penganggaran;
  - f) Struktur pemerintahan;
  - g) Konteks sosial

Pengertian perencanaan melibatkan beberapa komponen proses seperti tujuan yang akan dicapai, prosedur efisien untuk mencapainya, serta alokasi sumber daya yang tepat diperlukan untuk mencapai tujuan. Intisari dari perencanaan dan pembelajaran adalah kepedulian terhadap lingkungan pendidikan dari komunitas manusia. Oleh karena itu, seorang perencana harus mengetahui

nilai-nilai, tujuan dan struktur sosial dari komunitas dengan tujuan untuk melayaninya secara memadai.

**b. Pendekatan dalam Perencanaan Pendidikan**

Sa'ud dan Makmun dalam bukunya yang bertajuk *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif* membagi perencanaan pendidikan ke dalam beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan Kebutuhan Sosial.

Pendekatan ini menitikberatkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan terutama bagi negara-negara berkembang yang kemerdekaannya baru saja diperoleh. Pendekatan ini lebih menekankan aspek pemerataan kesempatan atau kuantitatif dibandingkan dengan aspek kualitatif. Oleh karena itu prioritas utama dalam pendekatan ini adalah pendidikan dasar. Sedangkan target yang harus dicapai adalah pembebasan dari tuna aksara (*free from illiteracy*).

2) Pendekatan Kebutuhan Ketenagakerjaan

Guruge dalam Sa'ud dan Makmun (2009:239) mendefinisikan pendekatan ini sebagai "*Gearing on educational efforts to the fulfillment of national manpower requirement.*" (Pengarahan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja). Pendekatan ini mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan. Prioritas utama pada pendekatan ini adalah pada pendidikan kejuruan dan teknologi baik pada tingkat sekolah menengah maupun universitas.

### 3) Pendekatan Efisiensi Biaya

Pendekatan ini bersifat ekonomi dan berpangkal pada *Investment in Human Capital* atau investasi pada sumber daya manusia. Pendekatan ini memiliki implikasi sesuai dengan prinsip ekonomi. Karena pendekatan efisiensi biaya memiliki keterkaitan dengan pendekatan ketenagaan, maka pendekatan ini berprioritas pada progra pendidikan kejuruan dan teknologi yang lulusnya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bekerja.

Perencanaan pembangunan pendidikan suatu daerah tidak akan bisa dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan daerah merupakan pelaksana utama pembangunan pendidikan di daerahnya. Perencanaan pembangunan pendidikan perlu dijadikan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan masing-masing daerah. Hal tersebut diperlukan agar peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat terlaksana secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah.

## **B. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi**

### **1. Konsep Otonomi Daerah**

Menurut Amrah Muslimin yang dikutip oleh Zilal (2008:23) menyatakan otonomi daerah adalah pemerintahan sendiri (*zelfregering*), (*auto*=sendiri, *nomes*=pemerintahan). Bagir Manan yang dikutip oleh Zilal (2008:23) menyatakan bahwa otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Undang-undang No 5 Tahun 1974 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mawhood yang dikutip oleh Zilal (2008:23) menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sarundajang dalam Nugroho (2000:47), memberikan 5 (lima) klasifikasi daerah otonom, yaitu:

1. Otonomi Organik atau Rumah Tangga Organik. Otonomi ini mengatakan bahwa rumah tangga adalah keseluruhan urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya badan otonomi atau daerah otonom.
2. Otonomi Formal atau Rumah Tangga Formal, yaitu apa yang menjadi urusan otonomi itu tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Otonomi Materiil atau Rumah Tangga Materiil, yaitu kewenangan daerah otonom dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur.
4. Otonomi Riil atau Rumah Tangga Riil, yaitu penentuan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang-wewenang urusan tersebut didasarkan kepada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya.
5. Otonomi Nyata, Bertanggung Jawab dan Dinamis. Otonomi yang nyata maksudnya adalah disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup

dan berkembang secara obyektif di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab maksudnya adalah selaras atau sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan. Dan otonomi yang dinamis berarti dapat memberikan dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan.

Otonomi daerah dijalankan secara nyata, luas dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Baratakusumah & Solihin, 2003:3).

Otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah. Sedangkan otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Baratakusumah & Solihin, 2003:3).

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, esensi mendasar dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang ditetapkan batasan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya pemberian kewenangan tersebut tentu merupakan esensi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah mempunyai cukup keleluasaan gerak dalam menggunakan potensinya, baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pemberian pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun kewenangan yang diberikan merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi dengan kewenangan milik pemerintah pusat yang dirincis secara tegas dalam peraturan perundangan-undangan nasional. Maksud pemberian kewenangan yang demikian adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (Sabarno, 2007:8).

Sedangkan tujuan otonomi daerah yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dalam Hanafi dan Mugroho (2009:11) dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sedangkan bila dilihat dari kepentingan

Pemerintah Daerah terdapat 3 tujuan menurut Halim dalam Hanafi dan Mugroho (2009:12) :

- a) Untuk mewujudkan apa yang disebut dengan *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah
- b) Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memerhatikan hak-hak masyarakat
- c) Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi.

## 2. Konsep Desentralisasi

Menurut Ryaas Rasyid seperti yang dikutip oleh Yudhoyono (2001:20), secara teoritik, kemampuan pemerintah antara lain terbentuk melalui penerapan azas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya secara hirarkis. Melalui pelimpahan wewenang itulah Pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, desentralisasi dapat juga dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen pemerintahan dari pemerintah (pusat) kepada unit-unit sub nasional (daerah/wilayah) administrasi negara atau kelompok-kelompok fungsional atau organisasi non pemerintahan/swasta (Rondinelli, 1998).

Secara umum desentralisasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (a) desentralisasi teritorial atau kewilayahan dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi kewilayahan berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah

di dalam negara. Sedangkan desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional (atau teknis) yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat (Nugroho, 2000:42).

Menurut Sarundajang, seperti yang dikutip oleh Nugroho (2000:42-43), terdapat 4 (empat) bentuk desentralisasi. Keempat bentuk tersebut antara lain:

1. Sistem pemerintahan daerah yang menyeluruh (*Comprehensive Local Government System*). Dalam bentuk ini, pelayanan pemerintah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam (*Multi Purpose Local Authorities*). Aparat daerah melakukan fungsi-fungsi yang diserahkan oleh pemerintah pusat.
2. *Partnership System*, yaitu beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat dan beberapa jenis yang lain pula dilakukan oleh aparat daerah.
3. *Dual System*, yaitu aparat pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung dan demikian juga dengan aparat daerah.
4. *Integrated Administrative System*, yaitu aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung di bawah pengawasan seorang pejabat koordinator.

Beberapa pakar dan ahli sepakat bahwa apapun bentuknya, desentralisasi tetap memiliki keuntungan-keuntungan tertentu. Pakar-pakar seperti Rondinelli, Roy Bahl, Cheeme dan Sabir, dan lain-lain, dalam berbagai studi yang mereka lakukan, menyimpulkan bahwa melalui desentralisasi tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Efisiensi Dan Ektivitas Pelaksanaan Tugas Pemerintahan.
  - a. Efisiensi

Melalui pendelegasian kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah tidak mesti selalu terlibat langsung sebagaimana di dalam tugas-tugas yang terlalu sentralistis. Penghematan pembiayaan akan dapat dilakukan bilamana pemerintah pusat tidak mesti selalu melaksanakan tugas di daerah.



b. Efektivitas

Dengan desentralisasi, ujung tombak pemerintahan yaitu aparat-aparat di daerah akan lebih cepat mengetahui situasi dan masalah serta mencari jawaban bagi pemecahannya. Hal ini tentu harus dibarengi dengan penerapan manajemen partisipasi (*participatory management*), yaitu selalu melibatkan aparat tersebut dalam pemecahan masalah.

2. Memungkinkan Melakukan Inovasi.

Dengan diberikannya kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, secara tidak langsung akan mendorong mereka untuk menggali potensi-potensi baru yang dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan sehari-hari terutama dari sisi ekonomis serta penciptaan metode pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat sebagai pembayar pajak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

3. Meningkatkan Motivasi Moral, Komitmen, Dan Produktivitas.

Melalui desentralisasi, aparat pemerintah daerah diharapkan akan meningkatkan kesadaran moral untuk memelihara kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, kemudian akan timbul suatu komitmen dalam diri mereka bagaimana melaksanakan urusan-urusan yang telah dipercayakan pada mereka, serta bagaimana menunjukkan hasil-hasil pelaksanaan urusan melalui tingkat produktivitas yang mereka miliki (Yudoyono, 2001:22-23).

Pelaksanaan desentralisasi tidak akan pernah terlepas dari konsep hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Salah satu sinergitas tersebut

adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Undang.

### C. *Public Finance*

#### 1. *Public Finance*

*Public Finance* atau keuangan sektor publik berkaitan dengan suatu hal didapat dan dibelajakan oleh negara. Hubungan *public finance* dengan negara memiliki kesamaan seperti halnya hubungan antara ekonomi politik dengan individu (Plehn, 1902:1). *Public finance* menurut Plehn (1902:1) adalah sebagai berikut:

*“Public finance may be defined as the science which deals with the activity of statesman in obtaining and applying the material means necessary for fulfilling the proper functions of the state”.*

Keuangan publik didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan aktivitas dari aparatur negara dalam memperoleh dan mengaplikasikan material-material yang dibutuhkan dalam memenuhi fungsi negara.

Plehn (1902:1) menyebutkan beberapa alasan mengapa *public finance* disebut sebagai ilmu pengetahuan, yaitu:

- a. *Public finance* merupakan bidang yang pasti dan terbatas dalam pengetahuan manusia.
- b. *Public Finance* mengakui suatu susunan yang teratur dari fakta dan prinsip-prinsip yang dimilikinya, serta mengandung banyak hukum dan juga eksklusivitas yang dimiliki oleh bidang tersebut.

- c. *Public finance* mengakui adanya penerapan metode ilmiah dalam proses investigasinya.
- d. *Public finance* meramalkan serta menjelaskan kelas-kelas tertentu dari fenomena.
- e. *Public Finance* bersifat umum, jika tidak universal.

Plehn (1902:8) juga membagi *public finance* kedalam 4 (empat) subjek utama. Keempat subjek tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. *Public Expenditure* (Pengeluaran Pemerintah).
- b. *Public Revenue* (Pendapatan Masyarakat),
- c. *Public Debts* (Hutang Publik)
- d. *Financial Administration* (Administrasi Keuangan)

## **2. Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal menurut Panglima dan Juli S yang dikutip oleh Hanafi (2009:2) adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik yang sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan. Menurut Elmi (2002), desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Setidaknya terdapat empat agen yang berperan penting dalam desentralisasi fiskal, yaitu : pemerintah pusat, unit-unit administratif lokal, pemerintah daerah dan penduduk setempat atau entitas politik.

Desentralisasi fiskal menjadi salah satu “pilar” dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah. Desentralisasi fiskal dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dapat pula mendorong pertumbuhan melalui efisiensi alokasi sumberdaya pada level daerah. Wujud desentralisasi fiskal berupa : (1) pembagian peran dan tanggung jawab antar pemerintah, (2) transfer pembiayaan dari pemerintah pusat ke daerah, (3) penguatan sistem penerimaan dan sistem pelayanan publik pemerintah lokal, (4) privatisasi badan usaha milik negara, yang terkadang merupakan tanggung jawab lokal, (5) penyediaan jaring pengaman (safety net), dan (6) ekspansi penerimaan lokal melalui pajak (Ebel, 1999; Rondinelli, 1997 dalam Yuliyati, 2002).

Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Kebijakan fiskal selalu berkolerasi dengan persoalan kebijakan nasional berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Penggunaan dana dari pemerintah pusat dan daerah akan mencerminkan atau memeberikan gambaran tentang desenytralisasi fiskal daerah. Beberapa alasan yang mendukung desentralisasi fiskal antara lain menurut Panglima dan Juli S. yang dikutip oleh Hanafi (2009:3):

- a) Untuk mengalokasikan barang-barang dan jasa publik yang bermanfaat dan eksternalitasnya berskala regional dan lokal.
- b) Pemerintah daerah dapat lebih cepat menginterpretasikan kebutuhan rakyat.
- c) Memungkinkan kebebasan individu dan tanggung jawab politik yang lebih besar. Transfer, dengan demikian, merupakan elemen inti dari keuangan daerah

Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu pilar dalam memelihara kestabilan perekonomian nasional, karena dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktifitas perekonomian masyarakat di daerah. Implikasi langsung dari kewenangan atau fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu perlu diatur perimbangan (hubungan keuangan) antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan negara kebijakan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi perubahan peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Perubahan dimaksud ditandai dengan makin tingginya transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke daerah.

### **3. Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia**

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang didasari atas hubungan fungsi, yaitu berupa sistem keuangan daerah yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antartingkat pemerintahan sesuai dengan pengaturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan

bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan, penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Adapun ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 meliputi:

- 1) Prinsip-prinsip pembiayaan fungsi pemerintahan di Daerah
- 2) Sumber-sumber pembiayaan fungsi dan tugas tanggung jawab daerah yang meliputi:
  - a) Pendapatan Asli Daerah
  - b) Dana Perimbangan
  - c) Pinjaman
  - d) Pembiayaan pelaksanaan asas dekonsentrasi bagi provinsi
- 3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
- 4) Sistem informasi keuangan daerah

Perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi melalui penyerahan urusan pusat ke daerah. Pergeseran penggunaan dana yang lebih besar untuk daerah, pada umumnya akan berdampak pada peningkatan peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan secara umum, utamanya yang berkaitan dengan fungsi alokasi. Kecuali atas dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh atas pengalokasian dan penggunaan dana perimbangan tersebut. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan (Widjaja, 2002:42).

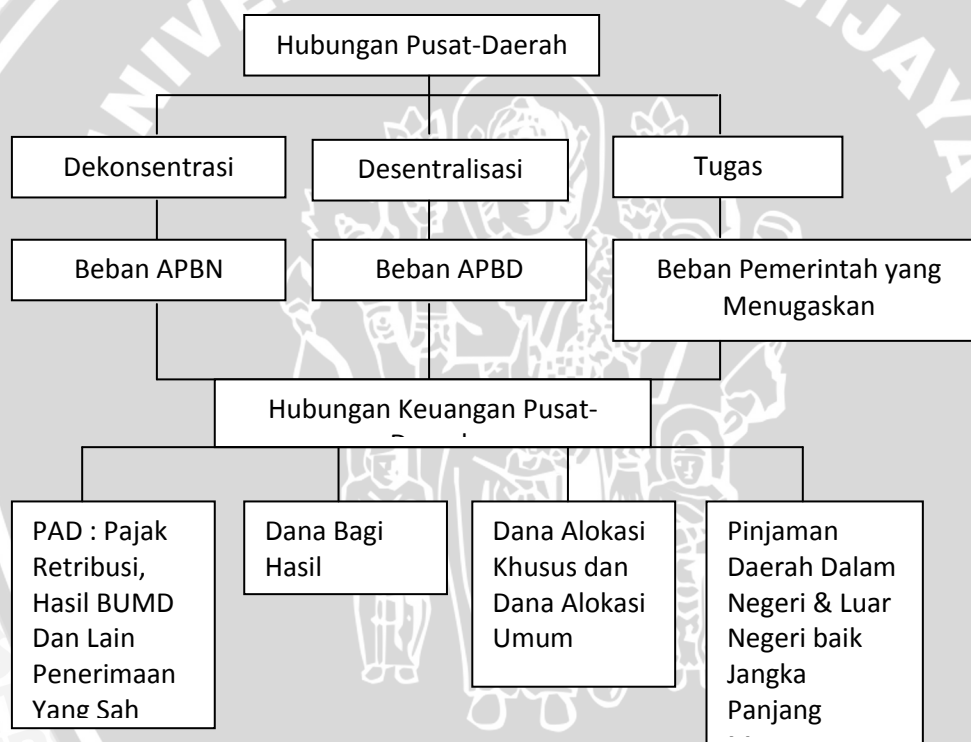
Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi didanai APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai oleh APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN. Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana yang disesuaikan dengan besarnya beban kewenangan yang dilimpahkan dan/atau tugas pembantuan yang diberikan.

Berikut merupakan pokok-pokok muatan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menurut Yani (2008:49-50):

- a. Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- b. Penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor pertambangan panas bumi, PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- c. Pengelompokan dana reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil.
- d. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum.
- e. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus
- f. Penambahan pengaturan hibah dan dana darurat.
- g. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme pinjaman daerah, termasuk obligasi daerah.
- h. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- i. Penegasan pengaturan sistem informasi keuangan daerah, dan
- j. Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam Undang-Undang ini dipertegas dengan pemberian sanksi.

Menurut Yani (2008:42), pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.



**Gambar 2.2. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**

Sumber : Kuncoro dalam Hanafi, 2009

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup pembagian keuangan antar daerah secara proporsional, demokratis, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut



termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan (Widjaja, 2002:42). Dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 merupakan penyelarasan dengan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang ini dimuat pengaturan mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dialihkan menjadi DBH (Ahmad Yani, 2008:46).

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Penggunaan DAU ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. Dengan adanya DAU ini akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh

sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu/khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan-kebutuhan khusus yang dibiayai merupakan kebutuhan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

#### 4. Dana Alokasi Khusus

a. *Dasar Hukum*

- 1) Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

b. *Pengertian Dana Alokasi Khusus*

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang (Ahmad Yani, 2008:166).

Daerah yang mendapat alokasi DAK merupakan daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Berikut merupakan bidang-bidang yang mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Permenkeu Nomor 201/PMK.07/2012:

- a) Pendidikan.
- b) Kesehatan.
- c) Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi, Infrastruktur Air Minum, Infrastruktur Sanitasi.
- d) Prasarana Pemerintahan Daerah.
- e) Transportasi Pedesaan.

- f) Kelautan dan Perikanan.
- g) Pertanian.
- h) Lingkungan hidup.
- i) Keluarga Berencana (KB).
- j) Kehutanan.
- k) Sarana dan Prasarana Perdagangan.
- l) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal.
- m) Energi Pedesaan.
- n) Perumahan dan Pemukiman.
- o) Keselamatan Transportasi Darat.
- p) Sarana Dan Prasarana Kawasan Perbatasan.

Berikut merupakan hal-hal yang menghambat pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan hal-hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus untuk pencapaian sasaran prioritas nasional di daerah:

**Tabel 2.1. Penghambat pelaksanaan Dana Alokasi Khusus**

<p><b>Hal-Hal yang Menghambat Pelaksanaan DAK untuk Percepatan Pembangunan Daerah</b></p>	<p><b>Hal-Hal yang Menjadi Masalah dalam Pelaksanaan DAK untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional di Daerah</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besar alokasi Dana Alokasi Khusus yang relatif tidak besar;</li> <li>2. Informasi alokasi DAK per daerah terlambat diketahui daerah dibandingkan penetapan APBD;</li> <li>3. Besaran alokasi per tahun “tidak stabil” dan “tidak terprediksi” oleh daerah;</li> <li>4. Juknis DAK terlambat diterima daerah;</li> <li>5. Ruang lingkup (menu) kegiatan DAK tidak sesuai dengan kebutuhan daerah;</li> <li>6. Juknis yang diganti dalam tahap pelaksanaan;</li> <li>7. Unit cost dalam juknis terlalu murah dibandingkan harga di daerah/wilayah;</li> <li>8. Pelaporan ke DJPK terlambat sehingga pencairan dana tahap II dan III terlambat;</li> <li>9. Keterbatasan dalam penyediaan Dana Pendamping;</li> <li>10. DAK dan Dana Pendamping harus 100% fisik;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besar alokasi DAK yang relatif tidak besar;</li> <li>2. Tidak diketahui besar sasaran per kegiatan di masing-masing bidang;</li> <li>3. Tidak diketahui besar sasaran per kegiatan di masing-masing bidang per daerah.</li> </ol> <p>Pagu alokasi per bidang DAK belum ditetapkan saat proses penyusunan kebijakan dan ruang lingkup kegiatan dalam RKP sehingga menyulitkan menentukan besaran target sasaran per kegiatan di masing-masing bidang dan di masing-masing daerah.</p>

Sumber : Budhi Santoso, 2013 ([tanamanpangan.deptan.go.id](http://tanamanpangan.deptan.go.id))

Dalam tabel di atas dijelaskan mengenai permasalahan umum DAK yang sering terjadi di daerah-daerah. Salah satu permasalahan DAK yang paling umum terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia adalah petunjuk teknis yang sering

terlambat. Keterlambatan petunjuk teknis menjadi masalah yang krusial bagi daerah karena hal tersebut nantinya akan memengaruhi waktu pelaksanaan DAK yang juga menjadi semakin pendek. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk dicari jalan keluarnya.

*c. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus*

Daerah tertentu yang dapat memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Rencana kerja pemerintah merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbang) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Berikut merupakan kriteria daerah tertentu yang memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013:

1. Kriteria Umum

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.

2.

### 3. Kriteria Khusus

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus, dan karakteristik daerah. Kriteria-kriteria khusus tersebut antara lain:

- a) Seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK;
- b) Karakteristik daerah untuk kabupaten/kota meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

### 4. Kriteria Teknis

Kriteria teknis pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) disusun berdasarkan kegiatan khusus yang dirumuskan oleh kementerian/lembaga yang menaungi bidang yang bersangkutan.

Salah satu bidang yang mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus adalah bidang pendidikan. Adapun Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dibagi menjadi Dana Alokasi Bidang Pendidikan Dasar yang ditujukan bagi pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah yang ditujukan untuk pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengalokasian DAK dalam bidang pendidikan dasar lebih diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut

dikarenakan pendidikan dasar merupakan pijakan awal bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berpendidikan.

### **5. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar**

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar ([dikmen.kemdikbud.go.id](http://dikmen.kemdikbud.go.id)). Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Sasaran dari program ini adalah SD/SDLB dan SMP/SMPLB baik negeri maupun swasta.

Adapun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Dasar meliputi:

1. Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebenar-benarnya;



3. Terbuka dan bersaing, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK bidang Pendidikan Dasar;
5. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun.
7. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional;
8. Manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar tidak terlepas dari peran aktor atau pelaku kebijakan. Masing-masing aktor memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Adapun berikut merupakan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaku kebijakan Dana Alokasi

Khusus Bidang Pendidikan Dasar berdasarkan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2013:

1. Pemerintah Provinsi

- a. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar bagi Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang narasumber dari institusi yang relevan;
- b. Melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- c. Melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota

- a. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK Bidang Pendidikan Dasar;
- b. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, dan biaya operasional lainnya, sesuai dengan kebutuhan;
- c. Menetapkan nama-nama SD/SDLB dan SMP/SMPLB penerima DAK Bidang Pendidikan Dasar dalam SK Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat;

d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Dasar di tingkat Kabupaten/Kota.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a. Membuat rencana alokasi jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang akan menerima DAK, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;

b. Membentuk tim teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah;

c. Mengusulkan nama-nama SD/SDLB dan SMP/SMPLB beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK Bidang Pendidikan Dasar kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan;

d. Mensosialisasikan pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Dasar kepada seluruh sekolah penerima;

e. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK;

g. Menggandakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan

mendistribusikannya kepada seluruh sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Dasar;

- h. Melaporkan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

4. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota

Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar d tingkat kabupaten/kota.

5. Satuan pendidikan

- a. Mengangkat panitia pembangunan di sekolah yang bertugas melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang dan/atau pembangunan ruang perpustakaan, ruang kelas baru, ruang belajar lainnya;
- b. Mencatat hasil DAK Bidang Pendidikan Dasar sebagai inventaris sekolah;
- c. Memanfaatkan bangunan/barang hasil DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
- d. Merawat dan memelihara bangunan/barang hasil DAK Bidang Pendidikan Dasar.

#### 6. Komite Sekolah

Komite sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar di tingkat sekolah.

#### 7. Panitia Pembangunan Sekolah.

- a. Memilih dan menetapkan kepala pelaksana;
- b. Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak sedang atau pembangunan perpustakaan, ruang kelas baru, dan ruang belajar lain, dengan mekanisme swakelola, serta sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis;
- c. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi atau pembangunan baik administrasi keuangan maupun teknis. Buku-buku yang digunakan untuk mencatat keluar-masuknya dana dan dokumentasi lainnya harus berada di sekolah;
- d. Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan yang menggunakan serta hasil pembangunan kepada seluruh anggota masyarakat, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari prinsip pemerataan. Seluruh daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil dan kawasan perbatasan berhak untuk mendapat alokasi DAK untuk memajukan pembangunan pendidikan di daerahnya. Pembangunan pendidikan di daerah-

daerah tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **D. Pendidikan di Kawasan Perbatasan**

##### **1. Kawasan Perbatasan**

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara). Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah ([www.balitbang.kemhan.go.id](http://www.balitbang.kemhan.go.id)).

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dengan jelas dibedakan definisi wilayah (negara) dengan kawasan (perbatasan). Wilayah (Negara) adalah salah satu unsur negara yang yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 angka 1). Definisi kawasan (perbatasan) adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain (Pasal 1 angka 6).

Dalam Permendikbud Nomor 34 tahun 2012 Tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru disebutkan mengenai kriteria-kriteria dari daerah perbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai kawasan laut dan kawasan daratan pesisir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas Landas Kontinental (BLK), dan batas zona perikanan khusus, dan/atau
2. Sebagai kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Pembangunan kawasan tertinggal merupakan pelaksanaan dari salah satu asas dari desentralisasi, yaitu desentralisasi spasial. Smith (1985:77) menyebutkan bahwa,

*“...The delimitation of areas for decentralized government and administration is far from being merely a technical exercise. Crucial political choices have to be made about the objectives of decentralized institutions. Conflicts over these objectives will inevitably lead to conflicts over the appropriate criteria to be used in drawing administrative boundaries.....”*

“...Penentuan batas wilayah untuk pemerintahan dan tata administrasi yang terdesentralisasi masih jauh dari sekedar latihan teknis. Pilihan-pilihan politik yang krusial harus dibuat berdasarkan tujuan lembaga-lembaga desentralisasi. Permasalahan mengenai tujuan-tujuan ini mau tidak mau pasti akan menuntun pada permasalahan-permasalahan tentang kriteria yang tepat yang akan digunakan dalam menetapkan batas-batas administratif....”

Rupidara, seperti yang dikutip oleh Ahab dalam politik.kompasiana.com (14 Maret 2012) menyebutkan bahwa:

“..Kawasan perbatasan negara memiliki potensi dan peluang untuk berkembang dengan baik, jikalau sejumlah kendala dan hambatan mendasar yang juga telah menyebabkan berbagai masalah mendasar, seperti rendahnya taraf kehidupan masyarakat, tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi, masalah politik, keamanan dan ketertiban dapat dikelola demi pemecahannya dengan baik, melalui kebijakan yang lebih baik dalam arti lebih terintegrasi dan menyeluruh dengan semangat pembaharuan dan perubahan pada berbagai aspek/dimensinya, seperti hal pembaharuan dan perubahan paradigma

berpikir dan strategi, aturan, organisasi dan tata kelola termasuk bidang-bidang pengelolaan; serta dukungan sumberdaya. Sedemikian rupa proses dari semua hal itu, sehingga terciptanya kondisi yang lebih menjamin proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional umumnya dan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan khususnya.”

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan isu krusial dan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia terkait dengan pembangunan nasional. Pembangunan daerah tertinggal merupakan amanah UUD 1945 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, selama sebagian warga negara Indonesia masih mengalami kendala sosial, ekonomi, budaya akibat keterbatasan daya dukung daerah yang dihuninya.

## **2. Pendidikan di Kawasan Perbatasan**

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk membangun seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan setinggi-tingginya. Namun tujuan tersebut masih patut dipertanyakan mengingat masih tingginya tingkat kesenjangan pembangunan yang disebabkan oleh berbagai kendala, baik kendala keterbatasan dana maupun kendala-kendala geografis atau spasial mengingat luasnya wilayah Indonesia. Ditambah pula dengan adanya daerah perbatasan yang biasanya juga terpencil dan seringnya juga tertinggal arus pembangunan (Tilaar, 2008:102).

Setidaknya terdapat 4 (empat) asas penting terkait dengan pendidikan di daerah terpencil, tertinggal dan kawasan perbatasan menurut Tilaar (2008:103).

Keempat asas tersebut antara lain:

- a. Asas pemerataan pembangunan.



- b. Asas penanggulangan kemiskinan.
- c. Wawasan nusantara.
- d. Peningkatan martabat dan kualitas manusia

Masalah pendidikan di daerah terpencil dan kawasan perbatasan sudah sangat lama kita sadari. Namun dengan dalih keterbatasan dana serta berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku, pemerintah selalu menunda-nunda pemecahan masalah tersebut. Beberapa permasalahan tersebut misalnya saja adalah sulitnya menempatkan tenaga pengajar di daerah terpencil dan kawasan perbatasan. Permasalahan lainnya adalah sulitnya membangun sarana pendidikan standar karena kendala komunikasi dan transportasi (Tilaar, 2008:111).

Tujuan utama pendidikan di daerah terpencil, kepulauan dan kawasan perbatasan adalah untuk mengangkat martabat manusia kepada hidup yang lebih layak (Tilaar, 2008:112). Berikut merupakan beberapa pendekatan oleh Tilaar (2008:112) yang ditawarkan kepada Pemerintah, yaitu:

- a. Pengadaan dan penempatan guru, dilakukan dengan menerapkan sistem insentif, misalnya dengan:
  - 1) Rotasi tugas dalam Kabupaten sesudah mengabdikan selama 3 tahun;
  - 2) Kenaikan pangkat istimewa setelah mengabdikan selama 5 tahun di tempat yang sama atau di daerah terpencil lainnya;
  - 3) Memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi bagi yang menunjukkan prestasi yang inovatif;
  - 4) Memberikan karya-siswa di dalam maupun di luar negeri bagi yang berprestasi;
  - 5) Menyediakan perumahan yang layak di tempat tugas.
- b. Pengelolaan pendidikan melalui Kabupaten. Penanganan daerah terpencil dan kawasan perbatasan harus ditangani oleh aparat yang terdekat dengan lokasi. Dalam hal ini, kabupaten adalah unit administrasi yang relatif paling dekat dengan lokasi tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seharusnya kabupatenlah yang merencanakan serta mengelola kebijakan mengenai pendidikan di daerah terpencil dan kawasan perbatasan.

- c. Pelaksanaan kurikulum yang sarat dengan muatan lokal. Kurikulum untuk daerah terpencil dan kawasan perbatasan perlu dirancang khusus tanpa meninggalkan tuntutan dari standar kurikulum nasional. Diperlukan pemupukan wawasan nusantara bagi siswa. Oleh karena itu, muatan lokal perlu untuk mendapatkan prioritas.
- d. Keterkaitan dengan sektor-sektor lain secara terpadu. Telah diketahui bahwa ada keterkaitan pendidikan dengan pendapatan keluarga, namun pendidikan tanpa arah akan menjadi beban pembangunan. Oleh sebab itu, selain berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan juga difungsikan untuk meningkatkan produktivitas dari masyarakat daerah terpencil dan kawasan perbatasan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode berasal dari bahasa lain *methodos* yang berarti strategi, cara, taktik, atau siasat. Dalam arti luas menurut Furchan (1992:17) metodologi menunjuk kepada proses, prinsip, serta prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban atas semua masalah, dalam ilmu-ilmu sosial maka cara-cara tersebut dilakukan dengan mengadakan penelitian. Penelitian menurut John Dewey seperti yang dikutip oleh Subana (2001:9) adalah harus memuat unsur-unsur berpikir ilmiah yaitu terungkap adanya persoalan dan masalah, bila perlu mengajukan dugaan-dugaan (hipotesis), adanya informasi, bukti, atau data yang logis untuk dianalisis dan diakhiri dengan suatu kesimpulan berikut dengan analisisnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk-bentuk kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan untuk menggambarkan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Penelitian ini mencoba melihat serta mendeskripsikan secara intensif tentang gambaran dari perencanaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Nunukan khususnya di

Kecamatan Sembakung serta menganalisis faktor – faktor yang dapat menghambat dan menunjang dalam hal implementasi dari kebijakan tersebut. Sebelumnya, penelitian ini juga akan melihat bagaimana perencanaan pendidikan dasar di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan.

## **B. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena akan membuat peneliti tidak terjerumus ke dalam sekian banyak kompleksnya data yang akan diteliti (Narbuko, 2003:139). Dengan adanya fokus penelitian, maka pusat perhatian dari permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis akan menjadi semakin jelas.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran permasalahan Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan.
  - 1) Akses pendidikan;
  - 2) Tenaga Pengajar;
  - 3) Sarana dan Prasarana
- b. Perencanaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Nunukan.
  - 1) Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Nunukan.
  - 2) Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan.

c. Faktor pendukung dan penghambat perencanaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan.

1) Faktor Pendukung Perencanaan dan Penggunaan DAK jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Nunukan

- a) Bentuk perhatian dari Pemerintah Pusat;
- b) Kebutuhan sekolah yang harus dipenuhi;
- c) Kesiapan sekolah dalam menerima bantuan.

2) Faktor Penghambat Perencanaan dan Penggunaan DAK Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Nunukan.

- a) Petunjuk Teknis sering datang terlambat;
- b) Standardisasi Petunjuk Teknis terlalu kaku;
- c) Mobilisasi yang sulit.

### **C. Lokasi Dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian, sedangkan situs penelitian adalah objek yang akan dilakukan suatu penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nunukan. Pemilihan lokasi ini selain didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, tetapi juga fakta bahwa Kabupaten Nunukan sendiri terletak di perbatasan utara antara Indonesia dan Malaysia.

Situs penelitian adalah tempat atau peristiwa yang didalamnya peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari obyek penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi situs penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
- 2) UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sembakung;
- 3) SDN 004 Sembakung, sebagai sekolah yang menerima DAK;
- 4) SDN 018 Sembakung, sebagai sekolah yang menerima DAK;
- 5) SDN 014 Sembakung , sebagai sekolah yang tidak menerima DAK.

#### **D. Sumber Data**

Data merupakan perwujudan dan informasi yang sengaja digali untuk dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya (Subagyo, 1999:38). Untuk dapat memperoleh data yang sebenarnya dengan tepat, perlu dilakukan proses pengumpulan data di lapangan. Proses pengumpulan data-data tersebut berasal dari narasumber yang tepat dan dapat dijadikan pegangan akan keakuratan hasil penelitian nantinya. Pada umumnya, dalam penelitian terdapat dua jenis data, yang terdiri dari :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari obyek penelitian
- 2) Data Sekunder, yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan dua jenis data tersebut yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer dengan sumber data yang terdiri dari:
  - a. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;
  - b. Staf Bidang Pendidikan Dasar dan SLB;
  - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, TK/PAUD;
  - d. Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan;
  - e. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sembakung;
  - f. Kepala Sekolah SDN 004 Sembakung
  - g. Kepala Sekolah SDN 018 Sembakung
  - h. Kepala Sekolah SDN 014 Sembakung
2. Data Sekunder dengan sumber data:
  - a. Arsip-arsip yang dimiliki data primer yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan
  - b. Data lain yang menunjang, misalnya buku, koran, dokumentasi, internet, jurnal, dan sumber data sekunder lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data secara umum dapat dibedakan menjadi teknik pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena data yang dihasilkan ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Data yang diambil dalam sebuah proses penelitian haruslah valid, yaitu dengan menggunakan metode penelitian di

lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. *Pengamatan langsung/Observasi*

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang sangat mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti. Teknik pengumpulan data yang paling umum adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, artinya peneliti berada di tempat terjadinya fenomena yang diamati.

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka pada penelitian ini akan memerhatikan bagaimana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar khususnya jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan nantinya dikelola dan disalurkan kepada sekolah-sekolah penerima. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan mengamati bagaimana nantinya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan kepada sekolah akan memengaruhi mutu pembelajaran di sekolah tersebut.

### 2. *Wawancara*

Wawancara merupakan salah satu jenis teknik pengamatan secara langsung. Pengumpulan data dengan wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara yang peneliti lakukan pada penelitian ini disesuaikan dengan perumusan masalah dan fokus penelitian, serta subyek yang



diwawancari. Keuntungan dari wawancara adalah dimungkinkannya penggalian data yang mendalam tentang informasi yang dibutuhkan dari responden.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau bahan-bahan tertulis (Usman, 2003:73), yaitu: dokumen, arsip, jurnal, karya ilmiah, dan juga artikel-artikel yang berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan beserta foto yang menggambarkan sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar tersebut.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan faktor penting yang mendukung berjalannya proses penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, (Moleong, 2000:4) mengemukakan bahwa "*instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah peneliti sendiri*". Jika tidak memasukkan peneliti sebagai instrumen penelitian, sangat tidak mungkin, sebab tidak dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.

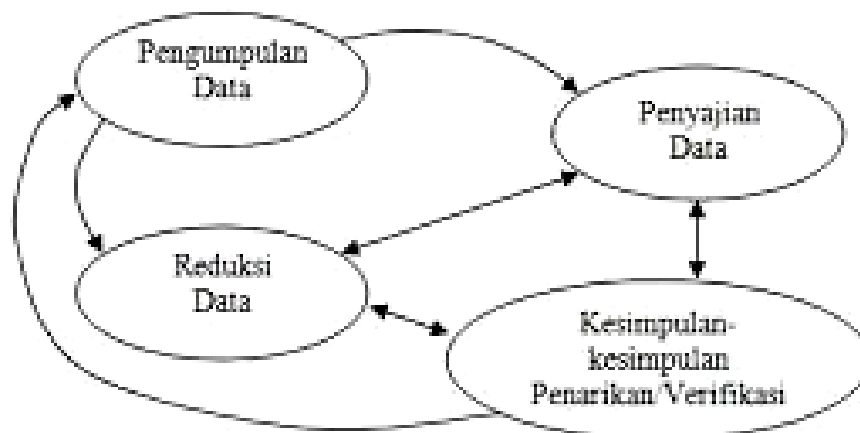
Jadi dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen pokok, sedangkan instrumen penunjangnya adalah:

- a. Peneliti, sebagai pihak yang melaksanakan penelitian
- b. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan yang hendak diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.
- c. Catatan lapangan (*fieldnotes*), digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.
- d. Pedoman observasi (*observation schedule*), yaitu serangkaian arahan/pedoman dalam melakukan observasi yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian
- e. Alat tulis-menulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan

### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data agar mudah dibaca. Kemudian secara deskriptif dengan disesuaikan pada jenis penelitian, data diolah dan disajikan untuk menunjukkan fenomena atau gejala yang terjadi dilapangan (Nasir, 1999:419).

Teknik analisis data yang digunakan dalam peelitian ini adalah analisis dengan model interaktif, dimana dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992:20). Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan secara interaktif ketiga komponen tersebut, yang dapat disajikan dengan gambar sebagai berikut:



**Gambar 3.1. Bagan Analisis Data Model Interaktif**

*Sumber : Miles dan Huberman, 1992*

#### 1. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data melalui tiga teknik, yaitu wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Tiga teknik digunakan menyesuaikan dengan data yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tim teknis pelaksana dan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, serta sekolah dasar yang menerima dan tidak menerima DAK.

#### 2. Reduksi data

Data di lapangan diuraikan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan, dalam hal ini hasil wawancara dan observasi akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Adapun hasil wawancara berisi tentang perencanaan teknis dari pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan.

Sedangkan, hasil observasi berisi tentang pengamatan peneliti dalam hal perencanaan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan.

### 3. Penyajian data

Sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian data akan memudahkan penelitian guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian

### 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Peneliti berusaha menggambarkan data yang dikumpulkan, dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat *tentative*, tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus-menerus dapat ditarik kesimpulan yang benar.

Dalam analisis data kualitatif model interaktif yang digunakan peneliti merupakan upaya terus-menerus yang mencakup tahapan-tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling susul-menyusul dan senantiasa merupakan bagian dari lapangan (Miles dan Huberman, 1992:20).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kabupaten Nunukan

###### a. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kabupaten Nunukan kaya akan potensi sumber daya alam dimana sebagian dari potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar merupakan penghasil devisa daerah, khususnya dari Sektor Pertambangan, Kehutanan dan hasil lainnya.

Kabupaten Nunukan terletak pada posisi antara 115°33' sampai dengan 118°03' Bujur Timur dan 3°15' sampai dengan 4°24' Lintang Utara. Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Serawak. Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 14.263,68 Km<sup>2</sup> atau 7,06% dari total luas Provinsi Kalimantan Timur dan wilayah lautan sejauh 4 mil laut dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 1.408,758 Km<sup>2</sup>. Setelah mengalami pemekaran, wilayah Kabupaten Nunukan terdiri atas lima belas kecamatan pada tahun 2012; yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis

Ogong, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Timur, Kecamatan Sembakung Tengah, Kecamatan Sembakung Utara dan Kecamatan Sembakung Barat.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nunukan berpedoman pada Visi pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2012-2016. Adapun visi pembangunan Kabupaten Nunukan 2012-2016 dirumuskan sebagai *"Terwujudnya masyarakat Nunukan yang maju, aman, damai, adil, dan bermoral, demokratis, mandiri, sejahtera dan berdaya saing sebagai beranda terdepan NKRI"*.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nunukan tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan pernyataan usaha pencapaian visi seperti tersebut di atas. Misi pembangunan Kabupaten Nunukan periode 2012 – 2016 adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*);
- b. Meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat serta layanan dasar sosial lainnya yang didukung dengan pendayagunaan IPTEK;
- c. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan SDA dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana publik, energi, sitem transportasi dan optimalisasi tata ruang;
- e. Mewujudkan Daerah Perbatasan yang Maju dan Mandiri;

- f. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan (*Sustainable Development*);
- g. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi keadilan dan HAM



**Gambar 4.1. Peta Kabupaten Nunukan**

*Sumber : BPS Kabupaten Nunukan*

#### **b. Sejarah Singkat Kabupaten Nunukan**

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bulungan di pelopori oleh R.A. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai bupati. Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan pemekaran

pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan resmi menjadi kabupaten dengan 5 wilayah administratif, yakni Kecamatan Lumbis, Sembakung, Nunukan, Sembakung, dan Krayan yang ditandai dengan dilantikannya Pejabat Bupati Nunukan pada tanggal 12 Oktober 1999, Drs Bustaman Arham.

Setelah pelantikan Bupati Nunukan, dilakukan persiapan penataan perangkat pemerintah daerah dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tanggal 25 Desember 1999, dilantik 14 orang pejabat pada eselon 2, 3, 4 untuk mengisi jabatan struktural. Tiga hari setelah pelantikan pejabat struktural ini, tepatnya tanggal 28 Desember 1999 dilanjutkan dengan pelantikan 20 orang anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan hasil pemilihan umum tahun 1999. Para legislator tersebut berasal dari Partai Golongan Karya (PG), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional. Sebagai ketua DPRD H.Mansyur Husin, didampingi Drs.H.Ngatijan Achmadi, Muslimin,SH dan Mayor Samuji.

Tahun 2001 dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk pertama kalinya. Ada lima pasangan calon yang ikut dalam pemilihan yaitu Drs.H.Bustaman Arham - H.Ali Karim , Drs.Aseng Gusti Nuch - H.Arsyad



Talib,SE, H.Abdul Hafid Achmad - Drs.Kasmir Foret,MM . Pemilihan yang berlangsung di DPRD Nunukan berlangsung cukup tegang, meskipun tetap aman dan terkendali. Hasilnya, terpilih pasangan H. Abdul Hafid Achmad dan Drs. Kasmir Foret, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nunukan periode 2001-2006, keduanya dilantik pada tanggal 30 Mei 2001 di gedung ACMY oleh Gubernur Kaltim Suwarna Abdul Fatah.

Periode pertama dapat dilalui dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan Kabupaten Nunukan. Sekertaris Daerah Drs.Budiman Arifin,MSi setelah terpilih sebagai Bupati Bulungan, digantikan oleh Drs.Zainuddin.HZ,MSI. Program pembangunan terus digenjut, anggaran pembangunan terus meningkat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan. Pemilu legislatif tahun 2004 telah memperkaya nuansa dan keragaman parpol anggota DPRD nunukan. Partai Golkar 8 kursi, PBB 7, PDIP 3 kursi, PPP 2 kursi, PAN, PDS, PKB, PDK dan Partai Demokrat masing-masing 1 kursi. Terpilih sebagai ketua Drs.H.Ngatijan Achmadi,MSi, wakil ketua Muhammad Saleh dan Abdul Wahab Kiak.

Perjalanan pemerintahan semakin baik. Sarana dan prasarana pelayanan seperti perkantoran, bidang pendidikan dan kesehatan, perhubungan dan transportasi, mulai berkembang baik. Jumlah Kecamatan bertambah menjadi sembilan Kecamatan setelah terbentuknya Kecamatan Sebuku, Krayan Selatan, Sembakung Barat dan Nunukan Selatan. Gerak dinamika pembangunan terus berjalan, sampai tahun 2006 kembali berlangsung pesta Demokrasi melalui Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Empat pasangan calon ikut berkompetensi, yaitu H.Abdul Hafid Achmad - Kasmir Foret, Asmah Gani - M.Syawal Pamulang, Mashur Alias - Yepta Bertho, Ir.Yakub - H.Arifuddin Ali. Dari hasil pemilihan langsung oleh rakyat, akhirnya pasangan H.Abdul Hafid Acmad - Drs.Kasmir foret,MM kembali mendapat amanah rakyat memimpin Nunukan 2006 – 2011. Pasangan tersebut kembali di lantik oleh gubernur kaltim Suwarna AF tanggal 31 Mei 2006 di Gedung DPRD Nunukan.

Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Nunukan merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang tergabung dalam provinsi baru tersebut.

### **c. Kondisi Geografis Kabupaten Nunukan**

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu dari 14 Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan sesuai dengan UU No. 47 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 7 tahun 2000. Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 14.263,68 km<sup>2</sup>, dan terletak pada posisi 3°15'00" - 4°24' 55" Lintang Utara - 115°22'30" – 118°44' 55" Bujur Timur dengan panjang garis perbatasan langsung dengan Negara tetangga sepanjang 520.724,43 km.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang 13 kecamatannya terletak pada garis perbatasan antara Republik Indonesia dengan Malaysia (Sabah dan Serawak). Dengan posisi yang strategis tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Nunukan sebagai cermin dan halaman depan dari berbagai aktivitas perekonomian

lintas batas atau antar negara, sehingga dengan demikian perlu mendapat perhatian khusus, terutama terhadap penanganan berbagai permasalahan yang timbul yang terkait dengan eksistensi wilayah perbatasan.

**Tabel 4.1. Luas Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Nunukan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan/Desa</b>	<b>Luas Wilayah</b>
Krayan	65	1834,74 km <sup>2</sup>
Krayan Selatan	24	1757,66 Km <sup>2</sup>
Lumbis	28	290,23 Km <sup>2</sup>
Lumbis Ogong	49	3357,01 Km <sup>2</sup>
Sembakung	18	2042,66 Km <sup>2</sup>
Nunukan	5	564,50 Km <sup>2</sup>
Sei Menggaris	9	850,48 Km <sup>2</sup>
Nunukan Selatan	4	181,77 Km <sup>2</sup>
Sebuku	4	1608,48 Km <sup>2</sup>
Tulin Onsoi	12	1513,36 Km <sup>2</sup>
Sebatik	4	51,07 Km <sup>2</sup>
Sebatik Timur	4	39,17 Km <sup>2</sup>
Sebatik Tengah	4	47,71 Km <sup>2</sup>
Sebatik Utara	4	15,39 Km <sup>2</sup>
Sebatik Barat	3	93,27 Km <sup>2</sup>
<b>Jumlah/Total</b>	<b>240</b>	<b>14247,50 Km<sup>2</sup></b>

*Sumber : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013*

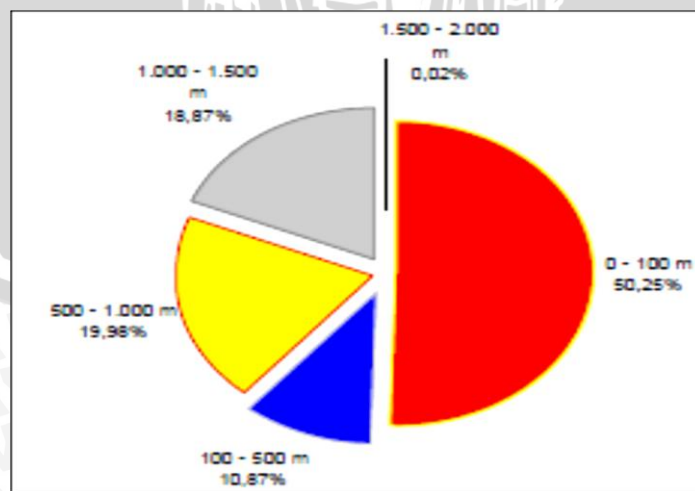
Batas-batas wilayah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia)
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia).

Morfologi wilayah Kabupaten Nunukan berupa permukaan tanah yang datar, landai dan berbukit dan bergelombang. Berdasarkan Topografinya Kabupaten Nunukan berada di ketinggian antara 0-100 dpl dan hampir 50,25% berada di ketinggian 0-100 dpl. Umumnya terletak di dekat Sungai sekitar 10,87% berada di ketinggian 100-500 dpl dan 19,98% berada di ketinggian 500 -1000 dpl.

Untuk kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m-3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8 - 15%, sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0 - 50%.



**Gambar 4.2. Persentase Penyebaran dan Luas Ketinggian**

*Sumber : Buku Profil 2011*

Berdasarkan kondisi hidrologinya, Kabupaten Nunukan dipengaruhi oleh sekitar 10 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan 17 pulau, Sungai terpanjang adalah Sungai Sembakung dengan panjang 278 km, sedangkan Sungai Tabut merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km. Sungai ini memiliki Peranan yang cukup penting sebagai sarana Transportasi Air (mobilisasi penduduk, hasil pertanian dan perdagangan) di Kabupaten Nunukan, Sungai – sungai meliputi :

**Tabel 4.2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Nunukan**

<b>Nama DAS</b>	<b>Panjang (Km)</b>
Sembakung	278
Sulunan	52
Sumalungun	42
Sepadaan	32
Itay	146
Sebuku	115
Agisan	62
Tikung	50
Tabut	30
Simanggaris	36

*Sumber : Nunukan Dalam Angka 2012*

Kabupaten Nunukan berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan Nopember-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Nunukan pada tahun 2012, Nunukan mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,10C. Suhu udara terendah 19,40C terjadi pada bulan September, dan tertinggi 34,00C pada bulan Maret.

Suhu udara Nunukan yang cenderung panas dipengaruhi oleh topografi Pulau Nunukan yang dikelilingi laut. Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas, Pulau Nunukan mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi. Pada tahun 2012 kelembaban udara berkisar antara 44,0% sampai dengan 100,0%. Sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 242,8 mm, dengan curah hujan tertinggi 392,1 mm pada bulan Mei dan terendah 118,6 mm pada bulan Januari.

**Tabel 4.3.**

**Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari**

Uraian	Stasiun
	Nunukan
Suhu ( <sup>0</sup> C)	
Maksimum	34 <sup>0</sup>
Minimum	19,4 <sup>0</sup>
Rata – Rata	27 <sup>0</sup>
Kelembaban Udara	
Maksimum	100 %
Minimum	44 %
Rata-Rata	85%
Tekanan Udara	1008,4 mb – 1009,5 mb
Kecepatan Angin (knot)	4-7
Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	226,27
Penyinaran Matahari	60%

*Sumber : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013*

#### d. Demografi

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari peran serta penduduknya sebagai subjek pembangunan, demikian pula dengan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi merupakan suatu potensi yang dapat mendorong keberhasilan suatu pembangunan jika kuantitas tersebut juga diimbangi dengan kualitas yang tinggi pula. Namun disisi lain jumlah penduduk yang tinggi dapat pula menimbulkan suatu masalah jika penyebarannya kurang merata. Otonomi daerah dan pemekaran wilayah diharapkan dapat meningkatkan potensi dan peran penduduk sebagai subjek pembangunan serta mengurangi masalah kepadatan dan mobilitas penduduk.

Penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2012 berjumlah 163.402 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 11,47 jiwa/km<sup>2</sup>. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,59% dari jumlah penduduk tahun lalu yang sebesar 154.269 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah pendatang di Kabupaten Nunukan. Tingginya minat pendatang disebabkan berbagai faktor, diantaranya karena semakin lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. Faktor yang lain adalah karena besarnya kesempatan kerja di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan industri pengolahan kayu serta sektor jasa lainnya.

**Tabel 4.4. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
Krayan	8742	9058	7240	7295	7321	4,76	3,94	3,94	3,98	3,99
Krayan Selatan	2321	2372	2243	2248	2247	1,32	1,28	1,28	1,28	1,28
Lumbis	9507	9634	9883	4966	5074	3,61	2,72	2,71	17,11	17,48
Lumbis Ogong	-	-	-	5278	5393	-	-	-	1,57	1,61
Sembakung	8542	8580	8138	8519	8759	4,15	3,97	3,96	4,17	4,29
Nunukan	55701	47056	53621	52164	55853	34,48	37,73	37,73	92,41	98,84
Sei Menggaris	-	-	-	7673	8216	-	-	-	9,02	9,66
Nunukan Selatan	-	-	12260	14594	16273	-	-	70,27	80,29	89,53
Sebuku	11981	12236	14899	10044	10759	3,83	3,93	4,77	6,24	6,69
Tulin Onsoi	-	-	-	6606	7076	-	-	-	4,37	4,68
Sebatik	20935	21610	22173	4266	4455	200,49	211,20	212,34	83,53	87,23
Sebatik Timur	-	-	-	11499	12009	-	-	-	293,57	306,59
Sebatik Tengah	-	-	-	6736	7035	-	-	-	141,19	147,45
Sebatik Utara	-	-	-	5186	5417	-	-	-	336,97	351,98
Sebatik Barat	11282	11543	10384	7195	7515	79,34	73,14	73,03	77,14	80,57
<b>Jumlah</b>	<b>129011</b>	<b>132542</b>	<b>140841</b>	<b>154269</b>	<b>163402</b>	<b>9,04</b>	<b>9,87</b>	<b>9,87</b>	<b>10,83</b>	<b>11,47</b>

Sumber : Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Nunukan. Namun begitu kepadatan penduduk rata-rata tertinggi berada di Kecamatan Sebatik. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Salah satu faktor yang menyebabkan antara lain adalah tingginya minat pendatang untuk tinggal dan mencari nafkah di Kabupaten Nunukan.

#### e. Keuangan Daerah

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat



untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam suatu sistem terintegrasi, ditetapkan APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berikut merupakan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan dalam 5 Tahun terakhir:



Tabel 4.5. Rekapitulasi APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2009-2013

NO	Realisasi Anggaran	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>A</b>	<b>Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)</b>	<b>849,965,318,423.29</b>	<b>916,405,867,934.98</b>	<b>1,357,200,132,973</b>	<b>1,560,302,337,931.51</b>	<b>1,485,275,350,004.00</b>
<b>a.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>49,052,693,072.29</b>	<b>34,871,930,504.98</b>	<b>44,892,410,248.93</b>	<b>75,985,524,251.51</b>	<b>59,561,713,000.00</b>
a.1.1	Pajak Daerah	1,769,872,948.17	1,876,767,964.00	4,080,500,475.81	4,354,820,473.96	11,368,860,000.00
a.1.2	Retribusi Daerah	7,479,761,190.00	8,241,648,389.00	3,893,508,480.00	2,334,793,299.00	4,148,291,500.00
a.1.3	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,378,441,854.92	4,138,869,801.80	4,533,946,756.34	3,344,673,436.96	3,311,814,000.00
a.1.4	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	34,064,617,079.20	20,614,644,350.18	32,384,204,536.78	65,951,237,041.59	40,732,747,500.00
<b>a.2</b>	<b>Dana Perimbangan (Transfer)</b>	<b>707,427,922,451.00</b>	<b>799,635,180,530.00</b>	<b>1,166,232,434,225.00</b>	<b>1,338,134,657,280.00</b>	<b>1,212,389,575,204.00</b>
a.2.1	Dana Bagi Hasil	529,728,410,451.00	710,196,132,330.00	852,370,265,585.00	998,848,013,280.00	802,698,288,204.00
a.2.2	Dana Alokasi Umum	124,384,512,000.00	47,858,848,200.00	240,123,668,640.00	296,210,334,000.00	307,765,777,000.00
a.2.3	Dana Alokasi Khusus	53,315,000,000.00	41,580,200,000.00	73,738,500,000.00	43,076,310,000.00	101,925,510,000.00
<b>a.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>93,484,702,900.00</b>	<b>81,898,756,900.00</b>	<b>146,075,288,500.00</b>	<b>146,182,156,400.00</b>	<b>213,324,061,800.00</b>
a.3.1	Hibah	3,769,950,000.00	0	0	0	1,200,000,000.00
a.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
a.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota	14,417,422,900.00	30,104,669,400.00	56,062,159,000.00	62,247,920,000.00	77,901,064,800.00
a.3.4	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	5,000,000,000.00	2,351,887,500.00	20,581,429,500.00	20,033,133,000.00	24,761,597,000.00
a.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah daerah lainnya	70,297,330,000.00	49,442,200,000.00	69,431,700,000.00	63,901,103,400.00	109,461,400,000.00
<b>B</b>	<b>Belanja (b.1 + b.2)</b>	<b>1,035,820,307,005.00</b>	<b>779,538,383,738.76</b>	<b>1,037,267,041,905.53</b>	<b>1,197,643,582,422.66</b>	<b>2,295,987,609,571.24</b>
<b>b.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>512,916,544,679.68</b>	<b>269,525,039,444.17</b>	<b>318,947,109,633.69</b>	<b>350,176,988,161.04</b>	<b>516,782,137,102.94</b>
b.1.1	Belanja Pegawai	272,578,492,794.00	210,424,645,988.00	243,799,878,354.00	282,385,072,236.23	357,189,006,362.84

NO	Realisasi Anggaran	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
b.1.2	Bunga	218,664,584,343.84	0	0	0	0
b.1.3	Subsidi		8,170,636,500.00	7,730,032,000.00	10,014,806,700.00	14,577,000,000.00
b.1.4	Hibah	9,725,200,000.00	19,521,054,189.07	27,487,454,570.14	12,929,528,450.00	66,922,279,250.00
b.1.5	Bantuan Sosial	11,942,871,541.84	10,297,202,767.10	12,251,164,500.00	10,466,592,500.00	13,850,548,720.00
b.1.6	Belanja Bagi Hasil		0	0	0	0
b.1.7	Bantuan Keuangan		11,991,500,000.00	26,741,567,967.70	33,854,284,774.81	51,743,302,770.10
b.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,396,000.00	120,000,000.00	937,012,241.85	526,703,500.00	12,500,000,000.00
<b>b.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>522,903,762,325.60</b>	<b>519,013,344,294.59</b>	<b>718,319,932,271.84</b>	<b>847,466,594,261.62</b>	<b>1,779,205,472,468.30</b>
b.2.1	Belanja Pegawai		77,525,219,702.00	90,620,153,375.00	123,607,711,738.00	165,816,704,840.46
b.2.2	Belanja Barang dan Jasa		136,679,110,565.56	180,404,860,078.67	259,632,425,496.68	391,396,479,278.42
b.2.3	Belanja Modal	522,903,762,325.60	304,809,014,027.03	447,294,918,818.17	464,226,457,026.94	1,221,992,288,349.42
<b>C</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>237,259,610,679.87</b>	<b>50,446,803,703.92</b>	<b>184,276,858,989.99</b>	<b>504,209,950,058.39</b>	<b>56,156,446,000.00</b>
Surplus/Defisit Anggaran		(185,854,988,581.99)	136,867,484,196.22	319,933,091,068.40	362,658,755,508.85	810,712,259,567.24

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, diolah

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa dana perimbangan di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan tiap tahunnya mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2012 yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2013. Walaupun dalam dana perimbangan di Kabupaten Nunukan rata-rata mengalami kenaikan namun ternyata hal tersebut tidak berlaku untuk alokasi DAK. Pengalokasian DAK oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengalami naik dan turun. Di tahun 2010 mengalami

penurunan di dari tahun 2009 dan di tahun 2011 mengalami kenaikan dari sebelumnya. Sedangkan di tahun 2013, alokasi DAK mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari sebelumnya di tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 58.849.200,00.

#### f. Transportasi dan Komunikasi

Era globalisasi menuntut mobilitas yang serba cepat dan mudah. Mobilitas dan aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari kebutuhan sarana transportasi dan komunikasi. Adapun penyediaan sarana dan transportasi daerah di Kabupaten Nunukan mencakup transportasi darat, laut dan udara. Di Kabupaten Nunukan sendiri prasarana transportasi yang tersedia di Kabupaten Nunukan hingga tahun 2012 mencakup 2 buah pelabuhan laut di Kecamatan Nunukan, 11 buah bandara yang terdiri dari 2 buah bandara domestik, yaitu Bandara Nunukan dan Bandara Long Bawan serta lainnya berupa bandara perintis.

**Tabel 4.6. Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan  
Tahun 2008-2012**

Jenis Kendaraan	2008	2009	2010	2011	2012
Mobil Penumpang	1.386	1.423	1.491	1.593	1.713
Mobil Bus	122	122	122	124	126
Mobil Barang	569	630	685	755	843
Sepeda Motor	15.880	18.950	22.786	27.573	31.438
Kendaraan Khusus	22	22	22	22	22
<b>JUMLAH</b>	<b>17.979</b>	<b>21.147</b>	<b>25.106</b>	<b>30.067</b>	<b>34.142</b>

Sumber : Kabupaten Nunukan dalam Angka 2013, diolah

Secara umum, untuk jumlah sarana transportasi darat di Kabupaten Nunukan hingga tahun 2012 telah mengalami peningkatan sebesar 13,55% dari tahun sebelumnya. Rinciannya yaitu jumlah kendaraan penumpang sebanyak 1713 unit, bus 126 unit, mobil barang 843 unit, dan sepeda motor 31.438 unit. Sedangkan untuk angkutan udara di Kabupaten Nunukan, selama tahun 2012 tercatat 1.881 penerbangan dilaksanakan di Bandara Nunukan dengan 24.177 penumpang berangkat dan 27.849 penumpang datang. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7% untuk keberangkatan penumpang dan 13,7% untuk kedatangan penumpang. Untuk angkutan laut, selama tahun 2012 terdapat 223 unit kapal dalam negeri dan 1.611 unit kapal luar negeri yang tambat di Pelabuhan Nunukan.

## **2. Profil Kecamatan Sembakung**

Kecamatan Sembakung merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Lumbis di sebelah barat, Kabupaten Bulungan di sebelah selatan dan timur serta di sebelah utara dengan Kecamatan Sebuku dan Nunukan. Ibukota Kecamatan Sembakung adalah Desa Atap. Kecamatan Sembakung dibelah oleh aliran Sungai Sembakung. Hal tersebut yang mengakibatkan sebagian besar desa di Kecamatan Sembakung terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS). Kecamatan Sembakung sendiri memiliki luas wilayah sebesar 2.042,66 Km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kecamatan Sembakung pada tahun 2012 mencapai angka 8.759 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 4.574 jiwa dan perempuan sebanyak 4.185 jiwa. Sumber penghasilan utama masyarakat Kecamatan Sembakung adalah

dari sektor pertanian. Dari 20 (dua puluh) desa yang terdapat di Kecamatan Sembakung, 9 diantaranya berstatus desa swakarya, yaitu desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, dan 11 desa lainnya adalah desa swasembada, yaitu desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.

Adapun berikut daftar nama desa-desa yang masuk dalam Kecamatan Sembakung:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| a) Liuk Bulu   | k) Butas Bagu    |
| b) Binanun     | l) Labuk         |
| c) Pulau Keras | m) Pagar         |
| d) Sabuluan    | n) Tujung        |
| e) Tulang      | o) Manuk Bungkul |
| f) Saduman     | p) Atap          |
| g) Paguluyon   | q) Lubakan       |
| h) Mambulu     | r) Tagul         |
| i) Katul       | s) Plaju         |
| j) Lubok Buat  | t) Tepian        |

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sembakung hidup di bantaran Sungai Sembakung. Oleh sebab itu banyak sekali aspek kehidupan yang dilaksanakan di sungai, misalnya mandi/cuci, bahan baku air minum yang dijernihkan dengan menggunakan tawas, irigasi dan transportasi. Kecamatan Sembakung adalah salah satu kecamatan yang rawan bencana tanah longsor, banjir, dan pembakaran hutan, ladang, dan sawah.

Agama yang dipeluk oleh masyarakat Kecamatan Sembakung adalah Islam, Kristen dan Katolik dengan agama Islam sebagai agama mayoritas. Kecamatan

Sembakung memiliki 11 buah masjid, 4 buah surau, dan 8 buah gereja kristen dan katolik. Di kecamatan Sembakung terdapat 5 suku/etnis dengan mayoritas suku/etnis di kecamatan ini adalah suku Dayak Tidung.

### 3. Gambaran Umum Instansi

#### a. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah pada dasarnya dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Instansi pemerintah tersebut bertugas untuk mewujudkan visi yang dibangun kabupaten melalui pelaksanaan misi yang sesuai dengan bidang masing-masing instansi pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Kabupaten Nunukan, yaitu *"Terwujudnya masyarakat Nunukan yang maju, aman, damai, adil, dan bermoral, demokratis, mandiri, sejahtera dan berdaya saing sebagai beranda terdepan NKRI"*, maka Dinas Pendidikan bertugas untuk melaksanakan salah satu misi Kabupaten Nunukan yaitu **"Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Layanan Kesehatan Masyarakat serta Layanan Dasar Sosial lainnya yang didukung dengan Pendayagunaan IPTEK"**, khususnya di bidang pendidikan.

Perwujudan visi dan misi Kabupaten Nunukan di atas diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan melalui visi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, yaitu *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Nunukan yang Bertaqwa, Berkarakter, Berkualitas, Merata dan Berkeadilan Melalui Penyelenggaraan Pendidikan"*. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendidikan dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 2) Meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan;
- 3) Membina kualitas dan relevansi pendidikan;
- 4) Meningkatkan manajemen pendidikan;
- 5) Membina dan mengembangkan generasi muda, olahraga, bahasa dan seni budaya.

#### **b. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan, maka Dinas Pendidikan memiliki tugas utama yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
- 3) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan menengah;



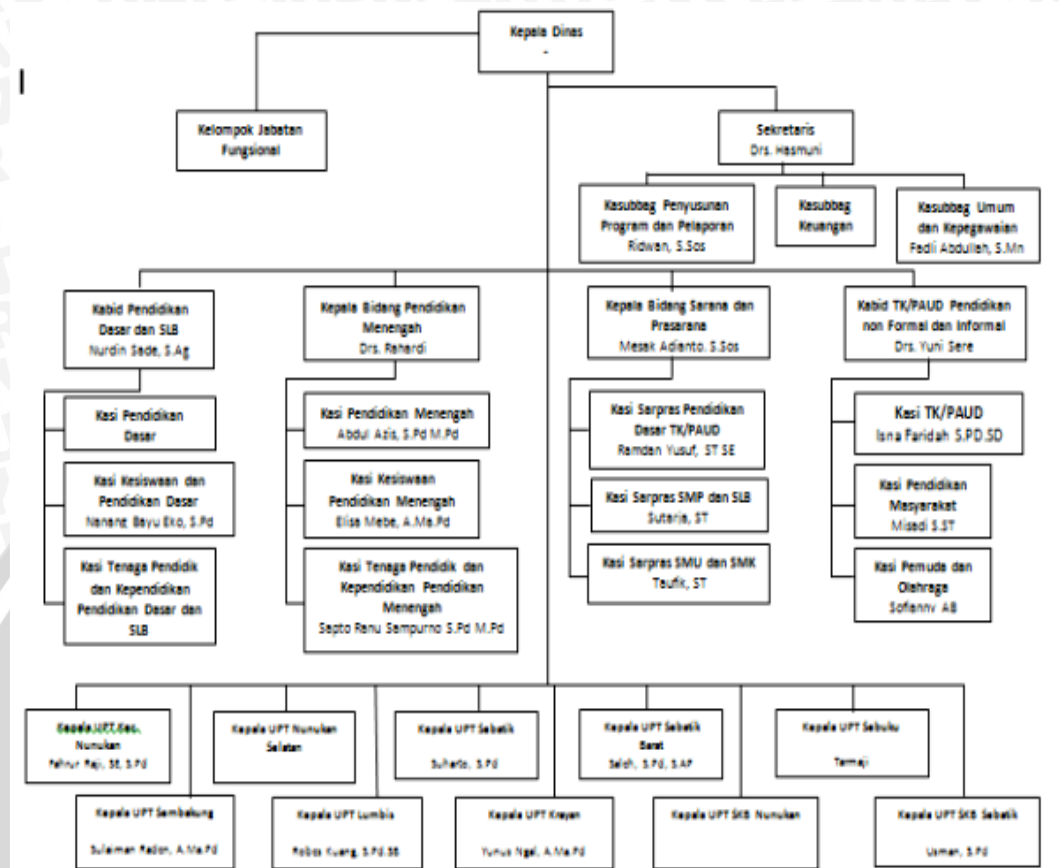
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis PLS, pemuda, dan olahraga;
- 7) Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- 8) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 9) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan antara lain terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat yang terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Bidang Pendidikan Dasar dan SLB yang terdiri dari:
  - a) Seksi Pendidikan Dasar;
  - b) Seksi Kesiswaan dan Pendidikan Dasar;
  - c) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Dasar dan SLB;
- 4) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
  - a) Seksi Pendidikan Menengah;
  - b) Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah;

- c) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Menengah;
- 5) Bidang Sarana dan Prasarana:
  - a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar TK/PAUD;
  - b) Seksi Sarana dan Prasarana SLB dan SMP;
  - c) Seksi Sarana dan Prasarana SMU dan SMK;
- 6) Bidang TK/PAUD, Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
  - a) Seksi TK/PAUD;
  - b) Seksi Pendidikan Masyarakat;
  - c) Seksi Pemuda dan Olahraga;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.





**Gambar 4.3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan**

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

## B. Penyajian Data Fokus Penelitian

### 1. Gambaran Permasalahan Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan

Pendidikan dasar merupakan salah satu pilar utama dalam pengejawantahan cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dasar merupakan instrumen dasar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Di jenjang inilah, para generasi penerus bangsa dibentuk sehingga nantinya mampu untuk memajukan bangsa Indonesia. Pembangunan di bidang pendidikan nasional sangat penting untuk dilaksanakan. Persaingan global di kancah dunia memaksa bangsa Indonesia

untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut diwujudkan melalui pembangunan pendidikan dasar.

Pembangunan pendidikan dasar tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip pemerataan. Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara yang memiliki wilayah terluas di dunia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan dasar di Indonesia. Hingga tahun 2012, tercatat tercatat 183 daerah di Indonesia masuk kategori tertinggal. Dari jumlah tersebut, 27 daerah merupakan daerah perbatasan, dan 67 daerah merupakan pulau terluar (<http://republika.co.id>).

Nunukan merupakan salah satu dari kabupaten terluar Indonesia. Seperti halnya daerah terluar lainnya, pembangunan pendidikan di daerah tersebut juga memiliki masalah yang hingga saat ini belum teratasi, salah satunya yaitu pemerataan. Berikut merupakan daftar jumlah SD dan MI Negeri/Swasta di Kabupaten Nunukan:

**Tabel 4.7. Jumlah SD Negeri/Swasta dan MI Negeri/Swasta di Kabupaten Nunukan Tahun Ajaran 2013/2014**

No	Kecamatan	Jumlah SD/MI				Jumlah
		SD Negeri	SD Swasta	MI Negeri	MI Swasta	
1	Krayan	21	-	-	-	21
2	Lumbis	10	-	-	-	10
3	Sembakung	18	-	-	-	18
4	Nunukan	14	3	-	3	20
5	Sebatik	2	-	-	1	3
6	Sebuku	10	1	-	-	11
7	Krayan Selatan	6	-	-	-	6
8	Sebatik Barat	6	2	-	-	8
9	Nunukan Selatan	5	2	-	1	8
10	Sebatik Timur	3	-	-	4	7
11	Sebatik Utara	2	-	-	1	3
12	Sebatik Tengah	6	-	-	-	6
13	Sei Menggaris	4	-	-	-	4
14	Tulin Onsoi	8	-	-	-	8
15	Lumbis Ogong	10	-	-	-	10
<b>JUMLAH</b>		<b>125</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>143</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, diolah

Permasalahan pemerataan pembangunan pendidikan di Kabupaten Nunukan tidak hanya pada masalah kuantitas saja. Kualitas pendidikan, terutama pada pendidikan dasar juga menjadi sebuah masalah yang tidak kunjung teratasi. Kabupaten Nunukan terdiri dari 15 Kecamatan. Dari seluruh kecamatan tersebut, Kecamatan Krayan Selatan menjadi Kecamatan yang pembangunan pendidikannya terlambat. Komunikasi yang sulit menjadi faktor utama penyebab dari kurang berjalannya pembangunan pendidikan di kecamatan tersebut. Salah satu staf di Bidang Pendidikan Dasar dan SLB, Bapak Ibrahim mengungkapkan:

“..kalau dari seluruh kecamatan itu yang sulit hubungannya misalnya Krayan Selatan. Krayan Selatan itu kurang informasi, transportasi, kemudian kurang sumber daya penduduknya..” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 11 Maret 2014 pukul 09.33)

Adapun berikut merupakan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan pendidikan di Kabupaten Nunukan, antara lain:

**a. Akses Pendidikan**

Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang wilayahnya berbentuk kepulauan. Tidak semua wilayah bisa ditempuh dengan hanya menggunakan jalur darat. Beberapa kecamatan harus ditempuh melalui jalur laut, sungai, bahkan udara. Misalnya saja Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung yang hanya bisa diakses melalui jalur laut dan sungai dengan menggunakan perahu atau *speedboat*. Sedangkan Kecamatan Krayan hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ibrahim selaku staf di Bagian Pendidikan Dasar

“..Kabupaten Nunukan geografisnya itu berada di daerah pulau, kemudian transportasi yang digunakan itu transportasi sungai, darat dan udara. Misalnya saja satu-satunya akses menuju Kecamatan Krayan hanya lewat udara. Sedangkan kalau mau ke Sembakung, Sebuku, Sembakung itu juga hanya bisa lewat laut dan sungai..” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 11 Maret 2014 pukul 09.33 WITA)

Kondisi yang sedemikian rupa mengakibatkan proses distribusi pembangunan pendidikan pada akhirnya akan membutuhkan *cost* yang lebih banyak. *Cost* disini bukan hanya mencakup biaya saja, tetapi juga menyangkut waktu, tenaga dan juga pikiran. Akibatnya sering kali proses distribusi tersebut menjadi terhambat. Mulai dari keterlambatan, tidak tepat sasaran bahkan tidak

tersalurkan. Misalnya saja penyaluran buku dan alat peraga menuju daerah terpencil yang sering terlambat bahkan tidak sampai di tempat. Inilah yang mengakibatkan timbulnya disparitas pembangunan pendidikan antar kecamatan di Kabupaten Nunukan.



**Gambar 4.4. Transportasi di Sungai Sembakung**

*Sumber : Dokumentasi Peneliti*

Kecamatan Sembakung merupakan kecamatan yang dilalui oleh aliran Sungai Sembakung. Hal ini yang menyebabkan Kecamatan Sembakung hanya bisa diakses melalui jalur laut dan sungai. Selain permasalahan akses, lokasi sekolah juga menjadi salah satu penghambat karena sebagian besar desa di Kecamatan Sembakung terletak di tepi kawasan hutan yang terpencil. Sebagian besar desa dihubungkan oleh Sungai Sembakung. Keadaan tersebut bukan

hanya menghambat akses transportasi saja, tetapi juga akses komunikasi dan informasi karena sebagian besar desa-desa tersebut masih belum terjangkau jaringan seluler dan telepon.

#### **b. Tenaga Pengajar**

Pembangunan pendidikan tidak akan terlepas dari peran tenaga pengajar. Hal tersebut dikarenakan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar di suatu daerah sangat mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah tersebut. Di kabupaten Nunukan, permasalahan tenaga pengajar tetap menjadi masalah krusial yang hingga saat ini belum teratasi. Salah satu masalah yang paling jelas adalah kurangnya kuantitas tenaga pengajar. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Nunukan terletak di wilayah yang sulit dijangkau atau dengan kata lain terpencil. Kondisi inilah yang mengakibatkan banyak sekali guru yang enggan ditempatkan di daerah tersebut sehingga mengakibatkan kurangnya tenaga pengajar di sekolah yang terletak di wilayah yang sulit dijangkau.

Masalah lain yang berkaitan dengan tenaga pengajar adalah kualitas tenaga pengajar yang kurang profesional. Salah satu penyebab masalah ini adalah kurangnya jumlah guru yang bersedia mengajar di daerah yang sulit dijangkau. Hal tersebut akhirnya mendasari sekolah yang terletak di daerah terpencil untuk mengeluarkan kebijakan sendiri, salah satunya dengan mengangkat guru honorer. Ironisnya, pengangkatan guru honorer tersebut seringkali tidak mempertimbangkan aspek kualitas karena guru honorer yang diangkat rata-rata hanya berijazah SMA.



Kenyataan ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ibrahim selaku staf Bagian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, yaitu sebagai berikut:

“...masalah yang dihadapi disini salah satunya yaitu kekurangan tenaga pendidikny....akibat kekurangan tenaga pengajar tersebut, beberapa sekolah akhirnya memiliki kebijakan sendiri, misalnya pengangkatan guru honorer, yang kalau saya lihat memang kurang layak untuk menjadi guru karena sebagian besar guru honorer itu masih berijazah SMA..” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 11 Maret 2014 pukul 09.33 WITA)

**Tabel 4.8. Data Guru PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan SD/MI Negeri Dan Swasta Tahun Ajaran 2013/2014**

No	Kecamatan	PNS																				
		SLTA				PGS LP/D 1		PGSLA/ D2		Sar/Mud/D3				S1				S2/S 3		Jumlah		
		Kegru		Non Kegru		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
		L	P	L	P																	
1	Krayan	39	9	0	0	7	1	14	6	1	0	0	0	37	24	5	1	0	0	103	41	144
2	Lumbis	13	8	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	15	17	0	0	0	0	34	28	62
3	Sembakung	3	4	3	0	1	0	13	6	0	0	0	0	48	13	1	0	0	0	69	23	92
4	Nunukan	6	7	1	3	0	2	19	30	0	1	0	0	49	98	2	3	0	0	77	144	221
5	Sebatik	1	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	6	7	0	0	0	0	7	12	19
6	Sebuku	1	3	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	12	8	2	0	0	0	17	15	32
7	Krayan Selatan	20	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	29	5	34
8	Sebatik Barat	3	2	0	1	0	0	7	7	0	0	0	0	8	13	0	1	0	0	18	24	42
9	Nunukan Selatan	3	3	0	0	0	0	3	11	0	0	0	0	17	23	2	1	1	0	26	38	64
10	Sebatik Timur	0	0	0	1	0	0	4	5	0	0	0	0	10	19	0	1	0	0	14	26	40
11	Sebatik Utara	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	12	0	0	0	0	7	14	21
12	Sebatik Tengah	0	2	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	10	8	0	0	0	0	13	16	29
13	Sei Menggans	0	1	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	8	6	14
14	Tulin Onsoi	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	12	5	3	0	0	0	17	9	26
15	Lumbis Ogong	1	0	0	0	3	0	2	1	0	0	0	0	22	2	0	0	0	0	28	3	31
<b>JUMLAH</b>		<b>91</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>250</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>404</b>	<b>771</b>
		<b>149</b>				<b>14</b>				<b>2</b>				<b>536</b>				<b>1</b>				

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, diolah

**Tabel 4.9. Data Guru Non PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan SD/MI Negeri Dan Swasta Tahun Ajaran 2013/2014**

No	Kecamatan	PNS															Jumlah						
		SLTA				PGS LP/D 1		PGSL A/D2		Sar/Mud/D3				S1						S2/S 3			
		Kegru		Non Kegru		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P	
1	Krayan	4	0	17	2	3	6	10	2	1	0	3	1	17	9	9	2	0	0	64	22	86	
2	Lumbis	0	0	14	22	0	0	1	1	0	0	0	0	3	7	0	1	0	0	18	31	49	
3	Sembakung	0	0	41	24	0	0	10	3	0	0	0	0	4	5	1	1	0	0	56	33	89	
4	Nunukan	2	3	10	18	0	2	3	13	1	2	0	1	19	34	6	9	0	0	41	82	123	
5	Sebatik	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	11	0	0	0	0	4	14	18	
6	Sebuku	0	0	11	10	0	0	2	6	0	1	0	0	6	9	3	1	0	0	22	27	49	
7	Krayan Selatan	0	1	8	5	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	10	11	21	
8	Sebatik Barat	1	1	10	13	0	0	3	6	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	18	23	41	
9	Nunukan Selatan	1	2	3	10	1	2	1	2	0	0	0	0	4	9	2	5	0	0	12	30	42	
10	Sebatik Timur	0	0	4	13	0	0	0	4	0	0	1	0	6	23	3	7	0	0	14	47	61	
11	Sebatik Utara	0	0	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0	4	15	0	0	0	0	9	21	30	
12	Sebatik Tengah	0	0	6	7	0	0	2	4	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	15	19	34	
13	Seri Menggaris	1	1	6	5	0	0	0	2	0	0	1	0	5	8	4	2	0	0	17	18	35	
14	Tulin Onsoi	1	1	8	11	0	0	2	1	1	1	1	2	2	6	2	1	0	0	17	23	40	
15	Lumbis Ogong	1	0	29	5	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	33	6	39	
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>9</b>	<b>173</b>	<b>152</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>83</b>	<b>154</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>407</b>	<b>757</b>	
		<b>345</b>				<b>17</b>				<b>84</b>				<b>18</b>				<b>300</b>			<b>0</b>		
		<b>JUMLAH PNS + NON PNS</b>															<b>771</b>	<b>757</b>	<b>1528</b>				

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah guru PNS jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah guru yang berstatus non PNS. Ironisnya, sebagian besar dari guru Non PNS tersebut hanya lulusan SMA, yaitu sebesar 45,57 % atau sebanyak 345 orang. Namun yang menjadi catatan disini bahwa masih ada guru PNS yang masih berkualifikasi pendidikan SMA, yaitu sebanyak 149 orang. Kondisi ini dirasa sangat memprihatinkan mengingat bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru telah diatur bahwa Guru pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI.

### c. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Nunukan selama ini dianggap masih belum cukup menunjang kegiatan pembelajaran di Kabupaten Nunukan. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut, salah satunya adalah faktor alam yang tidak mendukung. Beberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan terletak di Daerah Aliran Sungai dimana sering sekali terkena banjir. Sekolah-sekolah yang juga terletak di Daerah Aliran Sungai tersebut juga tidak dapat menghindari bencana tersebut. Banjir merupakan bencana yang rutin terjadi di Daerah Aliran Sungai. Banjir tersebut disebabkan oleh air pasang yang tinggi atau mungkin banjir kiriman dari Malaysia. Banjir yang terus-menerus terjadi tersebut pada akhirnya akan merusak baik gedung sekolah maupun sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tersebut. kenyataan ini juga sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ibrahim selaku staf Bagian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, yaitu sebagai berikut:

“..kemudian sarana dan prasarana itu kita anggap kurang ya. Kurang itu katakanlah ketersediaan buku pelajarannya. Bisa disebabkan karena daerah itu mengalami bencana alam yang berkesinambungan sehingga peralatan pendidikan dan pembelajaran itu akan rusak karena hampir satu kecamatan itu tidak ada lahan atau daerah yang tinggi karena letak daerahnya itu kan di pinggir sungai.” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 11 Maret 2014 pukul 09.33 WITA)

Faktor lain yang mengakibatkan kurang memadainya sarana dan prasarana adalah sulitnya melaksanakan distribusi sarana dan prasarana tersebut kepada sekolah. Hal tersebut terjadi mengingat sebagian besar sekolah di Kabupaten Nunukan terletak di kawasan yang aksesnya terbatas. Pada

akhirnya akses yang terbatas tersebut mengakibatkan penyaluran sarana dan prasarana menjadi terlambat.

**Tabel 4.10. Data Ruang Kelas SD/MI Negeri Dan Swasta Tahun Ajaran 2013/2014 Kabupaten Nunukan**

NO	KECAMATAN	Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi		Jumlah Ruang					
		Baik	Rusak	Perpus	Rg. Kepsek	Rg. Guru	Tempat Ibadah	UKS	WC (Guru dan Murid)
1	Krayan	55	67	13	8	18	0	6	64
2	Lumbis	33	31	8	5	7	0	3	30
3	Sembakung	44	55	11	10	13	0	4	57
4	Nunukan	127	60	16	17	18	5	13	94
5	Sebatik	12	12	3	3	3	0	2	6
6	Sebuku	33	36	6	7	10	0	6	34
7	Krayan Selatan	25	12	4	2	6	0	2	19
8	Sebatik Barat	16	38	4	19	7	0	3	24
9	Nunukan Selatan	43	13	7	8	9	1	4	26
10	Sebatik Timur	38	15	5	5	5	1	5	22
11	Sebatik Utara	15	6	3	2	3	0	1	7
12	Sebatik Tengah	22	20	5	5	3	0	3	23
13	Sei Menggaris	24	5	3	0	1	0	2	15
14	Tulin Onsoi	36	25	5	6	7	0	5	36
15	Lumbis Ogong	35	18	8	7	8	0	2	46
<b>Jumlah</b>		<b>559</b>	<b>407</b>	<b>101</b>	<b>104</b>	<b>118</b>	<b>7</b>	<b>61</b>	<b>503</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Di Kecamatan Sembakung sendiri kondisi sarana dan prasarana masih terbilang sangat kurang. Jika dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 18 SD di Kecamatan Sembakung, hanya 11 sekolah diantaranya yang memiliki ruang perpustakaan. Keadaan ini sungguh memprihatinkan karena

perpustakaan merupakan salah satu kebutuhan vital bagi sebuah sekolah selain ruang kelas. Selain dalam bentuk fisik, sarana dan prasarana dalam bentuk lain juga tidak kalah penting, seperti misalnya ketersediaan alat peraga penunjang pembelajaran. Sebuah ruang kelas tidak akan berguna dalam proses pembelajaran jika tidak ada alat peraga pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk dapat cepat menangkap pembelajaran.

**Tabel 4.11. Data Ruang Kelas SD/MI Negeri Dan Swasta Tahun Ajaran 2013/2014 Kecamatan Sembakung**

NO	Nama Sekolah	Ruang Kelas Menurut Kondisi		Jumlah Ruang					
		Baik	Rusak	Perpus	Rg. Kepsek	Rg. Guru	Tempat Ibadah	UKS	WC
1	SDN 001 Sembakung	0	6	1	0	1	0	0	3
2	SDN 002 Sembakung	3	3	1	1	0	0	0	0
3	SDN 003 Sembakung	0	6	0	0	0	0	0	2
4	SDN 004 Sembakung	3	3	1	1	1	0	1	3
5	SDN 005 Sembakung	3	3	1	1	1	0	0	4
6	SDN 006 Sembakung	3	5	1	1	1	0	1	3
7	SDN 007 Sembakung	0	6	1	0	1	0	0	6
8	SDN 008 Sembakung	6	0	0	0	1	0	0	3
9	SDN 009 Sembakung	0	6	1	1	0	0	1	3
10	SDN 010 Sembakung	3	0	0	0	1	0	0	3
11	SDN 011 Sembakung	3	3	1	0	1	0	0	5
12	SDN 012 Sembakung	3	3	1	1	1	0	0	4
13	SDN 013 Sembakung	3	3	0	1	1	0	0	3
14	SDN 014 Sembakung	3	3	0	1	1	0	0	5
15	SDN 015 Sembakung	5	1	0	1	1	0	0	4
16	SDN 016 Sembakung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SDN 017 Sembakung	6	0	1	1	1	0	0	3
18	SDN 018 Sembakung	0	4	1	0	0	0	1	3
Jumlah		44	55	11	10	13	0	4	57

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Seluruh permasalahan pendidikan dasar di atas hanya sebagian kecil dari besarnya permasalahan pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan sebagai kawasan perbatasan. Peran pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menangani

permasalahan-permasalahan di atas karena sebagai kawasan perbatasan, Kabupaten Nunukan perlu untuk mendapat perlakuan khusus. Salah satu upaya pemerintah pusat untuk membangun pendidikan dasar, khususnya di kawasan perbatasan adalah dengan dikeluarkannya Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, yang bertujuan untuk membiayai program-program yang mendukung terlaksananya program Wajib Belajar.

## **2. Perencanaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan**

### **a. Perencanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan**

Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar untuk Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ramdan Yusuf selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, yaitu sebagai berikut:

“...untuk DAK kita perencanaannya mengacu sama juknis dari pusat mbak. Jadi kita belum bisa mulai melakukan perencanaan kalau juknis dari pusat belum sampai di tangan kita.” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 08:10 WITA)

Untuk tahun anggaran 2012, Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp. 8.033.040.000.000,- (delapan triliun tiga puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah) sebagai alokasi untuk DAK Bidang Pendidikan untuk jenjang SD/SDLB. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang meliputi :

- a) Rehabilitasi ruang kelas berat beserta perabotnya, dengan proporsi sebesar 80 %; dan
- b) Pengadaan sarana peningkatan mutu dengan proporsi sebesar 20%, yang meliputi
  - 1) Pembangunan ruang perpustakaan termasuk perabotnya;
  - 2) Pengadaan peralatan pendidikan, antara lain:
    - a. Peralatan pendidikan Matematika;
    - b. Peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
    - c. Peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
    - d. Peralatan pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
    - e. Peralatan pendidikan Bahasa; dan
    - f. Peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012, penetapan alokasi DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB kepada masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah, yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai Negeri Sipil Daerah. Kabupaten Nunukan sebagai

salah satu kabupaten perbatasan yang menerima alokasi DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB mendapat alokasi sebesar Rp. 8.678.270.000,-. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Mesak Adianto selaku Kabid Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

“Kalau DAK 2012 kita terima Rp. 8.678.270.000,- ya, *mbak*. Dana segitu Cuma buat yang jenjang SD saja memang. Untuk tahun 2012 kita arahkan untuk kegiatan pengadaan alat penunjang pendidikan atau alat peraga.” (wawancara dilaksanakan via telepon pada tanggal 11 Juni 2014 Pukul 10.23 WIB).

**Tabel 4.12.**

**Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012 Kabupaten Nunukan**

NO	URAIAN/KEGIATAN	PAGU PMK	TRANSFER KE BUD	DPA 2012		
				DAK	PENDAMPING	JUMLAH
1	DAK Bidang Pendidikan Dasar (SD)	8.678.270.000	6.508.702.500	8.678.270.000	867.827.000	9.546.097.000
2	DAK Pendidikan SMP	3.901.630.000	2.926.222.500	3.901.630.000	390.163.000	4.291.793.000
<b>JUMLAH</b>		<b>12.579.900.000</b>	<b>9.434.925.000</b>	<b>12.579.900.000</b>	<b>1.257.990.000</b>	<b>13.837.890.000</b>

*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Nunukan menerima DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp. 12.579.000.000,-, namun hanya sebesar Rp.9.434.925.000,- yang diterima oleh daerah. Itu artinya terjadi pemotongan alokasi sehingga jumlah DAK yang diterima daerah tidak sama dengan pagu dari PMK. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ramdan Yusuf, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar, yaitu sebagai berikut:

“..kalau angka di PMK itu memang secara real yang ada di pusat, tapi begitu masuk ke daerah itu belum tentu sama jumlahnya, biasanya jumlahnya lebih kecil karena kan itu di *cut* sama pihak atas..” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 09:10 WITA).



Perencanaan DAK Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar tidak dapat dilepaskan dari aktor-aktor pelaksana, dalam hal ini yaitu tim teknis pelaksana. Tim teknis pelaksana ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/878/XI/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2012 Jenjang Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 dan ditetapkan pada tanggal 30 November 2012. Adapun tim teknis pelaksana tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan data pokok/data individu sekolah sebagai data dasar dalam menentukan sasaran;
- 2) Menginventarisasi seluruh sekolah yang akan diusulkan untuk mendapat bantuan keuangan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program; dan
- 4) Membuat laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program.

Menurut Bapak Ramdan Yusuf, tim teknis pelaksana DAK Bidang Pendidikan 2012 untuk Jenjang Sekolah Dasar merupakan tim yang tahun lalu juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan. Berikut merupakan pernyataan beliau:

“..Tim Teknis kita pilih dari tim yang tahun lalu juga bertanggung jawab di program ini. Karena kan kita susah kalau orang baru pelatihan dari awal lagi, nah padahal pelaksanaan kita ini juga terbatas waktunya. Jadi memang sengaja kita pilih yang sudah berpengalaman, jadi supaya lebih gampang juga..” (wawancara dilaksanakan via telepon pada tanggal 11 Juni 2014 Pukul 10.23 WIB).

**Tabel 4.13. Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan  
Jenjang SD Tahun 2012**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. Nizaruddin	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab
2	Ir. Rudi Anggiatno	Kabid Sarana dan Prasarana	Ketua
3	Ramdan Yusuf, ST. SE	Kasi. Sarpras Pendidikan Dasar	Sekretaris
4	Ibrahim	Bendahara Disdik	Bendahara
5	Fahrur Raji, SE	Ka. UPT Kec. Nunukan	Anggota
6	Supriyono, S.IP	Ka. UPT Kec. Sebatik	Anggota
7	Supriono, A.Ma, Pd	Ka. UPT Kec. Sebatik Barat	Anggota
8	Tarmaji	Ka. UPT Kec. Sebuku	Anggota
9	Sulaiman Raden, A.Ma.Pd	Ka. UPT Kec. Sembakung	Anggota
10	Roben Kuang, S.Pd. SD	Ka. UPT Kec. Lumbis	Anggota
11	Yunus Ngai	Ka. UPT Kec. Krayan	Anggota

Sumber: SK Bupati Nunukan Nomor 188.45/878/XI/2012

Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi program dan kegiatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan kepada sekolah calon penerima DAK. Dalam sosialisasi ini sekolah membuat usulan rehabilitasi ruang kelas berat dan/atau pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Untuk DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2012, sebagian besar kepala sekolah mengusulkan agar kegiatan yang dilaksanakan melalui DAK hanya pengadaan

sarana peningkatan mutu pendidikan, yaitu pengadaan peralatan pendidikan/alat peraga.

Pengusulan pengadaan alat peraga pendidikan sebagai kegiatan DAK tahun anggaran 2012 didasari pada beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa kepala sekolah merasa keberatan untuk melaksanakan DAK fisik karena merasa tidak mampu untuk mengemban tanggung jawab ganda, yaitu sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai pelaksana proyek. Pelaksanaan DAK fisik dilaksanakan secara swakelola yang sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Tujuan utama MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi (Sa'ud dan Makmun, 2009:37). Jadi, dalam kaitannya dengan DAK fisik, sekolah dituntut untuk melaksanakan sendiri proses rehabilitasi tersebut. Hal inilah yang dianggap sulit oleh kepala sekolah karena pada dasarnya mereka tidak memiliki keahlian khusus untuk mengatur pelaksanaan kegiatan DAK fisik di sekolahnya. Berikut pernyataan dari Bapak Ramdan Yusuf selaku Kasi Sarpras Pendidikan Dasar:

“..khusus kegiatan DAK 2012,dalam juknis ini sistem kegiatan fisiknya kan rehab, nah rehab mekanismenya sistem swakelola. Nah kenapa kemarin kepala sekolah itu tidak mau ambil kegiatan fisik itu masalahnya kegiatan fisik ini kan kepala sekolah tidak siap karena kondisi mereka sebagai kepala sekolah yang harus bekerja untuk kegiatan sekolah mereka dibebani tanggung jawab dalam hal ini yaitu kegiatan fisik..” (wawancara dilaksanakan di Dinas Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 09:26 WITA)

Berbeda dengan kegiatan pengadaan peralatan pendidikan. Untuk kegiatan pengadaan peralatan pendidikan, proses pengadaan dilaksanakan melalui proses pelelangan kepada pihak rekanan. Jadi, mulai dari pengadaan hingga distribusi

dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengadaan peralatan pendidikan oleh pihak ketiga membuat tanggung jawab kepala sekolah menjadi lebih ringan karena kepala sekolah hanya tinggal menunggu barang datang. Alasan lain yaitu karena seringkali anggaran untuk DAK fisik yang diberikan kepada sekolah tidak tepat penggunaannya. Hal ini dikarenakan anggaran sudah habis terlebih dahulu padahal bangunan fisik belum jadi. Berikut pernyataan dari Bapak Ramdan Yusuf selaku Kasi Sarpras Pendidikan Dasar:

“..misalnya ini contoh, sekolah diberi anggaran 200 juta ke rekeningnya, nah mereka itu buat dengan 200 juta itu pekerjaan rehab harus selesai. Tapi mekanismenya mereka tidak boleh menggunakan pihak ketiga. Mereka harus bangun kerjasama antara komite sekolah orang tua, dan lain-lain. Nah inilah mereka merasa tidak siap, karena kondisi kepala sekolah yang harus bekerja untuk kegiatan sekolah, sekaligus juga bertanggung jawab dalam kegiatan fisik. Karena merasa tidak siap, seringnya proyek jadi mangkrak tapi uangnya habis duluan..” (wawancara dilaksanakan di Dinas Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 09:26 WITA)

Berdasarkan pertimbangan di atas, akhirnya diputuskan bahwa kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk SD di Kabupaten Nunukan adalah mencakup pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan, yaitu berupa pengadaan peralatan pendidikan atau alat peraga. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

- 1) Peralatan pendidikan Matematika;
- 2) Peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam;
- 3) Peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;
- 4) Peralatan pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
- 5) Peralatan pendidikan Bahasa; dan

## 6) Peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.

Adapun alokasi dana untuk pengadaan peralatan pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.14. Alokasi Pengadaan Peralatan Pendidikan**

No	Kegiatan	Satuan	Alokasi Biaya
1	Peralatan Pendidikan Matematika	Paket	Rp. 9.795.600,00
2	Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Paket	Rp. 8.300.000,00
3	Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Paket	Rp. 6.000.000,00
4	Peralatan Pendidikan Bahasa	Paket	Rp. 10.550.000,00
5	Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	Paket	Rp. 13.800.000,00
6	Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan	Paket	Rp. 3.500.000,00

Sumber: Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011

Bapak Ramdan Yusuf selaku Kasi Sarpras Pendidikan Dasar Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa:

“kalau masalah pengalokasian kegiatan, karena ini DAK jadi kita harus sesuaikan dengan juknis yang sudah kita dapat. Karena kan memang sudah ditentukan dari sananya mbak. Kita juga tidak bisa mau nentuin besaran alokasi kegiatannya sendiri.” (wawancara dilaksanakan via telepon pada tanggal 11 Juni 2014 Pukul 10.23 WIB)

Proses perencanaan selanjutnya adalah penetapan jumlah sasaran program, yaitu Sekolah Dasar (SD). Penetapan sasaran tersebut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil pemetaan dan pendataan kebutuhan sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
- 2) Program penuntasan rehabilitasi ruang belajar SD/SDLB dengan prioritas rusak berat;
- 3) Pemenuhan sarana pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan SD;
- 4) Jumlah alokasi dana yang tersedia.

Sekolah yang menerima DAK tahun anggaran 2012 merupakan sekolah yang tahun sebelumnya tidak mendapat bantuan DAK. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ramdan Yusuf sebagai Kasi Sarpras Bidang Pendidikan Dasar, yaitu sebagai berikut:

“...jadi untuk indikator penerima DAK mekanismenya ya sekolah yang belum pernah menerima DAK. Anggap DAK 2010 suatu sekolah sudah menerima, nah untuk DAK 2011 sekolah tersebut sudah tidak bisa menerima DAK lagi. Nanti baru DAK 2012 baru bisa mendapat lagi...” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 09:26 WITA)

Selain pertimbangan di atas, penentuan Sekolah Dasar penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 juga berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan untuk SD Tahun Anggaran 2012. Berikut merupakan kriteria-kriteria tersebut:

#### **1) Kriteria Umum**

- a) Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lain;
- b) Belum memiliki sarana dan/atau prasarana pendidikan yang memadai;

- c) Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa yang mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat;
- d) Pada tahun anggaran 2012 tidak sedang menerima bantuan sejenis baik dari sumber dana pusat (APBN) maupun dari sumber dana daerah (APBD I atau APBD II)

## 2) Kriteria Khusus

- a) Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya
  - 1. Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang memiliki ruang kelas rusak berat dengan tingkat kerusakan lebih dari 45% - 65%;
  - 2. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dibangun di atas lahan milik sendiri (milik pemerintah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b) Pembangunan Ruang Perpustakaan termasuk Perabotnya
  - 1. Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang telah memiliki ruang kelas cukup dan layak tetapi belum memiliki perpustakaan dengan luas minimal 56 m<sup>2</sup> serta sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai;
  - 2. Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang perpustakaan/pusat sumber belajar seluas minimal 56 m<sup>2</sup>;
  - 3. Jika SD/SDLB tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang perpustakaan/pusat sumber belajar dapat dibangun bertingkat dengan

ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat;

c) Pengadaan Peralatan Pendidikan

1. Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang telah memiliki ruang perpustakaan dengan luas minimal 56 m<sup>2</sup> dan/atau sedang menerima bantuan pembangunan ruang perpustakaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012;
2. Belum memiliki sarana peralatan pendidikan yang memadai.

Hasil pemetaan yang telah dilakukan kemudian diusulkan kepada Bupati. Atas usulan tersebut Bupati menetapkan sekolah-sekolah penerima DAK melalui Surat Keputusan. Di Kabupaten Nunukan, penetapan sekolah penerima DAK ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/446/VI/2012 tentang Penetapan Sekolah Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2012 Tingkat Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012. Surat Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2012. Berikut merupakan daftar sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 Tingkat Sekolah Dasar.

**Tabel 4.15**

**Nama-Nama Sekolah Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2012 Tingkat Sekolah Dasar (SD)**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
1	SDN 001 Sebatik Barat	Sebatik Barat	• Pengadaan Peralatan Pendidikan
2	SDN 002 Sebatik Barat	Sebatik Barat	• Pengadaan Peralatan Pendidikan
3	SDN 004 Sebatik Barat	Sebatik Barat	• Pengadaan Peralatan Pendidikan



No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
4	SDN 005 Sebatik Barat	Sebatik Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
5	SDN 006 Sebatik Barat	Sebatik Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
6	SDN 010 Sebatik Barat	Sebatik Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
7	SD 001 Muhammadiyah	Sebatik Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> </ul>
8	SDN 001 Sebatik	Sebatik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> </ul>
9	SDN 002 Sebatik	Sebatik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> </ul>
10	SDN 003 Sebatik	Sebatik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> </ul>
11	SDN 007 Pancang Sebatik	Sebatik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> </ul>
12	SDN 008 Sebatik	Sebatik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> </ul>
13	SDN 004 Sebuku	Sebuku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> </ul>
14	SDN 008 Sebuku	Sebuku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> </ul>
15	SDN 009 Sebuku	Sebuku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> </ul>
16	SDN 010 Sebuku	Sebuku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
17	SDN 002 Sembakung	Sembakung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
18	SDN 004 Sembakung	Sembakung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
19	SDN 007 Sembakung	Sembakung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
20	SDN 015 Sembakung	Sembakung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
21	SDN 018 Sembakung	Sembakung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
22	SDN 014 Tepian	Sembakung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> </ul>
23	SDN 011 Sembakung	Sembakung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> </ul>
24	SD 018 Panas Lumbis	Lumbis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)</li> </ul>
25	SDN 002 Krayan	Krayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
26	SDN 003 Krayan	Krayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
27	SDN 004 Krayan	Krayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
28	SDN 005 Krayan	Krayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
29	SDN 006 Krayan	Krayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Ruang Perpustakaan</li> <li>• Pengadaan Meubelair</li> </ul>
30	SDN 007 Krayan	Krayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>
31	SDN 009 Krayan	Krayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Peralatan Pendidikan</li> </ul>

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
32	SDN 012 Krayan	Krayan	• Pengadaan Peralatan Pendidikan
33	SDN 013 Krayan	Krayan	• Pengadaan Peralatan Pendidikan
34	SDN 015 Krayan	Krayan	• Pengadaan Peralatan Pendidikan
35	SDN 016 Krayan	Krayan	• Pengadaan Peralatan Pendidikan
36	SDN 017 Krayan	Krayan	• Pengadaan Peralatan Pendidikan
37	SDN 019 Krayan	Krayan	• Pengadaan Peralatan Pendidikan
38	SDN 029 Krayan	Krayan	• Pengadaan Peralatan Pendidikan
39	SDN 003 Krayan Selatan	Krayan Selatan	• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)
40	SDN 006 Krayan Selatan	Krayan Selatan	• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)
41	SDN Krayan Selatan	Krayan Selatan	• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)
42	SDN 002 Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)
43	SDN 006 Nunukan	Nunukan	• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat) • Pengadaan Peralatan Pendidikan
44	SDN 007 Nunukan	Nunukan	• Pengadaan Peralatan Pendidikan
45	SDN 008 Nunukan	Nunukan	• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)
46	SDN 011 Nunukan	Nunukan	• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat) • Pengadaan Peralatan Pendidikan
47	SDN 012 Nunukan	Nunukan	• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat)
48	SDN 015 Nunukan	Nunukan	• Pembangunan Prasarana Pendidikan (Rehab Ruang Kelas Berat) • Pengadaan Peralatan Pendidikan

Sumber : SK Bupati Nunukan Nomor 188.45/446/VI/2012

Dari daftar sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Tingkat SD di atas, tidak semua sekolah menerima DAK. Hal ini dikarenakan kegiatan DAK yang dilaksanakan di tahun anggaran 2012 hanya kegiatan pengadaan peralatan pendidikan. Oleh sebab itu hanya sekolah yang menerima alokasi pengadaan peralatan pendidikan saja yang menerima DAK. Keseluruhan sekolah tersebut berjumlah 30 sekolah. Sedangkan, bagi sekolah yang kegiatannya hanya bersifat fisik tidak mendapat alokasi DAK, kecuali SDN 006 Krayan yang menerima alokasi untuk kegiatan pembangunan perpustakaan

beserta perabotannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ramdan

Yusuf sebagai berikut :

“...kalau yang di SK Bupati itu masih termasuk dengan kegiatan fisik. Karena tahun 2012 kemarin yang kita laksanakan hanya pengadaan alat peraga saja, jadi kita pilih sekolah yang dapat alat peraga dari keseluruhan daftar dari SK tersebut..” (wawancara dilaksanakan via telepon pada tanggal 11 Juni 2014 Pukul 10.23 WIB).

Berikut merupakan daftar sekolah penerima beserta perencanaan alokasi untuk masing-masing sekolah.

**Tabel 4.16. Daftar Rincian 30 Sekolah Dasar Penerima DAK 2012  
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun Anggaran 2012**

No	Nama Sekolah		Alat Peraga	Nilai	Kepala Sekolah
	Sekolah	Kecamatan			
1	SDN 001	Sebatik Barat	51.495.600,00	51.495.600,00	Nurminari, S.Pd
2	SDN 002	Sebatik Barat	51.495.600,00	51.495.600,00	Martina, A.Ma.Pd
3	SDN 003	Sebatik Barat	51.495.600,00	51.495.600,00	Zubaidi, S.Pd
4	SDN 005	Sebatik Barat	51.495.600,00	51.495.600,00	H. Nursam, S.Pd
5	SDN 006	Sebatik Barat	51.495.600,00	51.495.600,00	Darsono, A.Ma.Pd
6	SDN 010	Sebuku	51.495.600,00	51.495.600,00	Florentinus Bara Tupen
7	SDN 002	Sembakung	51.495.600,00	51.495.600,00	Abdurrahman
8	SDN 004	Sembakung	51.495.600,00	51.495.600,00	Zainal, A.Ma.Pd
9	SDN 007	Sembakung	51.495.600,00	51.495.600,00	Simon Yangasok
10	SDN 015	Sembakung	51.495.600,00	51.495.600,00	Basran, A.Ma.Pd
11	SDN 018	Sembakung	51.495.600,00	51.495.600,00	Murad
12	SDN 002	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	Marthen Yusak
13	SDN 003	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	A. Sekius Paran S, S.Pd
14	SDN 004	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	Magda Agung, A.Ma.Pd
15	SDN 005	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	Yush Hasan
16	SDN 007	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	Yonathan, A.Ma.Pd
17	SDN 009	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	Samuel Pangeran, A.Ma.Pd
18	SDN 012	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	Padan Uthami
19	SDN 013	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	Joni Udan
20	SDN 015	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	Marsoni, A.Ma.Pd
21	SDN 016	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	Yagung Bernabas, A.Ma.Pd

NO	NAMA		ALAT PERAGA	NILAI	KEPALA SEKOLAH
	SEKOLAH	KECAMATAN			
22	SDN 017	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	Ramli Agung
23	SDN 019	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	Petrus Rugu
24	SDN 020	Krayan	51.495.600,00	51.495.600,00	Mince Yunus, A.Ma.Pd
25	SDN 006	Nunukan	51.495.600,00	51.495.600,00	Abdul Wahab, A.Ma.Pd.OR
26	SDN 011	Nunukan	51.495.600,00	51.495.600,00	Laila Anggraini, S.Pd
27	SDN 015	Nunukan	51.495.600,00	51.495.600,00	Jefri Buas
28	SDN 001	Nunukan selatan	51.495.600,00	51.495.600,00	H. Mansyur, S.IP, MM
29	SDN 007	Nunukan Timur	51.495.600,00	51.495.600,00	Kamaruddin Ange, A.Ma
30	SDN 008	Sebatik	51.495.600,00	51.495.600,00	Alias, S.Pd
<b>JUMLAH</b>				1.558.368.000,00	

Sumber : Dinas Pendidikan, diolah

Dari tabel di atas, diketahui bahwa di Kecamatan Sembakung terdapat 5 Sekolah Dasar yang menerima DAK. Kelima sekolah tersebut antara lain SDN 002 Sembakung yang terletak di Desa Tagul, SDN 004 Sembakung di Desa Lubakan, dan SDN 007 Sembakung di Desa Pagar. Selain itu juga ada SDN 015 Sembakung di Desa Pelaju dan SDN 018 di Desa Labion. Kelima desa tersebut terletak di tepi hutan dan bantaran sungai. Sungai Sembakung merupakan akses penghubung di antara desa tersebut dengan ibukota Kecamatan, yaitu Desa Atap.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa realisasi DAK Bidang Pendidikan untuk Tingkat SD Tahun Anggaran 2012 adalah pengadaan peralatan pendidikan dalam bentuk alat peraga untuk mata pelajaran Matematika, IPA, IPS, Pendidikan Olahraga, Jasmani, dan Kesehatan, Bahasa, serta Seni Budaya dan Keterampilan. Adapun persyaratan dalam pengadaan alat peraga menurut Petunjuk Teknis dibagi ke dalam persyaratan umum dan persyaratan teknis, yaitu sebagai berikut:

1) Persyaratan Umum

- a) Pengadaan barang dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Setiap alat/barang yang dibeli merupakan alat/barang baru;
- c) Alat/barang yang dibeli tanpa kerusakan/cacat;
- d) Peralatan harus aman terhadap pemakai dan peralatan itu sendiri; dan
- e) Memiliki kualitas yang baik.

2) Persyaratan Khusus

- a) Mendukung konsep materi dalam kegiatan belajar mengajar;
- b) Mudah digunakan baik oleh siswa maupun guru;
- c) Sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
- d) Mendukung pencapaian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD;
- e) Pemeliharaan dan perbaikan dapat dilakukan di sekolah;
- f) Suku cadang mudah didapat;
- g) Penggunaannya aman untuk digunakan baik oleh siswa maupun guru;
- h) Peralatan terbuat dari bahan material yang bermutu;
- i) Peralatan tertentu mempunyai bentuk dan warna yang menarik;
- j) Mempunyai perbandingan bentuk yang proporsional;
- k) Peralatan yang menggunakan ukuran harus memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi;
- l) Tanda-tanda teknis peralatan harus jelas;
- m)

- n) Peralatan harus dilengkapi dengan manual/petunjuk penggunaan alat atau contoh panduan pembelajaran;
- o) Peralatan berupa kit/perangkat, setiap item dan komponen peralatan harus mempunyai tempat/tatakan masing-masing di dalam kit;
- p) Mengutamakan produk yang sudah mendapat pengesahan/rekomendasi dari lembaga/institusi yang berwenang;
- q) Pengemasan peralatan harus rapi sesuai dengan sifat dari peralatan;
- r) Memiliki masa pakai (*durability*) minimal 3 (tiga) tahun;
- s) Mengutamakan produksi dalam negeri.

Pengadaan alat peraga dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditentukan melalui sistem pelelangan oleh LPSE Kabupaten Nunukan. Pengadaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari hasil lelang tersebut kemudian ditetapkan CV. Estina Media sebagai pihak rekanan/pihak ketiga pelaksana DAK. CV Estina Media merupakan pihak ketiga, yaitu sebagai penyalur alat peraga dari produsen/pabrikasi, yaitu CV Wardhana. Berikut pernyataan Bapak Ramdan Yusuf selaku Kasi Sarpras Pendidikan Dasar:

“...khusus DAK 2012, kan tidak ada kegiatan fisik karena mekanisme swakelola tersebut. Khusus kegiatan pengadaannya yang alat peraga kita pakai pihak rekanan ini saja (CV Estina Media)..” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 09:26 WITA).

Sedangkan alokasi untuk pengadaan masing-masing alat peraga pendidikan yang ditawarkan oleh CV Estina Media adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.17. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga/RAB Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD/SDLB Kabupaten Nunukan TA. 2012**

NO	NAMA ALAT	JUMLAH SET	HARGA PER PAKET (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
I.	Alat Peraga			
<b>A.</b>	<b>Alat Peraga Pembelajaran Matematika</b>			
I.	Alat Peraga Matematika Pemula (Dasar)	2 Set	2.642.961	5.285.963
II.	Alat Peraga Matematika Pemula (Permainan)	2 Set	1.675.117	3.350.233
			<b>JUMLAH A</b>	<b>8.636.196</b>
<b>B</b>	<b>Alat Peraga Pembelajaran IPA</b>			
I.	KIT Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	2 Set	2.115.937	4.231.874
II.	KIT PBA	2 Set	925.722	1.851.445
III.	KIT Simulasi Fase Bulan	2 Set	617.148	1.234.296
			<b>JUMLAH B</b>	<b>7.317.615</b>
<b>C.</b>	<b>Alat Peraga Pembelajaran IPS</b>			
I.	KIT Gejala Alam	2 Set	912.498	1.824.995
II.	KIT Tentang Bentang Alama	2 Set	1.146.132	2.292.265
III.	Ilmu Pengetahuan Sosial	1 Set	1.172.582	1.172.582
			<b>JUMLAH C</b>	<b>5.289.842</b>
<b>D.</b>	<b>Alat Peraga Pembelajaran Bahasa</b>			
I.	KIT Bahasa Indonesia	2 Set	3.306.151	6.612.302
II.	KIT Bahasa Inggris	2 Set	1.344.501	2.589.003
			<b>JUMLAH D</b>	<b>9.301.305</b>
<b>E.</b>	<b>Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olahraga &amp; Kesehatan</b>			
I.	Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olahraga & Kesehatan	1 Paket	12.166.636	12.166.636
			<b>JUMLAH E</b>	<b>12.166.636</b>
<b>F.</b>	<b>Alat Peraga Kesenian</b>			
I.	Alat Peraga Kesenian	1 Paket	3.094.558	3.094.558
			<b>JUMLAH F</b>	<b>3.094.558</b>
			<b>JUMLAH</b>	<b>45.806.152</b>
			<b>JUMLAH (A+B+C+D+E+F) x 30 SD</b>	<b>1.374.184.545</b>
			<b>PPN10%</b>	<b>137.418.455</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.511.603.000</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing SD direncanakan akan mendapat alat peraga pendidikan yang nilainya Rp.45.806.152,- (empat puluh

lima juta delapan ratus enam ribu seratus lima puluh dua rupiah). Angka tersebut masih di bawah alokasi yang ditetapkan dalam petunjuk teknis, yaitu sebesar Rp.51.945.600,- (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah). Sehingga jumlah seluruh alokasi DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 untuk 30 SD di Kabupaten Nunukan adalah Rp. 1.511.603.000,-. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak Ramdan Yusuf selaku Kasi Sarpras Pendidikan Dasar Kabupaten Nunukan dibawah ini:

“Kita pelaksanaannya sesuai dengan kontrak yang sudah kita buat sama pihak rekanan. Mulai dari pengadaan hingga sampai distribusi kita serahkan juga ke pihak rekanan. Dalam pelaksanaannya pihak Estina Media sudah menjalankan komitmen itu walaupun memang banyak sekali hambatan-hambatannya.” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 09:26 WITA).

**b. Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan**

Realisasi alokasi dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar tahun anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp. 1.374.184,455,- dan dana pendamping sebesar Rp. 137.418.455,- yang diambil dari dana APBD Kabupaten Nunukan. Kegiatan yang dilakukan dalam realisasi DAK tersebut adalah pengadaan peralatan pendidikan berupa alat peraga untuk 30 Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Nunukan. Adapun pengadaan alat peraga tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga, yaitu CV Estina Media.



**Tabel 4.18. Realisasi Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012**

No	URAIAN/KEGIATAN	PAGU PMK	TRANSFER KE BUD	REALISASI			SALDO DAK BUD
				DAK	PENDAMPING	JUMLAH	
1	DAK Bidang Pendidikan Dasar (SD)	8.678.270.000	6.508.702.500	1.374.184.455	137.418.445	1.511.602.900	5.134.518.045
2	DAK Pendidikan (SMP)	3.901.630.000	2.926.222.500	755.873.200	275.651.032	1.031.524.232	2.170.349.300

*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, diolah*

Pelaksanaan distribusi dari kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh pihak rekanan, yaitu CV Estina Media. Hal ini sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dengan CV Estina Media selaku pihak rekanan. Dalam kontrak itu disebutkan bahwa CV Estina Media juga bertugas untuk mengantar peralatan pendidikan tersebut ke sekolah-sekolah penerima. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Ramdan Yusuf selaku Kasi Sarpras Pendidikan Dasar sebagai berikut:

“..jadi sistem mekanisme distribusi mbak, kalau di kontraknya kan kita ada asas perjanjiannya, ini sebenarnya karena mekanismenya begitu berarti si rekanan mengantar ke sekolah..” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 09:26 WITA)

Salah satu kecamatan yang juga mendapat alokasi DAK adalah Kecamatan Sembakung. Terdapat 5 (lima) Sekolah Dasar penerima DAK 2012 di kecamatan tersebut. Berikut merupakan rincian sekolah-sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan,

**Tabel 4.19. Daftar Sekolah Dasar Penerima DAK 2012 Pengadaan Sarana  
Peningkatan Mutu Pendidikan Kecamatan Sembakung**

NO	NAMA SEKOLAH			NILAI ALAT PERAGA	KEPALA SEKOLAH
	SEKOLAH	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		
1	SDN 002	SEMBAKUNG	DESA TAGUL	45.806.152	ABDURRAHMAN
2	SDN 004	SEMBAKUNG	DESA LUBAKAN	45.806.152	ZAINAL, A.Ma.Pd
3	SDN 007	SEMBAKUNG	DESA PAGAR	45.806.152	SIMON YANGASOK
4	SDN 015	SEMBAKUNG	DESA PELAJU	45.806.152	BASRAN, A.Ma.Pd
5	SDN 018	SEMBAKUNG	DESA LABION	45.806.152	MURAD

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, diolah

Dari kelima Sekolah Dasar tersebut, peneliti memilih 2 Sekolah Dasar untuk dijadikan sampel, yaitu SDN 004 Sembakung yang terletak di Desa Lubakan dan SDN 018 Sembakung yang terletak di Desa Labion. Desa Lubakan dan Desa Labion sama-sama terletak di kawasan tepi hutan dan berdiri di tepi Sungai Sembakung. Akses menuju kedua desa tersebut hanya bisa dicapai dengan menggunakan transportasi sungai, misalnya dengan *speedboat*, *dompeng* (kapal dengan mesin *diesel*), *long boat*, dan ketinting.



**Gambar 4.5. SDN 004 Sembakung**

Sumber : Dokumentasi SDN 004 Sembakung

Sekolah Dasar pertama yang menjadi situs penelitian yaitu SDN 004 Sembakung yang terletak di Kecamatan Sembakung. SDN 004 Sembakung menerima alat peraga dari CV Estina Media pada tanggal 12 November 2012. Serah terima tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang bertanggal 11 November 2012. Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa SDN 004 Sembakung telah menerima seperangkat alat peraga Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan, serta Kesenian dari pihak ketiga, yaitu CV Estina Media (Lihat Lampiran). Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal selaku Kepala Sekolah dari SDN 004 Sembakung sebagai berikut:

“..Sekolah kita memang betul menerima jatah DAK untuk tahun 2012 berupa seperangkat alat peraga penunjang pendidikan. Ada alat peraga untuk Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Penjaskes, dan Kesenian. Kita terima langsung di sekolah sekitar akhir 2012 kemarin. Tapi sayang baru setahun kita pakai sekolah kena banjir besar, jadi alat peraganya hanyut semua..” (wawancara dilaksanakan di SDN 004 Sembakung Desa Labion pada tanggal 28 Maret 2014 pukul 10.16 WITA)



**Gambar 4.6. SDN 004 Sembakung Yang Terendam Banjir**

*Sumber : Dokumentasi SDN 004 Sembakung*

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa alat peraga milik SDN 004 Sembakung hanyut terbawa banjir. Banjir besar memang terjadi di Kecamatan Sembakung pada awal tahun 2014. Seperti yang telah diliput oleh Tempo.co pada

tanggal 30 Januari 2014, banjir tersebut merupakan banjir kiriman dari hulu sungai di Sungai Pensiangan Sabah, Malaysia dan Sungai Labang maupun Sungai Sumalumung di Kecamatan Lumbis Ogong. Di Kecamatan Sembakung sendiri terdapat 3 desa yang terendam banjir, yaitu Desa Atap, Desa Tagul dan Desa Lubakan. Akibat banjir tersebut, SDN 004 Sembakung terendam hingga atap sekolah. Tingginya air mengakibatkan aset sekolah hanyut terbawa air dan aktivitas belajar-mengajar dihentikan.



**Gambar 4.7. Kegiatan Olahraga di SDN 018 Sembakung**

*Sumber : Dokumentasi SDN 018 Sembakung*

Sekolah Dasar kedua yang menjadi situs penelitian adalah SDN 018 Sembakung yang terletak di Desa Labion. Pada tanggal 12 November 2012, tercatat dalam Berita Acara bahwa Kepala Sekolah telah menerima seperangkat alat peraga, yaitu peralatan pendidikan Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Penjaskes dan Kesenian. Alat peraga diantar langsung oleh CV Estina Media kepada sekolah penerima. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Murad selaku Kepala Sekolah dari SDN 018 Sembakung, sebagai berikut:

“..kita kemarin terima seperangkat alat peraga pendidikan yang dari DAK itu. Ada untuk Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, IPA, IPS, Kesenian, dan Penjaskes. Alat langsung diantar ke sekolah, jadi kita langsung terima disini. Sampai sekarang Alhamdulillah keadaannya masih lengkap dan baik..” (wawancara dilaksanakan di SDN 018 Sembakung Pada Tanggal 26 Maret 2014 Pukul 09.23 WITA)



**Matematika**



**IPA**



**IPS (Gejala Alam)**



**IPBA**



**Bahasa**



**Kesenian**



**Penjaskes**

**Gambar 4.8. Alat Peraga DAK Bidang Pendidikan SDN 018 Sembakung**

Sumber : Dokumentasi Penulis

Berbeda dengan Desa Lubakan, Desa Labion tidak terkena dampak banjir. Itu sebabnya hingga saat ini kondisi alat peraga masih lengkap dan baik. Sayangnya tidak semua alat peraga dapat dimanfaatkan, misalnya saja alat peraga Kesenian berupa gitar akustik. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak Murad selaku Kepala Sekolah dari SDN 018 Sembakung, sebagai berikut:

“..sampai sekarang alat peraga masih lengkap dan dalam kondisi baik. Kita gunakan sebaik-baiknya walaupun memang tidak semua alat peraga bisa kita manfaatkan, misalnya saja gitar akustik. Kita tidak bisa manfaatkan karena memang tidak ada guru yang bisa memainkan alat tersebut.” (wawancara dilaksanakan di SDN 018 Sembakung Desa Labion pada tanggal 26 Maret 2014 pukul 09.23 WITA)

### **3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Perencanaan Dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Nunukan.**

#### **a. Faktor Pendukung Perencanaan dan Penggunaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Nunukan**

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Jenjang Sekolah Dasar tahun anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan dapat dilaksanakan karena adanya faktor yang mendukung pelaksanaannya. Adapun berikut merupakan faktor yang mendukung dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan,

##### *1) Bentuk perhatian dari Pemerintah Pusat*

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Pelaksanaan

DAK sendiri merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan khususnya di daerah terpencil dan kawasan perbatasan. Daerah-daerah tersebut memang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena ketertinggalan mereka.

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kawasan perbatasan di Indonesia yang mendapat alokasi DAK Bidang Pendidikan. Pengalokasian DAK Bidang Pendidikan kepada Kabupaten Nunukan merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten yang termasuk dalam kabupaten tertinggal tersebut. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak Saparuddin selaku Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan, yaitu sebagai berikut:

“...memang mbak kita bisa lihat kalau DAK ini sebenarnya niat baiknya dari Pemerintah Pusat. Makanya itu kita juga mati-matian melaksanakan, walaupun sebenarnya susah sekali kalau mau dilaksanakan di sini (Nunukan).” (waancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, pada tanggal 2 April 2014 pukul 11.44 WITA)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perhatian pemerintah pusat dalam bentuk pengalokasian DAK untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nunukan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan DAK. Oleh karena itu DAK tetap dilaksanakan walaupun pelaksanaannya sangat sulit dilakukan di Kabupaten Nunukan.

## 2) *Kebutuhan sekolah yang harus dipenuhi*

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9

(sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa banyak sekali sekolah di Kabupaten Nunukan yang terletak di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan akses transportasi yang sangat terbatas. Hal tersebut mengakibatkan sebagian besar sekolah di Kabupaten Nunukan masih tertinggal dalam hal mutu pendidikan karena kurangnya fasilitas dan peralatan penunjang pendidikan. Kebutuhan dari sekolah-sekolah tersebut yang akhirnya menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan DAK, terlepas dari segala macam kendala yang menghalangi pelaksanaan tersebut. Berikut merupakan pernyataan Bapak Ramdan Yusuf sebagai Kasi Sarpras Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan,

“...yang jadi motivasi kita buat tetap menjalankan DAK ini yang pertama karena memang ini kebutuhan dari sekolah. Karena kan memang untuk kurikulum sekarang harus didukung dengan alat peraga. Nah dengan adanya alat peraga ini nantinya akan meningkatkan kemauan belajar dan juga daya tangkap siswa.” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 08.26 WITA).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa alat peraga merupakan kebutuhan yang wajib bagi sekolah untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan kebutuhan tersebut adalah melalui pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar.

### 3) *Kesiapan sekolah dalam menerima bantuan.*

Kesiapan sekolah dasar penerima DAK juga menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah untuk melaksanakan DAK. Salah satu alasan



kesediaan sekolah menerima DAK tahun 2012 adalah karena kegiatan DAK tahun 2012 hanya berupa pengadaan peralatan pendidikan. Kegiatan pengadaan peralatan pendidikan tidak menuntut sekolah untuk mengelola anggaran layaknya di kegiatan fisik. Di kegiatan ini sekolah hanya tinggal menunggu barang diantar oleh pihak rekanan. Berikut merupakan pernyataan Bapak Murad selaku Kepala Sekolah dari SDN 018 Sembakung, sebagai berikut:

“...kalau yang tahun 2012 kan kita cuma tinggal tunggu barang saja mbak, jadinya kita juga tidak terlalu repot. Kalau misalnya DAKnya berupa kegiatan fisik seperti tahun sebelumnya itu baru agak berat mbak. Kita yang agak tidak sanggup..” wawancara dilaksanakan di SDN 018 Sembakung Pada Tanggal 26 Maret 2014 Pukul 09.23 WITA)

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa DAK dapat dilaksanakan dikarenakan pihak sekolah bersedia untuk menerima DAK tahun 2012 karena mekanismenya bagi sekolah mudah, dimana mereka hanya tinggal menunggu barang datang kemudian menandatangani berita acara. Kesediaan sekolah tersebut akhirnya memudahkan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan DAK.

#### **b. Faktor Penghambat Perencanaan dan Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Nunukan**

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan sering kali tidak berjaan dengan mulus. Banyak sekali kendala yang menghambat pelaksanaan DAK di Kabupaten ini. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten perbatasan dengan kondisi geografis yang relatif sulit. Akibatnya, hubungan antar aktor pelaksana seringkali menjadi terhambat, baik hubungan antara pusat dengan daerah maupun hubungan antara

pelaksana dengan sekolah penerima. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Mesak Adianto selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, yaitu sebagai berikut :

“..memang kondisi DAK kita ini kan tidak mulus pelaksanaannya, walaupun sebenarnya DAK ini bagus, hanya saja implementasinya di lapangan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dananya cukup besar, *cuman* ada kendala-kendala yang harus kita hadapi dalam pelaksanaan DAK.” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 07.45 WITA)

Pernyataan dari Bapak Mesak Adianto di atas mengindikasikan bahwa memang terdapat banyak kendala dalam perencanaan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan. Adapun berikut merupakan kendala-kendala yang menghambat perencanaan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar tahun anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan:

1) *Petunjuk Teknis Sering Datang Terlambat*

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan DAK di Kabupaten Nunukan adalah petunjuk teknis yang sering kali datang terlambat. Keterlambatan tersebut mengakibatkan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan menjadi terlambat. Hal ini disebabkan DAK tidak dapat dilaksanakan sebelum Petunjuk Teknis datang karena pelaksanaan DAK sendiri juga harus berpedoman pada petunjuk teknis tersebut.

Petunjuk Teknis DAK sering kali datang terlambat di Kabupaten Nunukan. Hal ini selain menghambat pelaksanaan DAK di Kabupaten Nunukan, juga mengakibatkan waktu pelaksanaan DAK di Kabupaten Nunukan menjadi semakin pendek. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Mesak Adianto

selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, yaitu sebagai berikut :

“..masalahnya memang faktor utama itu juknisnya itu lambat, sehingga pada saat orang mau melaksanakan ini sudah tidak cukup waktu, apalagi jika pekerjaannya bersifat fisik. Nah pekerjaan fisik itu kan tidak cukup dilaksanakan hanya 1 atau 2 bulan saja. Orang jadi khawatir karena ketika pelaksanaan tidak selesai nanti masuk pemeriksaan, jadi masalah lagi nanti..” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 07.45 WITA)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Ramdan Yusuf selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar yang menyatakan bahwa keterlambatan juknis merupakan hambatan utama dalam proses perencanaan DAK Bidang Pendidikan di tahun anggaran 2012 Kabupaten Nunukan. Keterlambatan juknis pula yang akhirnya melatarbelakangi mengapa di tahun 2012 realisasi DAK hanya berupa pengadaan peralatan pendidikan. Berikut petikan wawancaranya:

“..yang menghambat pertama adalah keterlambatan juknis. Akibat keterlambatan tersebut akhirnya kita lewati kegiatan fisiknya. Lalu karena keterlambatan tersebut akhirnya kita tidak bisa tiap tahun melaksanakan kegiatan fisik, karena waktunya sering tidak cukup. Akhirnya yang tiap tahun bisa kita realisasikan hanya pengadaan peralatan pendidikan saja karena mekanismenya cukup melalui pihak rekanan.” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 09.26 WITA)

Pada akhirnya keterlambatan juknis juga mengakibatkan DAK untuk tahun anggaran 2013 tidak berjalan. Saat penelitian ini dilaksanakan, petunjuk teknis untuk DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2013 masih belum sampai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Akibatnya pemerintah belum bisa memulai untuk melaksanakan kegiatan DAK tersebut tanpa ada petunjuk teknis resmi dari pusat. Pemerintah juga tidak bisa menggunakan petunjuk teknis

pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dari tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan mekanisme antara pengadaan buku dengan pelaksanaan kegiatan fisik. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Ramdan Yusuf sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar:

“...untuk DAK tahun anggaran 2013 saya masih belum mengetahui secara detail karena memang saya belum pegang juknisnya. Ini saya dapat surat untuk datang ke pertemuan di Jakarta saja sudah terlambat suratnya baru datang. Jadi saya belum bisa ambil langkah apa-apa karena waktu saya baca secara umum dari publikasi internet itu mekanismenya sudah beda. Secara gambaran umum yang saya baca, tahun 2013 tidak bisa dilaksanakan kegiatan fisiknya kalau belum dilaksanakan pengadaan buku kurikulum. Beda sama DAK tahun 2011 dan 2012, karena di tahun itu pengadaan bukunya untuk buku perpustakaan, bukan buku kurikulum.” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 08.10 WITA)

Pernyataan di atas juga didukung oleh Bapak Saparudin selaku Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan. Beliau mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan adalah standarisasi petunjuk teknis yang kaku dan petunjuk teknis yang sering datang terlambat. Keterlambatan petunjuk teknis itulah yang menurut beliau menjadikan keseluruhan proses pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan menjadi lambat. Berikut merupakan petikan wawancara dengan Bapak Saparudin selaku Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan:

“..seharusnya juknis jangan terlambat diberikan termasuk pelatihannya, karena kalau itu lambat maka semua akan jadi lambat, nah sementara proses itu juga butuh waktu. Nah kita tahu kalau mendatangkan barang ke sini itu tidak semudah mendatangkan barang seperti dari Malang ke Surabaya, kita harus diantar pakai kapal, nah kapal juga tidak sewaktu-waktu berangkat, jadi itu yang buat pelaksanaan DAK di sini jadi lambat..” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 2 April 2014 pukul 11.44 WITA)

Dari seluruh pernyataan di atas dapat diketahui bahwa faktor utama yang menghambat pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan adalah keterlambatan petunjuk teknis. Akibat dari keterlambatan tersebut, kegiatan DAK menjadi tidak dapat dilaksanakan sebelum petunjuk teknis datang karena seluruh proses pelaksanaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan distribusi mengacu pada petunjuk teknis tersebut. Pihak pemerintah daerah sendiri tidak berani jika hanya menggunakan petunjuk teknis yang berasal dari publikasi internet karena alasan legalitas. Berikut merupakan pernyataan Bapak Ramdan Yusuf berkaitan dengan hal tersebut:

“..seharusnya untuk masalah juknis harusnya kita ikut dulu pertemuan di Jakarta. Nah mengapa kita tidak pakai juknis yang dari internet karena kita maunya pakai juknis yang asli yang kita dapat dari pertemuan itu lalu kemudian kita konsultasikan dengan pejabat pusat terkait. Nah kita maunya pakai yang asli karena kan seringnya kita ada pemeriksaan, daripada ada apa-apa kita pakai yang legal. Nah legalitas itu yang kita butuhkan..” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 08.26 WITA)

## 2) *Standardisasi Petunjuk Teknis Terlalu Kaku*

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang merupakan urusan daerah. Walaupun dana ini dialokasikan untuk daerah, namun pelaksanaannya tetap saja bersifat sentralistik karena sebagian besar perencanaan diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini juga berlaku untuk Dana Alokasi Khusus untuk Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar.

Mulai dari petunjuk teknis, alokasi kegiatan hingga spesifikasi barang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah, dalam hal ini hanya bertugas untuk melaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat merupakan standarisasi pelaksanaan DAK bagi pemerintah daerah. Disinilah letak permasalahannya. bagi pemerintah daerah, standarisasi dalam petunjuk teknis masih terlalu kaku dan kurang cocok jika diterapkan di Kabupaten Nunukan. Standarisasi yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk membuat petunjuk teknis masih berdasarkan standarisasi yang hanya cocok jika diterapkan di Pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Mesak Adianto sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, yaitu sebagai berikut:

“..standarisasi yang dipakai (dalam juknis) ini kan pakai standarisasi Jawa, nah kita tidak cocok pakai standarisasi tersebut, apalagi kita juga melaksanakan di tempat-tempat yang terpencil..sementara dia sudah diatur semua, mulai dari spesifikasi kerjanya, nah itu semua diatur dari sana (pemerintah pusat)” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 07.45 WITA)

Standarisasi petunjuk teknis DAK yang kaku juga dibenarkan oleh Bapak Saparudin selaku Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan. Menurut beliau, petunjuk teknis DAK seharusnya tidak dibuat dengan standarisasi yang kaku karena tidak akan sesuai jika diterapkan di setiap daerah, khususnya kabupaten di luar Pulau Jawa. Standarisasi yang dimaksud disini bukan hanya standarisasi dalam spesifikasi kerja tetapi juga dalam hal spesifikasi barang. Berikut merupakan petikan wawancaranya:

“..memang banyak hambatan kalau kita bicara mengenai DAK, salah satunya DAK itu karena yang menentukan, termasuk juknis itu dilaksanakan oleh pihak kementerian, ada beberapa yang tidak cocok direalisasikan di daerah termasuk proses mulai dari pemberian petunjuk teknis dan diklat terhadap juknis itu, kemudian juga termasuk poin-poin kegiatan yang harus dilaksanakan dalam DAK” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 2 April 2014 pukul 10.45 WITA)

Petunjuk teknis yang kaku pada akhirnya mengakibatkan pelaksanaan DAK menjadi kurang fleksibel di Kabupaten Nunukan, terutama dalam kegiatan pengadaan alat peraga. Hal ini disebabkan karena spesifikasi barang harus didatangkan dari Pulau Jawa. Seringkali yang terjadi adalah stok barang habis atau proses pengkapalan mengalami hambatan. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Saparudin:

“...poin-poin dalam juknis itu ada beberapa yang tidak cocok dengan kondisi di daerah, contohnya mengenai RABnya. Kalau dikatakan standardisasi disamakan dengan di Jawa, maka akan susah daerah itu. Misalnya lagi, contoh kemarin di DAK, pengadaan kursi dengan merk “SITOS”, nah ini kan pada saat kita koneksikan dengan pihak rekanan, kemudian pihak rekanan memesan di Jawa, ternyata stoknya habis. Kemudian dalam hal pengiriman, jaraknya kan jauh, itu kan sangat rentan sekali, *dek*. Dalam artian begini, misalnya dari Surabaya, kemudian ini dalam musim laut gelombangnya tinggi. Nah faktor-faktor itu yang menjadi kendala bagi pelaksanaan DAK di sini.” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 2 April 2014 pukul 10.45 WITA).

### 3) *Mobilisasi yang Sulit*

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di kawasan perbatasan. Seperti halnya kabupaten lain yang terletak di kawasan perbatasan, Kabupaten Nunukan memiliki kondisi geografis yang cukup sulit. Masih banyak desa-desa di Kabupaten Nunukan yang aksesnya terbatas. Kondisi tersebut juga akhirnya menjadi kendala yang cukup berat dalam

pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan. Proses distribusi menuju sekolah-sekolah penerima yang letaknya di daerah pedalaman menjadi sulit dilaksanakan karena terbatasnya sarana transportasi menuju sekolah tersebut. Berikut pernyataan Bapak Ramdan Yusuf selaku Kasi Sarpras Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan:

“..faktor lain selain masalah juknis, ini mobilisasi kita yang susah. Karena begini, Kabupaten Nunukan terdiri dari beberapa kecamatan yang jaraknya dengan Kabupaten itu jauh karena kondisi topografi kita. Contohnya kalau kita mau ke Sebuku dan Sembakung kita harus pakai *speed*. Nah kondisi itu menjadikan proses mobilisasi dan komunikasi kita jadi susah.” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Maret 2014 pukul 08.26 WITA).

Kondisi mobilisasi yang sulit ini pada akhirnya akan berimbas pada biaya pelaksanaan. Seperti yang telah diketahui, bahwa mulai dari pelaksanaan pengayaan hingga mobilisasi DAK merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bentuk dana pendamping sebesar 10% dari alokasi DAK untuk daerah yang diambil dari APBD. Karena kondisi geografis yang sulit ini pada akhirnya dana pendamping sering kali tidak cukup untuk membiayai proses mobilisasi. Berikut pernyataan dari Bapak Saparudin sebagai Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan,

“...kita tahu ya, tidak usah yang jauh di Krayan yang harus kita capai dengan naik pesawat, katakan saja Sembakung yang kita harus naik *speed* untuk mobilisasinya. Itu kita untuk *dropping* barang di sana sudah harus *carter*. Nah ini yang menjadi kendala bagi pihak-pihak rekanan termasuk pihak diknas.” (wawancara dilaksanakan di Dinas Pendidikan pada tanggal 2 April 2014 pukul 10.45 WITA).



Kecamatan Sembakung sendiri merupakan kecamatan dengan kondisi geografis yang cukup sulit. Tidak ada akses darat menuju kecamatan tersebut, melainkan harus menempuh perjalanan dengan menggunakan *speedboat*. Sedangkan untuk proses distribusi barang tidak bisa jika menggunakan *speedboat* reguler sehingga pihak rekanan harus menggunakan sistem *carter*. Hal inilah yang seringkali menjadi kendala bagi pemerintah dan rekanan dalam hal pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan.



**Gambar 4.9. Akses Menuju Kecamatan Sembakung**

*Sumber : Dokumentasi Penulis*

Selain itu, mobilisasi yang sulit juga mengakibatkan proses sosialisasi menjadi tidak merata. Hal ini dikarenakan sulitnya melakukan komunikasi dengan sekolah-sekolah di daerah pedalaman. Komunikasi sulit dilakukan karena tidak adanya jaringan telepon di daerah-daerah pedalaman tersebut. Akibatnya informasi sosialisasi DAK seringkali tidak sampai ke sekolah-sekolah tersebut. Salah satu contoh sekolah yang tidak mendapat kabar mengenai sosialisasi tersebut adalah SDN 014 Sembakung yang terletak di

Desa Tepian. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Tohar Mustofa selaku Kepala Sekolah dari SDN 014 Sembakung,

“...untuk sosialisasi DAK tahun 2012 saya sama sekali tidak mendapat kabar maupun intruksi untuk menghadiri sosialisasi. Saya juga tidak tahu apakah memang informasinya tidak sampai kesini atau bagaimana. Karena kan memang kondisi kita seperti ini, tidak ada jaringan sama sekali. Jadi, sering memang, tidak hanya DAK, informasi tidak sampai ke kita” (wawancara dilaksanakan di SDN 014 Sembakung Desa Tepian pada tanggal 26 Maret 2014 pukul 14.33 WITA).

### C. Pembahasan

#### 1. Gambaran Permasalahan Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan

Tilaar mengungkapkan 4 (empat) asas penting terkait dengan pendidikan di daerah terpencil, tertinggal dan kawasan perbatasan. Berikut merupakan gambaran pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan, yang merupakan kawasan perbatasan dan terpencil, jika dikaitkan dengan asas pendidikan di daerah terpencil, tertinggal dan kawasan perbatasan menurut Tilaar:

##### 1) Asas Pemerataan Pembangunan.

Pendidikan, khususnya sekolah dasar di Kabupaten Nunukan masih belum menyentuh esensi pemerataan secara menyeluruh. Pemerataan pendidikan di Kabupaten Nunukan hanya dilaksanakan pada aspek kuantitas saja. Pemerataan kualitas pendidikan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Adapun penyebab kurang diperhatikannya kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan bisa berupa kurangnya akses, baik transportasi maupun komunikasi antara pemerintah kabupaten Nunukan dengan sekolah dasar, khususnya sekolah dasar yang terletak di daerah terpencil.

Kurangnya akses tersebut mengakibatkan informasi menjadi sulit untuk disebar ke seluruh daerah sehingga kebanyakan sekolah dasar di Kabupaten Nunukan menjadi tertinggal dalam hal informasi dan mutu pendidikannya.

## 2) Asas Penanggulangan Kemiskinan.

Selain aspek pemerataan, asas penanggulangan kemiskinan sangat perlu untuk diperhatikan, terutama bagi pendidikan di daerah terpencil dan kawasan perbatasan seperti Kabupaten Nunukan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa harus dibebani dengan permasalahan biaya dan lain sebagainya. Di Kabupaten Nunukan sendiri penyelenggaraan pendidikan dasar sudah dilaksanakan dengan tanpa dipungut biaya. Melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan program-program lainnya maka tujuan tersebut dapat tercapai.

## 3) Wawasan Nusantara

Penanaman nilai-nilai nasionalisme melalui wawasan nusantara sangat penting untuk dilaksanakan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar, khususnya untuk kawasan perbatasan seperti Kabupaten Nunukan. Di Kabupaten Nunukan sendiri penanaman nilai-nilai nasionalisme juga telah dilaksanakan dengan baik dengan memasukkan muatan lokal Bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan Sekolah Dasar. Selain itu, penanaman wawasan nusantara tidak hanya dilaksanakan di dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas saja. Di beberapa sekolah kegiatan Pramuka rutin diadakan setiap minggu untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong yang menjadi identitas dari Bangsa Indonesia.

#### 4) Peningkatan Martabat dan Kualitas Manusia

Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah untuk meningkatkan martabat serta kualitas sumber daya manusia. Dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di kawasan perbatasan dan daerah terpencil, perlu diperhatikan mengenai bagaimana pendidikan tersebut nantinya dapat mengangkat martabat dan kualitas manusia. Hal ini dikarenakan, kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut memang sebagian besar masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju. Kasus tersebut juga ditemukan di Kabupaten Nunukan. Inilah yang hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terpecahkan untuk pemerintah kabupaten sekaligus pemerintah pusat.

Pelaksanaan pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan masih memiliki permasalahan-permasalahan mendesak yang harus segera diatasi. Adapun berikut merupakan permasalahan-permasalahan yang selama ini menghambat pelaksanaan pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan

##### a. Akses Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan tidak akan bisa dipisahkan dari perkembangan zaman. Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan dan inovasi-inovasi baru yang terkait dengan pendidikan akan terus berjalan. Untuk itu, seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pemerintah hingga guru wajib untuk selalu memperbarui informasi mereka. Agar dapat dilaksanakan tentunya dibutuhkan jalan yang mudah untuk mengakses informasi-informasi tersebut.

Di Kabupaten Nunukan, akses untuk mendapat informasi tersebut masih sangat sulit untuk dijangkau. Akses yang dimaksud disini tidak hanya terbatas pada akses komunikasi saja, tetapi juga akses transportasi. Bagi sekolah-sekolah dasar yang terletak di daerah terpencil, usaha untuk mendapatkan informasi tersebut sangat sulit untuk dilakukan karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Kondisi tersebut yang kemudian mengakibatkan informasi sering tidak sampai ke sekolah dasar. Misalnya saja ketika sekolah yang terletak di Kecamatan Krayan diminta untuk menghadiri sosialisasi mengenai dana BOS yang diselenggarakan di Kabupaten, dimana hal tersebut tentu saja sangat memberatkan bagi kepala sekolah karena mahalnnya akses transportasi menuju kabupaten.

Selain itu akses yang terbatas di Kabupaten Nunukan juga mengakibatkan pemerataan pembangunan pendidikan menjadi tidak tercapai. Salah satu contoh dari kasus tersebut adalah tidak meratanya pembagian alat peraga yang mana kegiatan tersebut dibiayai oleh DAK Bidang Pendidikan. Akibat akses yang sulit, akhirnya pembagian alat peraga tidak dilaksanakan secara merata di seluruh kecamatan. Hal tersebut dikarenakan biaya *carter* transportasi yang tinggi sehingga mengakibatkan pihak rekanan menjadi keberatan.

#### **b. Tenaga Pengajar**

Menurut Tilaar (2008:112), terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga pengajar sekolah, diantaranya yaitu:

Pengadaan dan penempatan guru, dilakukan dengan menerapkan sistem insentif, misalnya dengan:

- 1) Rotasi tugas dalam Kabupaten sesudah mengabdikan selama 3 tahun;
- 2) Kenaikan pangkat istimewa setelah mengabdikan selama 5 tahun di tempat yang sama atau di daerah terpencil lainnya;
- 3) Memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi bagi yang menunjukkan prestasi yang inovatif;
- 4) Memberikan karya-siswa di dalam maupun di luar negeri bagi yang berprestasi;
- 5) Menyediakan perumahan yang layak di tempat tugas.

Beberapa cara di atas memang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka meningkatkan minat bagi tenaga pengajar agar mau ditempatkan di daerah terpencil. Pemberian beasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah salah satu upaya yang dipilih Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan kualitas bagi guru daerah terpencil. Selain itu pemberian perumahan yang layak juga menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Nunukan bagi guru yang mau mengajar di daerah terpencil.

Memang, jika dilihat dari segi kualitas, guru Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan termasuk tertinggal dalam hal kualitas jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju. Jumlah guru berstatus PNS di tahun ajaran 2013/2014 yang masih memegang ijazah SMA sebagai ijazah terakhir masih mencapai 149 orang. Sedangkan untuk guru yang berstatus non PNS untuk tahun ajaran 2013/2014, sebesar 45,57 % atau sebanyak 345 orang masih berstatus sebagai lulusan SMA. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang menyatakan bahwa guru pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat harus

memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI.

### c. Sarana dan Prasarana

Dalam peningkatan mutu pendidikan suatu sekolah, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang mampu menunjang proses tersebut. Melalui sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat membantu siswa untuk dapat menyerap pembelajaran dengan lebih cepat. Selain dengan sarana dan prasarana yang memadai, kegiatan belajar dan mengajar akan dapat dilaksanakan dengan nyaman. Namun di Kabupaten Nunukan, tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Masih terdapat sekolah yang belum memiliki perpustakaan, laboratorium IPA dan ruang komputer. Bahkan ada juga sekolah yang belum memiliki fasilitas penunjang lain, seperti kamar mandi.

Masalah sarana dan prasarana memang hingga kini belum bisa diatasi sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Akses yang sulit dijangkau sekali lagi menjadi alasan utama mengapa pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nunukan belum terwujud. Proses distribusi yang lama dan mahal menjadi batu penghalang yang sangat besar bagi pemerintah. Mulai dari distribusi bahan bangunan, hingga distribusi alat peraga menjadi sulit untuk dilakukan. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan pemerintah daerah tidak bisa melakukan pembangunan pendidikan dengan merata secara bersamaan.

Berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Nunukan di atas tentu saja tidak akan bisa diatasi dengan kemampuan pemerintah daerah saja. Peran pemerintah pusat juga sangat dibutuhkan. Sebagai daerah khusus, perlakuan pemerintah pusat kepada pembangunan pendidikan di Kabupaten Nunukan seharusnya diterapkan secara berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Kondisi geografi yang sulit dan sulitnya komunikasi di Kabupaten Nunukan seharusnya menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah pusat ketika mengeluarkan program ataupun bantuan bagi daerah, seperti misalnya dalam hal alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan.

## **2. Perencanaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dasar jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan**

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu prinsip pemerataan mutlak diperlukan agar generasi muda di seluruh Indonesia dapat mengenyam bangku sekolah. Seluruh daerah di Indonesia, khususnya daerah terpencil dan kawasan perbatasan tanpa terkecuali harus mendapatkan akses yang sama rata dalam hal pendidikan. Pemerataan yang dimaksud bukan hanya mencakup bagaimana agar anak-anak di Indonesia dapat duduk di bangku sekolah saja, tetapi juga mencakup kualitas pendidikan yang mereka dapatkan selama mereka mengenyam



pendidikan hingga mereka dapat menerapkan kembali dalam hidup bermasyarakat.

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya untuk kabupaten tertinggal dan atau kabupaten yang terletak di kawasan perbatasan. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) yang dialokasikan kepada daerah. Melalui DAK Bidang Pendidikan ini, diharapkan agar tujuan pemerataan program pendidikan, khususnya pendidikan 9 (sembilan) tahun di Indonesia dapat tercapai.

Salah satu kabupaten yang juga menerima alokasi DAK di Bidang Pendidikan adalah Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 disebutkan kriteria khusus daerah penerima DAK adalah Kabupaten/Kota yang meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai salah satu kabupaten terdepan di Indonesia, Kabupaten Nunukan juga mendapat alokasi DAK, salah satunya di bidang pendidikan.

**a. Perencanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan**

Perencanaan merupakan prinsip utama dalam sebuah manajemen publik. hal ini sesuai dengan teori manajemen publik yang diungkapkan oleh George R. Terry dalam Darmadi dan Sukidin (2009:247) yang mengungkapkan bahwa manajemen memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. *Planning* (perencanaan), yaitu merupakan dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang mnjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- b. *Organizing* (pengorganisasian), yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c. *Actuating* (penggerakan), yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bia mencapai tujuan.
- d. *Controlling* (pengawasan), yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi

penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Dalam teori di atas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan, perencanaan merupakan salah satu prinsip yang tidak bisa dipisahkan. Perencanaan dalam DAK akan menjadi dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dicapai untuk mencapai tujuan dari DAK Bidang Pendidikan, yaitu pemberantasan angka buta huruf di Indonesia melalui pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Namun ternyata dalam perencanaan DAK Bidang Pendidikan ini masih belum diperhitungkan secara matang mengenai apa saja yang nantinya menjadi kendala dalam pelaksanaan. Perhitungan secara matang sangat diperlukan mengingat bahwa NKRI merupakan negara kesatuan dengan luas wilayah yang sangat besar, sehingga perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan secara matang agar prinsip pemerataan dapat tercapai dan masing-masing daerah dapat melaksanakan sesuai dengan kemampuan dan karakter daerah masing-masing.

Perencanaan menurut Tjokroamidjojo dalam Sa'ud dan Makmun (2009:4) diartikan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan DAK Bidang Pendidikan untuk Jenjang Sekolah di Kabupaten Nunukan dilaksanakan dengan cara mempersiapkan kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan-kegiatan yang harus dipersiapkan tersebut sudah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah pusat dalam Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah

adalah untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah akan fasilitas pendukung dan peralatan pendidikan agar kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan lancar.

Soenarya (2000:32) membagi teori perencanaan ke dalam 4 pandangan utama, yaitu teori perencanaan menurut sudut pandang penganut filsafat sintesis, penganut rasionalisme, penganut pengembangan organisasi dan penganut empirisme. Perencanaan dalam pandangan penganut filsafat sintesis menurut Mannheim dalam Soenarya (2000:33) dipandang sebagai suatu 'Cara Berpikir, sedangkan Dahl dan Lindblom dalam Soenarya (2000:33) memandang perencanaan sebagai suatu 'Proses Pengambilan Keputusan'. Etzioni seperti yang dikutip oleh Soenarya (2000:33) mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses Bimbingan Sosial (*Societal Guidelines*), yaitu suatu proses dimana kontrol sosial dan konsensus harus diarahkan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara pengawasan yang ketat dengan konsensus yang lemah.

Dalam pandangan penganut rasionalisme, perencanaan merupakan suatu bentuk pengambilan keputusan, suatu proses yang mengikuti langkah-langkah prosedural dalam rangka pengambilan keputusan (Soenarya, 2000:33). Pandangan tersebut mendapat tantangan dari para penganut *Policy Analysis* dan para penganut Teori Umum Sistem yang mengatakan bahwa para penganut rasionalisme mengabaikan realitas sosial dan aspek kemanusiaan dalam proses perencanaan. Pandangan ketiga yaitu pandangan penganut pengembangan organisasi (*Organizational Development*). Salah seorang penganut, Bennis seperti yang dikutip oleh Soenarya (2000:33) mengungkapkan bahwa pengembangan

organisasi dapat dipandang sebagai salah satu metode perencanaan dimana perubahan dan pengembangan organisasi akan berpengaruh terhadap perubahan eksternal suatu sistem.

Pandangan yang terakhir yaitu penganut empirisme (*The Tradition of Empiricism*). Menurut Fredman dan Hudson dalam Soenarya (3000:34) menyebutkan dua aliran yang terdapat dalam teori perencanaan, yaitu *aliran pertama* yang memusatkan perhatiannya pada aspek politik dan realitas fungsi ekonomi pada skala nasional. *Aliran kedua*, perhatiannya difokuskan kepada berbagai studi mengenai politik pembangunan perkotaan.

Jika ditinjau dari teori perencanaan tersebut, perencanaan DAK Bidang Pendidikan untuk Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan termasuk ke dalam pandangan penganut rasionalisme. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai prosedur yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan DAK. Langkah-langkah prosedural yang dimaksud disini adalah petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Namun peran pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan mengenai DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan sangat terbatas. Hal ini disebabkan sebagian besar keputusan yang sifatnya krusial, misalnya penentuan besaran alokasi DAK dan jenis kegiatan sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya berwenang mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal pelaksanaan di lapangan, misalnya penentuan sekolah

penerima dan penentuan rekanan dalam hal pengadaan peralatan pendidikan/alat peraga. Secara umum memang pemerintah daerah Kabupaten Nunukan tidak memiliki ruang untuk mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan daerahnya yang akan dibiayai DAK Bidang Pendidikan kepada Pemerintah Pusat.

Sedangkan dalam teori perencanaan pendidikan, Sa'ud dan Makmun membagi teori perencanaan pendidikan ke dalam 3 (tiga) pendekatan, antara lain:

1) Pendekatan Kebutuhan Sosial.

Pendekatan ini menitikberatkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan terutama bagi negara-negara berkembang yang kemerdekaannya baru saja diperoleh. Pendekatan ini lebih menekankan aspek pemerataan kesempatan atau kuantitatif dibandingkan dengan aspek kualitatif. Oleh karena itu prioritas utama dalam pendekatan ini adalah pendidikan dasar. Sedangkan target yang harus dicapai adalah pembebasan dari tuna aksara (*free from illiteracy*).

2) Pendekatan Kebutuhan Ketenagakerjaan

Guruge dalam Sa'ud dan Makmun (2009:239) mendefinisikan pendekatan ini sebagai "*Gearing on educational efforts to the fulfillment of national manpower requirement.*" (Pengarahan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja). Pendekatan ini mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan. Prioritas utama pada pendekatan ini adalah pada pendidikan kejuruan dan teknologi baik pada tingkat sekolah menengah maupun universitas.

### 3) Pendekatan Efisiensi Biaya

Pendekatan ini bersifat ekonomi dan berpangkal pada *Investment in Human Capital* atau investasi pada sumber daya manusia. Pendekatan ini memiliki implikasi sesuai dengan prinsip ekonomi. Karena pendekatan efisiensi biaya memiliki keterkaitan dengan pendekatan ketenagaan, maka pendekatan ini berprioritas pada progra pendidikan kejuruan dan teknologi yang lulusnya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bekerja.

Berdasarkan pendekatan di atas, maka perencanaan DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar termasuk ke dalam pendekatan kebutuhan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar itu sendiri. Adapun tujuannya adalah untuk membiayai kegiatan yang menunjang program pengentasan buta huruf di Indonesia, yaitu program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Target pengentasan buta huruf harus dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas.

Menurut Sa'ud dan Makmun (2009:18), jika dilihat dari tinjauan tataran dan cakupannya, perencanaan pendidikan ada yang bersifat nasional, yaitu perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh usaha pendidikan untuk mencerdaskan atau membangun bangsa termasuk seluruh jenjang, jenis, dan isinya. Ada pula perencanaan pendidikan yang bersifat regional, yaitu perencanaan pada tingkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang mencakup seluruh jenis dan jenjang untuk daerah dan provinsi tersebut. Sedangkan perencanaan pendidikan yang bersifat kelembagaan yaitu perencanaan

pendidikan yang mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu saja, misalnya perencanaan sekolah, perencanaan universitas, pusdiklat, dan lain-lain.

Berdasarkan teori di atas dapat dilihat bahwa perencanaan DAK Bidang Pendidikan merupakan perencanaan pendidikan pada tingkat nasional. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar mekanisme perencanaan dari DAK Bidang Pendidikan ditentukan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Namun selain tingkat nasional, juga terdapat perencanaan pendidikan tingkat regional di dalam perencanaan DAK Bidang Pendidikan ini. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya kegiatan perencanaan tim teknis, pemetaan sekolah penerima, pengadaan, hingga perencanaan distribusi oleh pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

Adapun berikut merupakan rincian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan:

**Sosialisasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada daerah.** Dalam kegiatan ini disosialisasikan mengenai alokasi kegiatan DAK bidang pendidikan untuk masing-masing daerah. Untuk tahun anggaran 2012 Kabupaten Nunukan menerima alokasi DAK untuk jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp.8.678.270.000,-. Selain itu dalam kegiatan ini juga disosialisasikan mengenai spesifikasi kerja dan mekanisme pelaksanaan DAK di daerah. Penentuan alokasi untuk DAK secara umum memang ditentukan oleh pemerintah pusat. Besaran alokasi untuk masing-masing daerah juga ditentukan secara langsung oleh pemerintah pusat. Akan tetapi



penentuan alokasi tersebut masih dirasa belum bisa disesuaikan dengan seluruh daerah di Indonesia, khususnya alokasi untuk kegiatan fisik. Beberapa daerah khusus, misalnya daerah terpencil dan kawasan perbatasan tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah yang mudah dijangkau misalnya daerah-daerah di Pulau Jawa.

Salah satu dimensi perencanaan pendidikan menurut Sa'ud dan Makmun (2009:55) yaitu dimensi *Relevance*, yaitu konsep relevan mutlak diperlukan bagi implementasi rencana pendidikan. Konsep relevan sendiri masih dirasa sangat kurang bila dikaitkan dengan perencanaan DAK Bidang Pendidikan khususnya dalam hal penentuan besaran alokasi DAK Pendidikan untuk Jenjang Sekolah Dasar. Misalnya saja untuk kegiatan fisik, yang mana estimasi harga bahan bangunan di Kalimantan berbeda dengan harga bahan bangunan di Pulau Jawa. Pertimbangan-pertimbangan di atas sangat perlu untuk dilakukan agar pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan dapat terlaksana dengan baik bukan hanya di beberapa daerah saja, melainkan terlaksana dengan baik di seluruh daerah di Indonesia.

Masalah lain yang selalu muncul terkait dengan sosialisasi pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah informasi yang sering terlambat sampai ke pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Informasi yang dimaksud disini misalnya informasi mengenai pelaksanaan sosialisasi atau informasi mengenai petunjuk teknis. Akibatnya pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan menjadi terlambat dan tidak terlaksana secara menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan tenggat waktu

yang tersisa tidak cukup jika digunakan untuk melaksanakan kedua kegiatan fisik dan pengadaan alat peraga sekaligus, sehingga akhirnya diputuskan kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 di Kabupaten Nunukan hanya pengadaan peralatan pendidikan berupa alat peraga pembelajaran. Keterlambatan teknis juga yang mengakibatkan DAK Bidang Pendidikan untuk tahun anggaran 2013 belum bisa dilaksanakan walaupun sebenarnya dana dari Pemerintah Pusat sudah turun ke Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

**Penentuan Tim Teknis Pelaksana DAK.** Tim teknis pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan pemetaan sekolah-sekolah penerima DAK, memantau dan mengawasi pelaksanaan DAK, serta menyusun laporan pertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Tim teknis pelaksana DAK Bidang Pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar Tahun 2012 di Kabupaten Nunukan ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Nunukan 188.45/878/XI/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2012 Jenjang Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Menurut Sa'ud dan Makmun (2009:189), bahwa dalam mengorganisasikan unit-unit operasional, perencana pendidikan harus memiliki keterampilan metodologis, berupaya menjangkau seluruh kepentingan pendidikan dengan kriteria yang objektif dan rasional. Peran tim teknis pelaksana DAK Bidang Pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan sendiri hanya bertugas melakukan pemetaan sekaligus sosialisasi DAK bagi sekolah-sekolah calon penerima DAK di Kabupaten Nunukan. Hal ini dikarenakan kegiatan DAK

di Kabupaten Nunukan untuk tahun anggaran 2012 hanya berupa pengadaan alat peraga, yang mana pengadaannya dilaksanakan oleh pihak rekanan, dalam hal ini yaitu CV Estina Media.

**Sosialisasi Program.** Dalam kegiatan ini sekolah membuat usulan mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan melalui DAK Bidang Pendidikan tersebut. Setelah usulan diterima dan dipertimbangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, akhirnya diputuskan bahwa kegiatan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan adalah pengadaan peralatan pendidikan. Penentuan kegiatan ini didasarkan pada alasan bahwa pihak sekolah tidak mau direpotkan lagi dengan tanggung jawab sebagai pelaksana proyek yang bersifat fisik. Seperti yang telah diketahui bahwa untuk kegiatan DAK fisik, pelaksanaannya menggunakan sistem Manajemen Berbasis Sekolah dimana seluruh proses pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pihak sekolah. hal tersebut yang kemudian akhirnya menjadikan beban bagi kepala sekolah menjadi bertambah. Sedangkan jika kegiatan DAK hanya diarahkan untuk kegiatan pengadaan alat peraga, prosesnya bisa diserahkan kepada pihak rekanan, sehingga sekolah hanya tinggal menunggu barang datang.

Alasan lain yang membuat sekolah enggan untuk melaksanakan kegiatan fisik adalah mengenai masalah pertanggungjawaban anggaran. Masalah seperti ini sering terjadi di Kabupaten Nunukan. Misalnya saja, suatu sekolah menerima anggaran DAK untuk kegiatan fisik dari Dinas Pendidikan Kabupaten, sering kali anggaran tersebut tidak terpakai untuk kegiatan DAK dan bahkan berkurang karena digunakan untuk kegiatan lain. Hal seperti ini yang kemudian memicu

permasalahan ketika dilaksanakan pemeriksaan sehingga banyak sekolah yang kemudian enggan untuk melaksanakan kegiatan DAK fisik dan lebih memilih untuk menerima alat peraga melalui kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dari DAK. Selain itu, terlambatnya pelaksanaan DAK di tingkat kabupaten juga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan fisik untuk DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 di Kabupaten Nunukan menjadi sulit untuk dilakukan.

Namun sosialisasi program DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan sendiri masih belum dilaksanakan secara merata. Terbukti bahwa masih ada sekolah dasar yang merasa tidak mendapat informasi mengenai pelaksanaan sosialisasi program DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar tahun 2012. Terhambatnya proses informasi tersebut dapat diakibatkan dari proses mobilisasi yang sulit karena terbatasnya jaringan komunikasi antar daerah di Kabupaten Nunukan, khususnya di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Nunukan.

**Penetapan Sasaran Program.** Dalam kegiatan ini dilakukan pemetaan dan pendataan kebutuhan sekolah yang kemudian diusulkan kepada Bupati. Berdasarkan usulan tersebut Bupati kemudian menetapkan sekolah-sekolah penerima DAK melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/446/VI/2012 tentang Penetapan Sekolah Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2012 Tingkat Sekolah Dasar. Secara umum perencanaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 dalam hal penentuan sekolah penerima alokasi DAK berupa pengadaan alat peraga di Kabupaten Nunukan memang masih belum merata. Dari 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, hanya 7 (tujuh) diantaranya yang sekolahnya menerima

alokasi DAK, yaitu berupa alat peraga. Adapun kecamatan yang memperoleh alokasi DAK tersebut antara lain kecamatan Krayan, Sembakung, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebuku, Sebatik, dan Sebatik Barat. Sedangkan 8 (delapan) kecamatan yang tidak menerima alokasi DAK berupa pengadaan alat peraga, antara lain kecamatan Krayan Selatan, Lumbis, Lumbis Ogong, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Timur, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara.

Penentuan sekolah penerima DAK yang tidak merata tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satu dari alasan ketidakmerataan tersebut adalah akses menuju kecamatan tersebut yang sulit untuk dijangkau. Misalnya saja untuk Kecamatan Krayan Selatan. Akses menuju kecamatan tersebut hanya bisa melalui jalur udara dimana mekanisme distribusi dari alat peraga harus melalui sistem *carter* pesawat yang tentu saja memakan biaya yang sangat besar. Hal tersebut yang terkadang membuat pihak rekanan merasa keberatan untuk mendistribusikan barang ke daerah tersebut karena alasan efisiensi biaya.

**Pengadaan Alat Peraga.** Kegiatan ini mencakup kegiatan lelang bagi pihak rekanan yang akan melaksanakan pengadaan alat peraga bagi Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan. Lelang dilaksanakan oleh LPSE Kabupaten Nunukan yang kemudian dimenangkan oleh CV Estna Media. Adapun alat peraga yang didatangkan terdiri dari alat peraga pembelajaran Matematika, IPA, IPS, Bahasa, penjaskes, dan Kesenian. Pengadaan alat peraga dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak rekanan, termasuk hingga ke proses distribusi ke sekolah. Mekanisme tersebut tentu saja memudahkan sekolah penerima DAK karena tidak perlu disibukkan dengan urusan DAK.

**b. Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan**

Sa'ud dan Makmun (2009:20) berpendapat bahwa perencanaan pada umumnya berorientasi pada suatu sistem, artinya bagaimana suatu perencanaan pendidikan mampu memberikan solusi pemecahan masalah dan bertindak sebagai jembatan bagi berbagai perbedaan yang ada. Sa'ud dan Makmun (2009:72) juga membagi peranan perencanaan pendidikan menjadi sebagai berikut:

1) Peranan Nilai Dalam Perencanaan Pendidikan

Dalam peranan ini, perencana pendidikan dituntut untuk mengetahui dan memberikan perhatian besar terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sekaligus mengetahui bagaimana pengaruh nilai-nilai tersebut secara ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat. Dalam perencanaan DAK Bidang Pendidikan, perhatian terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat kurang menjadi prioritas. Hal ini disebabkan karena perencanaan DAK sendiri dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang tercantum dalam petunjuk teknis DAK Bidang Pendidikan untuk Jenjang Sekolah Dasar tahun 2012. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menjadi kurang memiliki ruang untuk menyesuaikan perencanaan tersebut dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Nunukan.

Seperti yang telah diketahui bahwa kegiatan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 di Kabupaten Nunukan adalah berupa pengadaan peralatan pendidikan berupa alat peraga pembelajaran untuk mata

pelajaran Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Penjaskes, dan Kesenian. Masing-masing alat peraga tidak disesuaikan dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh masyarakat sekitar. Misalnya saja untuk alat peraga mata pelajaran Kesenian, dimana menurut petunjuk teknis alat yang didatangkan adalah gitar akustik. Penggunaan gitar akustik sebagai alat peraga dirasa kurang tepat, karena selain terbatasnya pengajar yang bisa memainkan alat tersebut, gitar akustik kurang menonjolkan ciri khas dan nilai dari masyarakat Kabupaten Nunukan. Inilah yang kemudian membuat ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan usulan bagi pemerintah pusat mengenai DAK sangat dibutuhkan sehingga pengadaan alat peraga dapat disesuaikan dengan nilai-nilai yang diterapkan di masing-masing daerah.

## 2) Peran Perencanaan Pendidikan

Menurut Sa'ud dan Makmun (2009:73), perencanaan pendidikan harus menjadi pengikat antara aktivitas pendidikan dan aktivitas masyarakat yang lebih luas. Selain itu, perencanaan pendidikan yang baik adalah perencanaan pendidikan yang mampu bekerja secara lebih dekat dengan program-program perencanaan layanan insani lainnya, seperti misalnya program-program perpustakaan, sarana rekreasi, museum, media massa, dan lain sebagainya. Perencanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 di Kabupaten Nunukan masih dirasa belum bisa bekerja secara lebih dekat dengan program-program masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan kegiatan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 di Kabupaten Nunukan hanya berupa pengadaan peralatan pendidikan berupa alat peraga pembelajaran. Spesifikasi

barang atau alat peraga sudah ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga sulit jika dilaksanakan secara lebih dekat dengan kegiatan masyarakat lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa disebutkan mengenai asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun anggaran 2012. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a) **Efisien**, dimana berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 di Kabupaten Nunukan dilaksanakan dengan cukup efisien. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 di Kabupaten Nunukan adalah berupa pengadaan alat peraga pembelajaran dimana pelaksanaannya dilaksanakan oleh pihak rekanan, mulai dari pengadaan barang hingga distribusinya kepada sekolah penerima. Selain itu, dengan dipilihnya pengadaan alat peraga sebagai kegiatan yang dibiayai oleh DAK Kabupaten Nunukan, maka dapat menghemat waktu yang mana sudah cukup terlambat akibat kedatangan petunjuk teknis yang lambat.

Namun efisiensi biaya akan sulit untuk tercapai jika diterapkan di Kabupaten Nunukan. Hal ini dikarenakan kondisi topografi Kabupaten Nunukan yang sebagian besar daerahnya memiliki akses yang sulit



dijangkau. Kecamatan Sembakung merupakan salah satu kecamatan yang sulit dijangkau dimana satu-satunya akses adalah melalui jalur sungai. Biaya transportasi yang kemudian mengakibatkan efisiensi biaya untuk pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan menjadi sulit untuk diwujudkan.

- b) **Efektif**, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebenar-benarnya. Pengadaan alat peraga sebagai kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Pendidikan merupakan pilihan yang efektif untuk sekolah-sekolah penerima. Hal ini dikarenakan alat peraga sangat membantu Sekolah Dasar, terutama sekolah dasar yang letaknya terpencil, seperti misalnya di Kecamatan Sembakung, dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi siswa. SDN 004 Sembakung dan SDN 018 Sembakung hanya sebagian dari bukti ketertinggalan mutu pendidikan di Kabupaten Nunukan, khususnya di Kecamatan Sembakung. Oleh sebab itu, dengan dipilihnya mereka sebagai sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan untuk Jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 akan sangat membantu dalam hal peningkatan kualitas dan mutu pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut.
- c) **Terbuka dan Bersaing**, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur jelas dan transparan. Pemilihan pihak rekanan yang akan

melaksanakan pengadaan alat peraga pembelajaran di Kabupaten Nunukan dilaksanakan terbuka melalui lelang yang dilaksanakan oleh LPSE Kabupaten Nunukan. Akhirnya yang terpilih sebagai pihak rekanan dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar tahun anggaran 2012 di Kabupaten Nunukan adalah CV Estina Media.

- d) **Transparan**, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK bidang Pendidikan Dasar. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, transparansi penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 di Kabupaten Nunukan masih sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya laporan perkembangan maupun pelaksanaan DAK di media informasi untuk masyarakat, misalnya dalam *website* resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.
- e) **Akuntabel**, pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dalam hal pengadaan alat peraga yang dibiayai DAK tahun 2012 kepada Kabupaten tidak dilakukan oleh pihak sekolah, melainkan oleh pihak rekanan melalui berita acara yang menandakan bahwa Sekolah Dasar penerima telah menerima alat peraga tersebut. selanjutnya kemudian pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dilakukan oleh tim teknis pelaksana DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 Kabupaten Nunukan. Pengawasan pelaksanaan DAK di Kabupaten Nunukan sendiri dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan.

f) **Kepatutan**, berarti penjabaran kegiatan DAK Bidang Pendidikan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 di Kabupaten Nunukan sudah sesuai dengan prinsip kepatutan. Hal tersebut dapat dilihat dari alat peraga yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam petunjuk teknis.

g) **Manfaat**, berarti pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, pelaksanaan program tahun 2012 di Kabupaten Nunukan yang dibiayai DAK masih sangat kurang dirasakan oleh masyarakat. Manfaat hanya dirasakan sebatas kepada siswa Sekolah Dasar yang menerima pemberian peralatan pendidikan berupa alat peraga pembelajaran.

Program pembangunan pendidikan tidak akan bisa dilepaskan dari prinsip pemerataan. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan daerah terpencil dan kawasan perbatasan yang tertinggal masih tersebar di mana-mana. Penelitian ini memilih lokasi penelitian di Kabupaten Nunukan sebagai kawasan perbatasan dengan tujuan untuk melihat bagaimana perencanaan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar dapat terlaksana dengan baik walaupun dilaksanakan di daerah dengan kondisi geografis yang sulit. Setidaknya terdapat 4 (empat) aspek penting terkait dengan pendidikan di daerah terpencil,

tertinggal dan kawasan perbatasan menurut Tilaar (2008:103). Adapun keempat asas tersebut antara lain:

- a) Asas Pemerataan Pembangunan. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan yang menunjang pelaksanaan pengentasan buta huruf di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan fisik, misalnya pembangunan ruang kelas, dan atau pengadaan peralatan pendidikan berupa alat peraga pembelajaran. Masing-masing kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pemerataan pembangunan pendidikan hingga ke daerah-daerah yang terpencil dan terdepan.

Di Kabupaten Nunukan sendiri prinsip pemerataan pembangunan masih dirasa kurang diterapkan dalam hal pelaksanaan DAK tersebut. Terhitung dari 15 (lima belas) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nunukan, hanya 8 (delapan) kecamatan yang menerima pemberian DAK. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan asas pemerataan pembangunan yang mana setiap daerah memiliki hak yang sama dengan daerah lain untuk melaksanakan pembangunan, dalam hal ini pembangunan pendidikan.

- b) Asas Penanggulangan Kemiskinan. Pengadaan alat peraga sebagai kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 di Kabupaten Nunukan tidak sesuai jika diterapkan dengan asas penanggulangan kemiskinan. Penggunaan alat peraga hanya sebatas untuk membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran dari sekolah tersebut. Oleh karena itu DAK Bidang Pendidikan untuk

Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan tidak dilaksanakan berdasarkan asas penanggulangan kemiskinan.

- c) Wawasan Nusantara. Sebagai kawasan perbatasan, pembangunan pendidikan di Kabupaten Nunukan seyogyanya tidak boleh dilepaskan dari asas wawasan nusantara. Setiap program maupun kebijakan pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan hendaknya memasukkan nilai-nilai nasionalisme melalui pengembangan wawasan nusantara. Hal ini dimaksudkan agar para sasaran kebijakan, dalam hal ini yaitu siswa, memiliki pengetahuan akan negaranya sekaligus menguatkan jiwa nasionalisme mereka. Dengan begitu, rasa persatuan dan kesatuan mereka sebagai bagian dari NKRI bisa tetap terjaga.

SDN 018 Sembakung dan SDN 004 Sembakung merupakan contoh dari sekolah yang giat menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam bentuk wawasan nusantara di tengah-tengah keterbatasan yang mereka miliki. Kegiatan Pramuka dan keolahragaan sering dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan desa-desa tetangga untuk memupuk rasa nasionalisme para siswa. Melihat hal tersebut, pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 di Kabupaten Nunukan tidak boleh dilepaskan dari prinsip wawasan nusantara. Namun sekali lagi, pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan tidak bisa berbuat banyak akibat kakunya spesifikasi barang dalam petunjuk teknis.

- d) Peningkatan Martabat dan Kualitas Manusia. Kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan sangat rendah karena kurangnya informasi. Seperti

yang telah diungkapkan oleh Schiefelbein dan Farrell dalam Suryadi dan Tilaar (1993) menyatakan bahwa:

“..pemerataan pendidikan atau *equality of educational oportunity* tidak terbatas pada, apakah murid memiliki kesempatan yang sama untuk masuk sekolah saja, tetapi lebih dari itu, murid tersebut harus memperoleh perlakuan yang sama sejak masuk, belajar, lulus sampai dengan memperoleh manfaat dari pendidikan yang mereka ikuti dalam kehidupan masyarakat...”

Oleh karena itu penggunaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk Jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 juga harus memperhatikan mengenai bagaimana program tersebut dapat meningkatkan kualitas manusia, dalam hal ini yaitu siswa. Dengan diadakannya pengadaan alat peraga, kualitas manusia di Kabupaten Nunukan diharapkan dapat ditingkatkan sehingga setara dengan kualitas manusia di daerah lain yang lebih maju.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Perencanaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Nunukan**

#### **a. Faktor Pendukung Perencanaan dan Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Nunukan**

##### *1) Bentuk Perhatian dari Pemerintah Pusat*

DAK merupakan salah satu upaya pemerintah dalam misi pengentasan buta huruf di Indonesia. Peran pemerintah memang tidak bisa dilepaskan jika berkaitan dengan pembangunan pendidikan, khususnya pembangunan pendidikan di daerah khusus seperti daerah terpencil maupun di kawasan

perbatasan. Perhatian pemerintah tersebut yang kemudian menurut peneliti, menjadi motivasi yang cukup kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan DAK.

Namun menurut peneliti, motivasi yang dimaksud disini bukan motivasi dalam konteks motivasi yang positif, melainkan motivasi yang lebih bersifat keterpaksaan. Susahnya pelaksanaan DAK jika diterapkan di Kabupaten Nunukan mengakibatkan pemerintah daerah merasa enggan untuk melaksanakan DAK tersebut. Bahkan beberapa pihak secara terang-terangan menyatakan bahwa sebaiknya DAK dihapuskan saja. Namun DAK tetap dilaksanakan karena Kabupaten Nunukan telah menerima alokasi, dan nantinya akan menjadi masalah jika tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

## 2) *Kebutuhan Sekolah Yang Harus Dipenuhi*

DAK Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan Indonesia dari angka buta huruf. Dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya oleh Schiefelbein dan Farrell dalam Suryadi dan Tilaar (1993) menyatakan bahwa:

“...pemerataan pendidikan atau *equality of educational opportunity* tidak terbatas pada, apakah murid memiliki kesempatan yang sama untuk masuk sekolah saja, tetapi lebih dari itu, murid tersebut harus memperoleh perlakuan yang sama sejak masuk, belajar, lulus sampai dengan memperoleh manfaat dari pendidikan yang mereka ikuti dalam kehidupan masyarakat...”

Dengan begitu sudah sangat jelas sekali bahwa pengentasan angka buta huruf di Indonesia seharusnya tidak hanya sebatas pada aspek kuantitas saja

melainkan juga harus mempertimbangkan aspek kualitas dimana para siswa, dimanapun berada, akan memperoleh perlakuan yang sama dengan siswa di daerah lain yang lebih maju. DAK Bidang Pendidikan sendiri dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan mutu pembelajaran.

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah pengadaan peralatan pendidikan yaitu berupa pengadaan alat peraga pembelajaran yang berfungsi untuk membantu siswa dalam meningkatkan daya serap siswa terhadap pelajaran yang mereka terima. Kebutuhan akan alat peraga ini yang kemudian memberikan “suntikan” semangat bagi tim pelaksana DAK untuk tetap melaksanakan DAK dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sebagian besar sekolah di Kabupaten Nunukan memang sangat membutuhkan alat peraga untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Melalui pengadaan alat peraga tersebut diharapkan kegiatan belajar dan mengajar dapat dilaksanakan dengan lebih mudah sehingga para murid dapat menyerap pelajaran yang mereka dapatkan dengan lebih mudah pula.

### 3) *Kesiapan Sekolah untuk Menerima Bantuan*

Faktor pendukung lain dalam pelaksanaan DAK di Kabupaten Nunukan adalah kesiapan dari sekolah penerima untuk menerima DAK berupa peralatan pendidikan. Selain karena faktor kebutuhan, kesiapan sekolah juga didasari pada



fakta bahwa untuk pelaksanaan DAK tahun 2012 sekolah tidak memiliki banyak kerepotan karena kegiatan yang dibiayai DAK tahun 2012 hanya kegiatan pengadaan perlatan pendidikan berupa alat peraga. Dala kegiatan ini, peran sekolah memang tidak terlalu besar karena sebagian besar pekerjaan dilaksanakan oleh pihak rekanan. Berbeda dengan kegiatan fisik berupa pembangunan ruang kelas dan perpustakaan, dimana sekolah memiliki tugas yang lebih banyak melalui MBS (Mekanisme Berbasis Sekolah).

## **b. Faktor Penghambat Perencanaan dan Penggunaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Nunukan**

### *1) Petunjuk Teknis Sering Datang Terlambat*

Faktor penghambat utama dalam perencanaan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 di Kabupaten Nunukan adalah petunjuk teknis yang datangnya tidak tepat waktu. Salah satu dari 9 (sembilan) dimensi perencanaan pendidikan menurut Sa'ud dan Makmun (2009:55) adalah *Time*, dimana siklus alamiah merupakan pokok bahasan di dalam perencanaan. Keterbataasan perencana pendidikan dalam meramalkan masa depan merupakan beberapa faktor yang berkaitan dengan waktu. Terlambatnya petunjuk teknis ke tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menjadi tidak bisa mengambil tindakan terkait dengan pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan. Hal tersebut dikarenakan DAK secara umum dilaksanakan melalui mekanime yang

ditentukan oleh pemerintah pusat yang dituangkan ke dalam petunjuk teknis pelaksanaan DAK.

Selain petunjuk teknis yang terlambat, sosialisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga terlambat. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh *missed communication* antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, misalnya seperti surat pemberitahuan sosialisasi yang sampai terlambat sehingga pemerintah daerah akhirnya juga terlambat untuk mendapatkan sosialisasi. Dengan terlambatnya sosialisasi dan petunjuk teknis, tentu saja DAK tidak bisa dilaksanakan.

DAK Bidang Pendidikan tahun 2013 mengalami keterlambatan hingga tahun 2014 juga disebabkan oleh petunjuk teknis yang datang terlambat. Walaupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 telah dipublikasikan melalui internet, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan tetap belum berani untuk memulai perencanaan kegiatan DAK dengan menggunakan publikasi tersebut. Masalah legalitas menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk tetap menggunakan petunjuk teknis yang mereka dapat langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Keterlambatan petunjuk teknis juga berdampak pada waktu pelaksanaan DAK. Semakin terlambat petunjuk teknis datang maka semakin pendek pula waktu pelaksanaan DAK. Kurangnya waktu pelaksanaan ini pula yang mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam hal ini Dinas

Pendidikan Kabupaten Nunukan lebih memfokuskan kegiatan DAK Bidang Pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 pada pengadaan peralatan pendidikan berupa alat peraga pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan mekanisme pengadaan alat peraga dilakukan melalui pihak rekanan. Kegiatan DAK Fisik sendiri membutuhkan waktu yang lebih panjang karena dilakukan melalui Mekanisme Berbasis Sekolah. Itulah yang menjadi salah satu pertimbangan bagi sekolah-sekolah untuk lebih memilih pengadaan alat peraga sebagai kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.

## 2) *Standardisasi Petunjuk Teknis Terlalu Kaku*

Menurut Sa'ud dan Makmun (2009:55), terdapat 9 (sembilan) dimensi perencanaan pendidikan, salah satunya adalah dimensi *Adaptability*. Dimensi *Adaptability* mengharuskan perencanaan pendidikan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai informasi sebagai umpan balik sistem. Maksudnya disini adalah bahwa suatu perencanaan harus bisa disesuaikan dengan perubahan informasi karena tidak ada satupun perencana yang bisa meramal masa depan. Selain itu sebuah perencanaan juga seharusnya bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

DAK merupakan salah satu bentuk dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang merupakan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Mekanisme perencanaan DAK sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa. Bukan hanya mekanisme perencanaan, mulai dari pengalokasian masing-masing kegiatan, hingga spesifikasi barang sudah ditentukan di dalam petunjuk teknis tersebut.

Kondisi tersebut tentu saja tidak sesuai dengan teori Sa'ud dan Makmun (2009:55) mengenai dimensi *Adaptability*. Standardisasi petunjuk teknis yang terlalu kaku tersebut tentu saja membawa dampak negatif bagi pelaksanaan DAK di Kabupaten Nunukan. Misalnya saja dalam hal spesifikasi alat peraga. Dengan standar spesifikasi alat peraga yang sudah ditentukan tentu saja menyulitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan pihak rekanan, dalam hal ini yaitu CV Estina Media untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena hanya bisa didatangkan dari Pulau Jawa.

Selain itu, standardisasi petunjuk teknis yang kaku juga menjadikan penerapan nilai-nilai masyarakat ke dalam setiap kegiatan DAK menjadi sulit untuk dilakukan. Seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kawasan terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kawasan perbatasan, penanaman wawasan nusantara dan nilai-nilai dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Nunukan dalam perencanaan pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Begitu pula dalam perencanaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Nunukan seharusnya juga disesuaikan dengan nilai-nilai dan kebutuhan daerah, misalnya

dengan menyesuaikan alat peraga pembelajaran dengan ciri khas daerah atau bersifat nasionalisme. Oleh karena itu seharusnya pemerintah pusat menyediakan “ruang” bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan perencanaan DAK agar nantinya nilai-nilai masyarakat dan wawasan nusantara dapat ditanamkan dan diterapkan dalam pembelajaran siswa.

### 3) *Mobilisasi yang sulit*

Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang memiliki daerah dengan akses yang terbatas. Minimnya akses jalan raya mengakibatkan beberapa kecamatan di kabupaten ini menjadi sulit dijangkau. Proses komunikasi dan pembaharuan informasi sangat sulit dilakukan di beberapa daerah terpencil karena tidak tersedia jaringan. Selain itu, akses transportasi juga sangat sulit di beberapa kecamatan. Sebut saja Kecamatan Krayan, yang mana untuk mencapai kecamatan tersebut hanya bisa dilakukan melalui jalur udara. Selain itu juga ada Kecamatan Sembakung yang juga hanya bisa diakses melalui jalur sungai Sembakung.

Mobilisasi yang sulit juga terjadi pada pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Nunukan. Mobilisasi yang sulit terjadi pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara pemerintah daerah dengan sekolah-sekolah penerima DAK. Sulitnya mobilisasi akhirnya mengakibatkan efisiensi biaya dan waktu menjadi sulit untuk dicapai dalam hal pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 di Kabupaten Nunukan.

Mobilisasi yang sulit mengakibatkan biaya pelaksanaan menjadi tinggi pula. Misalnya saja biaya untuk pengiriman barang untuk Kecamatan Krayan, dimana untuk mencapai kecamatan tersebut hanya bisa melalui jalur udara. Tentu saja tidak bisa jika pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan pesawat komersil saja, pihak rekanan harus menggunakan sistem *carter* pesawat agar bisa dilakukan pengiriman barang menuju sekolah-sekolah penerima. Sistem *carter* sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedikitnya dibutuhkan dana sebesar Rp. 40 juta sekali berangkat mengirim barang. Hal inilah yang kemudian seringkali menjadi kendala bagi pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dan juga untuk pihak rekanan.

Selain masalah akses transportasi, masalah komunikasi juga menjadi hambatan yang cukup besar dalam perencanaan dan penggunaan DAK di Kabupaten Nunukan. Sulitnya komunikasi tersebut yang akhirnya menyebabkan informasi mengenai DAK menjadi terlambat sampai ke sekolah penerima, bahkan bisa tidak sampai karena sulitnya jaringan, terutama di daerah-daerah terpencil. Di Kecamatan Sembakung sendiri masih banyak sekali sekolah-sekolah yang letaknya di desa yang berdiri di tepi hutan. Kondisi tersebut yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat bahwa perencanaan DAK Bidang Pendidikan tidak bisa dilaksanakan dengan menggunakan standarisasi yang sama, karena kondisi untuk masing-masing daerah sangat berbeda. Tentu saja untuk selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sendiri yang merasa terbebani dengan adanya DAK ini,

mengingat bahwa untuk biaya operasional, mulai dari pengayaan hingga distribusi ditanggung sendiri oleh Pemerintah Daerah melalui pengalokasian dana pendamping sebesar 10% yang diambil dari APBD.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa kondisi pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan masih sangat kurang, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

- a. Akses Pendidikan

Akses pendidikan yang sulit mengakibatkan sekolah dasar, terutama yang terletak di daerah yang sulit dijangkau menjadi susah untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan sehingga berpengaruh pada kualitas pembelajaran sekolah.

- b. Tenaga Pengajar

Di Kabupaten Nunukan, kualitas pengajar masih sangat buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya guru, baik yang berstatus PNS maupun non PNS yang masih memiliki ijazah SMA sebagai ijazah terakhir.



c. Sarana dan Prasarana

Di Kabupaten Nunukan, masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor bencana alam sehingga beberapa aset sekolah dan alat bantu belajar mengajar rusak dan atau hanyut. Sedangkan faktor yang kedua karena sulitnya akses distribusi sarana dan prasarana sekolah menuju sekolah-sekolah yang sulit untuk dijangkau.

2. Perencanaan DAK Bidang Pendidikan jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 di Kabupaten Nunukan berjalan dengan baik. Perencanaan DAK dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan teknis dalam Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Namun begitu, penggunaan dari DAK tersebut tidak berjalan dengan baik. Adapun dalam perencanaan dan penggunaan DAK di Kabupaten Nunukan terdapat kajian sebagai berikut:

a. Perencanaan DAK Bidang Pendidikan untuk Jenjang Sekolah Dasar tahun anggaran 2012, dimana kegiatan yang dibiayai oleh DAK untuk Kabupaten Nunukan adalah kegiatan pengadaan peralatan pendidikan berupa alat peraga. Kegiatan perencanaan dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB. Adapun kegiatan-kegiatan perencanaan DAK tahun 2012 yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan adalah sosialisasi DAK dari Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan kepada daerah, penentuan tim teknis pelaksana, sosialisasi program, penetapan sasaran program, dan pengadaan alat peraga.

- b. Penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk Jenjang Sekolah Dasar tahun anggaran 2012. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti menyimpulkan bahwa DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 di Kabupaten Nunukan tidak terlaksana dengan baik. Walaupun sekolah penerima DAK menerima alat peraga sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan pihak rekanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, namun ternyata dalam pelaksanaan dan penggunaannya masih belum berjalan dengan baik. Misalnya saja masih ada beberapa sekolah yang belum mendapat sosialisasi dan fungsi alat peraga yang tidak tepat sasaran.
3. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:
  - a. Sedangkan faktor yang mendukung perencanaan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan salah satunya adalah karena DAK Bidang Pendidikan merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masalah pembangunan pendidikan di daerah. Selain itu, kebutuhan sekolah yang harus dipenuhi melalui DAK dan kesiapan sekolah dalam menerima bantuan DAK juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan DAK di Kabupaten Nunukan

- b. Faktor yang menghambat perencanaan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan adalah petunjuk teknis pelaksanaan yang sering datang terlambat. Selain itu standardisasi petunjuk teknis yang terlalu kaku dan mobilisasi yang sulit dilaksanakan juga menghambat perencanaan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan.

## B. Saran

Dalam mewujudkan penyelenggaraan perencanaan dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan di Kabupaten Nunukan, maka ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan masukan pada pihak yang terkait, yaitu:

1. Untuk meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Nunukan, baik berupa akses informasi dan akses transportasi, berikut beberapa saran yang bisa peneliti sarankan:
  - a. Untuk akses transportasi, sebaiknya pemerintah daerah menyiapkan dana khusus yang digunakan sebagai biaya transportasi, baik dalam hal penyaluran sarana dan prasarana pendidikan maupun untuk sosialisasi pihak dinas pendidikan kepada sekolah-sekolah yang letaknya sulit untuk dijangkau.
  - b. Untuk akses informasi, sebaiknya Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan selalu meng-*upgrade* situs webnya dengan pengumuman-pengumuman terbaru agar seluruh sekolah tidak ketinggalan informasi

dan dapat saling menyalurkan informasi tersebut kepada sekolah yang tidak dapat mengakses informasi tersebut melalui internet.

2. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan, maka perlu adanya perubahan dalam beberapa aspek, salah satunya adalah mengenai kebijakan perekrutan tenaga pengajar. Sebaiknya pihak sekolah dibatasi kewenangannya untuk menunjuk guru honor, karena sering kali pihak sekolah menunjuk guru honor tanpa memperhatikan latar belakang pendidikannya. Selain itu, sistem penempatan guru juga seharusnya diubah agar penempatan guru di Kabupaten Nunukan dapat merata hingga daerah-daerah yang terpencil.
3. Adapun saran untuk permasalahan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nunukan adalah agar Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan lebih mengutamakan sekolah-sekolah yang terletak di daerah yang sulit terjangkau dalam hal penyaluran bantuan.
4. Dari faktor penghambat yang ada, perlu adanya suatu tindakan agar nantinya masalah yang timbul tidak menjadi masalah yang besar sehingga akan menyulitkan pelaksanaan dari DAK.
  - a. Bagi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih mendahulukan daerah-daerah khusus terlebih dahulu dalam hal pemberitahuan mengenai sosialisasi DAK. Dengan begitu daerah-daerah khusus, misalnya Kabupaten Nunukan tidak akan ketinggalan informasi dan petunjuk teknis tidak akan terlambat. Selain

itu dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan seharusnya berinisiatif sendiri melaksanakan DAK dengan menggunakan petunjuk teknis yang berasal dari internet, karena petunjuk teknis tersebut juga memiliki legalitas yang sama dengan petunjuk teknis yang dikirim langsung oleh Kemendiknas. Hal ini dikarenakan publikasi petunjuk teknis di internet pada dasarnya dilakukan oleh pihak Kemendiknas sendiri, sehingga legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

- b. Beberapa aspek dalam petunjuk teknis sebaiknya tidak disusun terlalu kaku, misalnya dalam aspek spesifikasi barang dan alokasi kegiatan. Dengan begitu, masing-masing daerah dapat melaksanakan DAK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari daerah.
- c. Mengenai mobilisasi, dalam hal sosialisasi untuk sekolah, lebih baik ditunjuk tim yang nantinya langsung datang ke sekolah agar berita bisa langsung sampai ke kepala sekolah. Sedangkan untuk distribusi barang, pemerintah daerah bisa sekaligus menyerahkan pada pihak rekanan untuk sekaligus mendistribusikan barangnya, sehingga proses pengadaan menjadi ekonomis dan tidak berbelit-belit.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahab, Heyn Peter. 2012. *Perbatasan Negara Sebagai Teras Depan Bangsa* [html]. (<http://m.kompasiana.com/post/read/446805/3/perbatasan-negara-sebagai-teras-depan-bangsa>, diakses pada 18 Agustus 2013)
- Al Hamzah, Zaky. 2013. *Jumlah Daerah Tertinggal Bertambah* [html]. ([www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/05/19/mn1sr9-jumlah-daerah-tertinggal-bertambah](http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/05/19/mn1sr9-jumlah-daerah-tertinggal-bertambah), diakses pada 21 Juli 2013)
- Anonim. 2012. *Benarkah Pulau Terluar Beranda NKRI?* [html]. ([indomaritimeinstitute.org/2012/11/benarkah-pulau-terluar-beranda-nkri](http://indomaritimeinstitute.org/2012/11/benarkah-pulau-terluar-beranda-nkri), diakses pada 5 Desember 2013)
- Bachrul, Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta : UI Press
- Bafadal, Ibrahim. 2012. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar : Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta : Bumi Usaha
- Baratakusumah, Deddy Supriadi dan Dadang Solihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Darmadi, Damai dan Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo
- Dellasera, Qory. 2013. *Kualitas Pendidikan Indonesia (Refleksi 2 Mei)* [html]. ([edukasi.kompasiana.com/2013/05/03/kualitas-pendidikan-indonesia-refleksi-2-mei-552591.html](http://edukasi.kompasiana.com/2013/05/03/kualitas-pendidikan-indonesia-refleksi-2-mei-552591.html), diakses pada 8 Agustus 2013)
- Furchan, Arif. 1992. *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hakim, EM. Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Hamzah, Muhammad Zilal. 2008. *Kajian Teori Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: LPS STIEBI
- Hanafi, Imam dan Tri Laksono Nugroho. 2009. *Desentralisasi Fiskal : Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang : UB Press
- Keban, Y.T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta:Gava Media

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Paparan Rakor Pada Sosialisasi DAK Dikmen : Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Luar Biasa* [pdf]. (Dikmen.kemdikbud.go.id, diakses pada 8 Agustus 2013)

Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Rosadakarya

Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rosadakarya

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara

Nasir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*, Cetakan ke empat. Jakarta : Galia Indonesia

Nasution, Faisal Akbar. 2011. *Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi* [pdf]. (law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/11%20Faisal%20AN.pdf, diakses pada 27 November 2013)

Nugroho. Riant. 2000. *Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta : Elex Media Komputindo

Pemerintah Kabupaten Nunukan. 2013. *Buku Profil Kabupaten Nunukan 2012*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 Tentang *Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.07/2011 Tentang *Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB*.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2012 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SDLB*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 Tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 Tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*

- Plehn, Carl C. 1902. *Introduction to Public Finance*. Norwood : Norwood Press
- Ruru, Niko. 2012. *DAK Sulit Dilaksanakan Di Nunukan*. [html]. (kaltim.tribunnews.com/2012/12/17/dak-sulit-dilaksanakan-di-nunukan, diakses pada 21 Juli 2013)
- Sabarno. Hari. 2007. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah : Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sa'ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun. 2009. *Perencanaan Pendidikan : Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset
- Siagian, Sondang P. 1988. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Smith, Brian C. 1985. *Decentralization : The Teritorial Dimension of The State*. George Allen & Unwin Publisher Ltd.
- Soenarya, Endang. 2000. *Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusantara
- Subagyo, Joko. 1999. *Metode Penelitian : Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Subana. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sumarsono, Sony. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. 1994. *Analisis Kebijakan Pendidikan : Suatu Pengantar*. Bogor : Ar Ruzz Media
- Suryadi, Ace. 2002. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan; Isu, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta : Balai Pustaka
- Tilaar, H.A.R. 2011. *Manajemen Pendidikan Nasional* (cetakan 10). Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1986. *Pengantar Administrasi pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang *Wilayah Negara*

Usman, Husaini dan Pramono Setyadi Akbar. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara

Widjaja, Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis)*. Jakarta : RajaGrafindo Persada

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada

Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah : Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan





**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A. Bessing Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas-Dines II  
Telp. (0556) 24263 Nunukan Kalimantan Timur

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Pada hari ini... SENIN... Tanggal... 12... Bulan... 11... Tahun Dua Ribu Duabelas, yang bertanda tangan dibawah ini :




1. Nama Perusahaan : CV. ESTINA MEDIA  
 Nama : M. MAQSUR PRAMBUDI  
 Jabatan : Direktur  
 Alamat : Jln. Toddopuli 10 No. 1 Makassar  
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama Sekolah : SDN 004 SEMBARKUNG  
 Nama : ZAINAL  
 Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
 Alamat : JAL KAMPUNG BU LUNGAN RS 2  
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan mengadakan Serah Terima BARANG pada Kegiatan Tahun Anggaran 2012, dengan keterangan sebagai berikut :


PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa :

No	Nama Barang	Jumlah
1	- Alat Peraga Matematika Pemula (Dasar) - Alat Peraga Matematika Pemula (Permainan)	2 Set
2	- KIT Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)/Sains - KIT IPBA - KIT Simulasi Fase bulan	2 Set 2 Set 2 Set
3	- KIT Gejala Alam - KIT Tentang Bentang Alam - Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	2 Set 2 Set 2 Set
4	- KIT Bahasa Indonesia - KIT Bahasa Inggris	1 Set 2 Set
5	- Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan	2 Set
6	- Alat Peraga Kesenian	1 Set

PIHAK KEDUA menerima BARANG tersebut dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan lengkap dan baik.  
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Yang Menyerahkan CV. ESTINA MEDIA  <b>M. MAQSUR PRAMBUDI</b> Direktur	 Menerima 

MENGETAHUI,  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

  
**RAMDAN YUSUF, ST, SE**  
 NIP. 197409222007041000





**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan R.A. Bessing Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas-Dinas II  
Telp. (0556) 24263 Nunukan Kalimantan Timur

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**


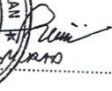

Pada hari ini, Senin Tanggal 12 Bulan 11 Tahun Dua Ribu Duabelas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Perusahaan : CV. ESTINA MEDIA  
 Nama : M. MAQSUR PRAMBUDI  
 Jabatan : Direktur  
 Alamat : Jln. Toddopuli 10 No. 1 Makassar  
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama Sekolah : SD - 013 SEMBAKUNGS  
 Nama : MURAD  
 Jabatan : KEPSEK  
 Alamat : LABUAN RT-4 TEPIAN SEMBAKUNGS  
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Dengan ini menyatakan mengadakan Serah Terima BARANG pada Kegiatan Tahun Anggaran 2012 dengan keterangan sebagai berikut :  
 PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa :

No	Nama Barang	Jumlah
1	- Alat Peraga Matematika Pemula (Dasar) - Alat Peraga Matematika Pemula (Permainan)	2 Set
2	- KIT Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)/Sains - KIT IPBA - KIT Simulasi Fase bulan	2 Set 2 Set 2 Set
3	- KIT Gejala Alam - KIT Tentang Bentang Alam - Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	2 Set 2 Set 2 Set
4	- KIT Bahasa Indonesia - KIT Bahasa Inggris	1 Set 2 Set
5	- Alat Peraga Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan	2 Set
6	- Alat Peraga Kesenian	1 Set

PIHAK KEDUA menerima BARANG tersebut dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan lengkap dan baik.  
 Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Yang Menyerahkan CV. ESTINA MEDIA  M. MAQSUR PRAMBUDI Direktur	Yang Menerima  

MENGETAHUI,  
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

  
**RAMDAN YUSUF, ST, SE**  
 NIP. 19740922 200701 1 012



CONTOH STANDAR/SPEKIFIKASI TEKNIS  
PERALATAN PENDIDIKAN MATEMATIKA PEMULA (DASAR)

No.	Fungsi Alat	Nama Alat	Standard/Spekifikasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belajar membilang pada tahap awal dengan pendekatan yang menarik selain juga untuk melatih motorik siswa.	a. Mata Rantai	250 buah mata rantai ukuran 1 X 2 cm Bahan : Plastik Warna : Aneka warna yang menarik	1 set
		b. Manik dan Pola	Terdiri dari 100 manik-manik dengan 4 bentuk dan 5 buah benang besar Bahan : Plastik Warna : Aneka warna yang menarik	1 set
		c. Kubus Berkait	200 kubus berkait aneka warna Bahan : Plastik Warna : Aneka warna yang menarik	1 set
2.	Mengenalkan bentuk-bentuk bangun datar sebagai pengenalan awal ilmu bangun/geometri pada siswa	Bangun Datar dan Bingkainya	10 model bangun datar & papan berpola. Bahan : Plastik Warna : Aneka warna yang menarik	1 set
3.	Mengenalkan bentuk-bentuk bangun datar sebagai pengenalan awal ilmu bangun/geometri pada siswa	Macam-macam Bangun Datar	Papan berukuran 25 x 25 cm tebal 0,5 cm dengan 16 pola bangun. Dimana bila setiap bangun datar dimasukkan pada pola bangun datar yang terdapat pada papan, maka bangun datar yang ada akan menonjol karena lubang yang ada lebih dangkal dibanding dengan tebal bangun datar yang tersedia dengan maksud agar mudah untuk dipasang dan dilepas oleh siswa Bahan : Plastik Warna : Papan aneka warna yang menarik	1 set
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengenalan awal bentuk-bentuk berbagai bangun 3 (tiga) dimensi,</li> <li>Bangun ruang sederhana (balok, prisma, tabung, bola, dan kerucut)</li> </ul>	Bangun 3 Dimensi	Papan berpola bangun 3 dimensi (kecuali bangun bola) Fungsinya untuk meletakkan 7 macam bangun 3 dimensi. Ukuran : papan 20 x 28 cm, Kubus 6 x 6 x 6 cm, Balok 6 x 6 x 8 cm, Tabung dan kerucut diameter alas 8 cm, tinggi 8 cm, Limas alasnya 6 x 6 cm tinggi 8 cm, Prisma Segienam setiap sisinya 4,5 cm dan tingginya 8 cm, bola dengan diameter 8 cm Bahan : Plastik Transparan Warna : Aneka warna yang menarik	1 set
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk belajar tentang waktu/jam, dan derajat (sudut)</li> <li>Untuk mengukur waktu dengan satuan jam</li> </ul>	Muka Jam/Jam Analog	Muka jam berbentuk lingkaran dengan modifikasi kaki berdiameter lingkaran 18 cm. Muka jam dilengkapi dengan angka penunjuk jam dari jam 1 sampai dengan jam 24 serta penunjuk menit dari 5 menit sampai 60 menit. Pada lingkaran muka jam terdapat lubang-lubang yang berfungsi untuk mengganti angka dengan huruf romawi ataupun derajat, Dimana huruf romawi dan derajat dicetak di atas plastik berbentuk lingkaran kecil dengan diameter lingkaran 2 cm. Bahan : Plastik Warna : Muka jam, jarum pendek, jarum panjang, tulisan pada muka jam, lingkaran bertuliskan huruf romawi dan derajat dibuat dengan aneka warna yang menarik.	1 set

0 0 2 5 . 9 6 3



CONTOH STANDAR/SPEKIFIKASI TEKNIS  
PERALATAN PENDIDIKAN MATEMATIKA (PERMAINAN)

No	Fungsi Alat	Nama Alat	Standar / Spesifikasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat Ini digunakan untuk menunjukkan kebenaran rumus volume dengan menggunakan media pasir / barang cair</li> <li>• Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar</li> </ul>	PERMAINAN BANGUN RUANG	<p>BANGUN RUANG TRANSPARAN Satu set terdiri dari :</p> <p><u>Kubus Transparan</u> Ukuran : 80 x 80 x 80 mm, Berskala Bahan : Plastik PS (injeck) Warna : Berwarna, transparan Deskripsi : Alat Ini digunakan untuk menunjukkan rumus volume dengan menggunakan media pasir / barang cair</p> <p><u>Balok Transparan</u> Ukuran : 100 x 80 x 70 mm, Berskala Bahan : Plastik PS (injeck) Warna : Berwarna, transparan Deskripsi : Alat Ini digunakan untuk menunjukkan rumus volume dengan menggunakan media pasir/barang cair</p> <p><u>Prisma Segi Tiga Transparan</u> Ukuran : 100 x 80 x 70 mm, Berskala Bahan : Plastik PS (injeck) Warna : Berwarna, transparan Deskripsi : Alat Ini digunakan untuk menunjukkan volume dengan menggunakan media pasir / barang cair</p> <p><u>Limas Segi Empat Transparan</u> Ukuran : 80 x 80 x 100 mm Bahan : Plastik PS (injeck) Warna : Berwarna, transparan Deskripsi : Alat Ini digunakan untuk menunjukkan rumus volume dengan menggunakan media pasir / barang cair</p> <p><u>Limas Segi Tiga Transparan</u> Ukuran : 80 x 70 x 100 mm Bahan : Plastik PS (injeck) Warna : Berwarna, transparan Deskripsi : Alat Ini digunakan untuk menunjukkan rumus volume dengan menggunakan media pasir / barang cair</p> <p><u>Tabung Transparan</u> Ukuran : D = 80 mm T = 100 mm, Berskala Bahan : Plastik PS (injeck) Warna : Berwarna, transparan Deskripsi : Alat Ini digunakan untuk menunjukkan rumus volume dengan menggunakan media pasir / barang cair</p> <p><u>Kerucut Transparan</u> Ukuran : D = 80 mm T = 100 mm Bahan : Plastik PS (injeck) Warna : Berwarna, transparan Deskripsi : Alat Ini digunakan untuk menunjukkan rumus volume dengan menggunakan media pasir / barang cair</p>	1 Set



**CONTOH STANDAR/SPEKIFIKASI TEKNIS  
PERALATAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)/SAINS**

No.	Fungsi	Nama Barang	Standar / Spesifikasi Teknis	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sebagai dudukan cermin datar agar berdiri tegak	Penumpu Cermin Datar	Ukuran : ± Ø 1,5 ~ 3 Cm Bahan : Plastik Injek Warna : Berwarna Diskripsi : Terdapat celah untuk meletakkan cermin lentur, terdapat pin sistem Ø 0,5 mm untuk ditempatkan pada landasan serbaguna	2 Buah
2	Sebagai penjepit selang, pipa plastik, booser/ speaker	Penjepit Selang	Ukuran : ± 1 ~ 2 cm x 2,5 ~ 3 cm Bahan : Plastik Injek Warna : Berwarna Diskripsi : terdapat 2 pin sistem Ø 0,5 cm dapat diletakkan pada papan serbaguna	4 Buah
3	Model untuk mengubah energi listrik ke energi gerak dan media perubahan energi	Dinamo-motor	Ukuran : 5,9 Volt (standar) penggunaan umum	1 Buah
4	Listrik menjadi cahaya	Bola Lampu	Ukuran : 3.8 Volt (Model E-10) Bahan : gelas, kuningan	2 Buah
5	Sebagai roda bergandar untuk menunjukkan perubahan energy gerak ke bentuk energi lainnya	Tali pada Roda	Bahan : Katun, panjang sekitar 1 meter Diskripsi : Tali warna putih, dililitkan pada Roda Plastik	1 Roll
6	Sebagai soket	Spiral Pin	Ukuran : ± 1 ~ 2 cm, sistem Ø 0,5 cm Bahan : Stenlis Steel	20 Buah
7	Sebagai penghantar arus listrik	Kabel Penghubung Pendek	Ukuran : ± 7 ~ 10 cm, pada kedua ujung di beri logam/solder	7 Buah
8	Sebagai penghantar arus listrik	Kabel Penghubung Panjang	Ukuran : ± 17 ~ 20 cm, pada kedua ujung di beri logam/solder	7 Buah
9	Memahami hubungan antar gaya, gerak dan energi serta fungsinya	Katrol Ø 7 Cm	Bahan : Plastik ABS Diskripsi : Pada badan katrol terdapat celah untuk meletakkan tali, dan terdapat lubang ± Ø 0,7 mm, petunjuk arah dan pin pemutar Katrol.	1 Buah
10	Menjelaskan fungsi pesawat sederhana	Katrol Ø 3,5 Cm	Bahan : Plastik Injek Diskripsi : Pada badan katrol terdapat celah untuk meletakkan tali, dan terdapat lubang ± Ø 0,7 mm, petunjuk arah dan pin pemutar Katrol.	1 Buah
11	Pemegang katrol pada saat percobaan	Dudukan Poros	Ukuran : ± 1 ~ 1,5 cm x 4 ~ 6 cm Bahan : Plastik Injek Warna : Berwarna Diskripsi : Poros terletak pada bagian tengah dudukan, dilengkapi ring pengunci terdapat dua pin sistem Ø 0,5 cm dapat diletakkan pada papan serbaguna	2 Buah
12	Penghubung antara baterai dan alat listrik lainnya	Jepit Buaya Merah	Diskripsi : Terpasang pada kabel listrik Ukuran : ± Panjang : 25 ~ 35 cm	1 set
13	Penghubung antara baterai dan alat listrik lainnya	Jepit Buaya Hitam	Diskripsi : Terpasang pada kabel listrik Ukuran : ± Panjang : 25 ~ 35 cm	1 set
14	Menunjukkan pesawat sederhana yang dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat	Katrol Ganda	Ukuran : ± Bingkai 1,5 ~ 2 cm x 3,5 ~ 4 cm, Katrol sekitar Ø 2 cm Bahan : Plastik Injek PP, ABS Warna : Bingkai dengan katrol berbeda warna (Kontras) Diskripsi : Bingkai katrol plastik, 2 buah katrol dapat berputar bebas/lancar, pada bagian atas bawah terdapat pengait dari logam	1 Buah

**CONTOH STANDAR/SPEKIFIKASI TEKNIS  
PERALATAN PENDIDIKAN SIMULASI FASE BULAN**

No.	Fungsi	Nama Alat	Standar/Spekifikasi Teknis	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mendemonstrasikan kedudukan fase-fase bulan	Peralatan pendidikan Simulasi Fase Bulan	Bahan : Plastik Ukuran : Diameter minimal 17 cm Tinggi minimal 5 cm  Dilengkapi lampu dengan 2 (dua) buah baterai dan tombol On-Off. Terdapat 8 lubang untuk mengamati fase bulan dimulai dari bulan baru, bulan sabit muda, bulan seperempat awal, bulan tiga perempat pertama, bulan penuh (purnama), bulan tiga perempat kedua, bulan seperempat akhir, sampai dengan bulan sabit tua	3 Buah
2.	Menunjukkan fase-fase penampakan bulan	Poster Fase Penampakan Bulan	Bahan : Ivory / Art Carton minimal 250 gram separasi 4 (empat) warna/full color, vernish. Ukuran : Minimal 60 x 90 cm  Berisi informasi tentang posisi bumi, bulan beserta cahaya matahari dan tahapan-tahapan penampakan bulan.	1 Buah
3.	Menunjukkan kedudukan matahari-bumi-bulan saat terjadi gerhana matahari	Poster Gerhana Matahari	Bahan : Ivory / Art Carton minimal 250 gram separasi 4 (empat) warna/full color, vernish. Ukuran : Minimal 60 x 90 cm  Berisi tentang Posisi Gerhana Matahari dan keterangannya.	1 Buah
4.	Menunjukkan kedudukan matahari-bumi-bulan saat terjadi gerhana bulan	Poster Gerhana Bulan	Bahan : Ivory / Art Carton minimal 250 gram separasi 4 (empat) warna/full color, vernish. Ukuran : Minimal 60 x 90 cm  Berisi tentang Posisi Gerhana Bulan dan keterangannya.  Dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan	1 Buah
5.	Panduan pembelajaran pemanfaatan Kit yang menunjang pendalaman materi Simulasi Fase-fase Bulan	Buku Panduan Pembelajaran IPA	Buku : Ukuran : A4/A5/B5 Bahan Cover : Minimal Ivory/AC 210 gr Bahan Isi : Minimal HVS 70 gr Jilid : Jahit Kawat, Perfect Binding Cetak Isi : Minimal 1 (satu) warna Cetak Cover : Full Color	1 eks

**Catatan :**

Setiap 1 (satu) paket alat dan kelengkapannya dimasukkan dalam wadah atau terbungkus plastik dan dimasukkan ke dalam dus yang tercetak nama peralatan pendidikan dan jumlah isi yang terdapat didalamnya.





CONTOH STANDAR/SPEKIFIKASI TEKNIK  
KIT IPS, GEJALA ALAM DAN BENTANG ALAM

No.	Fungsi	Nama Alat	Standar/Spekifikasi Isi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>MEMAHAMI KIT GEJALA ALAM</p> <p>Kit tentang Gejala Alam Berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan siswa mengenali gejala-gejala alam gunung berapi</li> <li>2. Memudahkan siswa mengenai proses terjadinya aktivitas alam</li> <li>3. Memotivasi siswa untuk lebih memahami ciri-ciri terjadinya aktivitas alam</li> <li>4. Memperkenalkan kepada siswa daerah-daerah rawan tsunami</li> <li>5. Memperkenalkan kepada siswa daerah-daerah rawan gempa</li> </ol>			
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu siswa agar dapat mengenali legenda-legenda yang terdapat pada gunung berapi</li> <li>2. Siswa dapat menjelaskan proses aktivitas gunung berapi</li> <li>3. Siswa dapat mendeskripsikan peristiwa gempa bumi</li> <li>4. Siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis gempa bumi</li> <li>5. Siswa dapat mengetahui dan memahami peristiwa sebelum terjadinya gunung meletus</li> </ol>	<p>MODEL GUNUNG BERAPI</p>	<p>Gunung Berapi Ukuran : 19 X 19 X 6 cm Bahan : Plastik Inject Warna : Full colour dengan pewarnaan menggunakan teknik paint brush Pada ke-empat sisi model terdapat susunan lapisan tanah dan pada belahan gunung berapi terdapat lapisan gunung berapi. Salah satu model dapat digerakkan untuk melihat penampang melintang gunung berapi.</p> <p>Alas: Ukuran : Disesuaikan dengan luasnya gunung berapi Bahan : MDF Warna : Natural/kontras dengan model,</p> <p>Bahan Percobaan : Asam cuka encer 100 ml, Natrium Bicarbonat 25 gram, Bubuk Warna Hitam 25 gram, Pewarna Merah, 30 ml disertai dengan sendok</p> <p>Tempat penyimpanan Botol plastic</p>	1
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa dapat mendeskripsikan macam - macam patahan</li> <li>2. Siswa dapat mendemonstrasikan proses - proses patahan</li> <li>3. Siswa dapat menyebutkan patahan yang ada di Indonesia dan Dunia</li> </ol>	<p>MODEL PATAHAN</p>	<p>PATAHAN Terdiri dari 3 model patahan bumi.</p> <p>Masing-masing model terdapat gambar 3 susunan lapisan batuan dan aliran sungai dan masing-masing model patahan dapat diletakkan pada penopang patahan</p> <p>Ukuran keseluruhan: 49 x 10 x 17,5 cm Bahan : Plastik Warna : Full colour, dan menarik</p> <p>PENOPANG PATAHAN Ukuran : 8 x 6 x 1,5 cm Bahan : Busa Padat Warna : Berwarna</p>	1
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa dapat mendeskripsikan macam - macam pelipatan</li> <li>2. Siswa dapat mendemonstrasikan proses - proses pelipatan</li> </ol>	<p>MODEL LIPATAN</p>	<p>Ukuran : 49 x 7 x 5 cm Bahan : Foam</p>	1



**CONTOH STANDAR/SPEKIFIKASI TEKNIS  
PERALATAN PENDIDIKAN KIT ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA (IPBA)**

No. (1)	Fungsi (2)	Nama Barang (3)	Standar / Spesifikasi Teknis (4)	Jumlah (5)
1	Untuk memperagakan sistem peredaran planet bumi mengitari matahari	<b>Model Planetarium</b>	Dilengkapi skala dudukan 4 musim, Model perputaran Bumi mengelilingi Matahari dilakukan dengan cara memutar tangkai dengan sistem gir	1 Buah
		Matahari	Ukuran : ± Ø 140 mm Bahan : Plastik Inject/Cetak Warna : Merah	
		Bumi	Ukuran : ± Ø 60 mm Bahan : Plastik Diskripsi : diselimiti Peta Bumi	
		Bulan	Ukuran : ± Ø 15 mm Bahan : Plastik Warna : Putih Mutiara	
2	Untuk mengenalkan pola rasi bintang	<b>Model Peta Langit</b>	Peta Bintang berbentuk bulat/bola dan terdapat globe kecil di dalamnya. Peta Rasi Bintang tergambar pada seluruh permukaan	1 Buah
		Peta Langit	Ukuran : ± Ø 150 mm Bahan : Plastik Warna : Transparan	
		Bumi	Ukuran : ± Ø 15 mm Bahan : Plastik Warna : Biru	1 Buah
		<b>Model Tata Surya</b>	Model surya dan delapan planet, semua planet dapat beredar lancar mengelilingi surya.	1 set
3	Untuk mengenali benda-benda langit dalam susunan tata surya		Ukuran Surya : ± Ø 9 cm Bahan : Plastik, lengan Plastik Warna : Orange	9 Buah
4	Tempat untuk meletakkan model planetarium.	<b>Landasan</b>	Ukuran : ± Ø 200 mm Bahan : Plastik ABS Warna : Hitam Diskripsi : dilengkapi tempat untuk (empat) buah baterai dan terdapat saklar On/Off	1 Buah
5		<b>Buku Petunjuk</b>	Ukuran : A4/A5/B5 Bahan Cover : Art Karton 210 gr Isi : HVS 70 gr Cetak : Berwarna	1 Exp
6	Tempat untuk meletakkan alat	<b>Dudukan Alat</b>	Ukuran : Menyesuaikan Bahan : Sterofom berpola	1 Buah
7	Sebagai pelindung dudukan alat	<b>Kotak Alat</b>	Ukuran : Menyesuaikan Bahan : Dus	1 Buah
8	Panduan pembelajaran pemanfaatan Kit yang menunjang pendalaman materi IPBA	Buku Panduan Pembelajaran IPA	Buku : Ukuran : A4/A5/B5 Bahan Cover : Minimal Ivory/AC 210 gr Bahan Isi : Minimal HVS 70 gr Jilid : Jahit Kawat, Perfect Binding Cetak Isi : Minimal 1 (satu) warna Cetak Cover : Full Color	1 eks

**Catatan :**

Setiap 1 (satu) paket alat dan kelengkapannya dimasukkan dalam wadah atau terbungkus plastik dan dimasukkan ke dalam dus yang tercetak nama peralatan pendidikan dan jumlah isi yang terdapat didalamnya.



CONTOH STANDAR/SPEKIFIKASI TEKNIS  
PERALATAN PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA INTERAKTIF DASAR

No.	Fungsi	Nama Alat	Standard/Spekifikasi Isi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung pengenalan huruf dan kemampuan melafalkan alfabet dengan ucapan yang tepat</li> <li>Mendorong aktifitas siswa untuk mengenal huruf dan bentuk kata secara interaktif.</li> <li>Mendukung kemampuan membaca dengan ucapan kata yang benar</li> <li>Mendukung kemampuan membaca dengan frasa dan ucapan kata yang benar</li> <li>Mendukung kemampuan menyusun kalimat sederhana dengan ucapan yang tepat</li> <li>Mendukung kemampuan membaca kalimat sederhana</li> <li>Mendukung kemampuan memahami kalimat, pesan tertulis, dan teks deskriptif bergambar sederhana secara tepat</li> </ul>	Kotak Peralatan pendidikan Siswa	Kotak Peralatan pendidikan adalah tempat menyimpan lembar ( <i>badge</i> ) keping huruf, gambar, kata, CD/Buku Pengayaan serta CD/Buku Petunjuk Guru. Bahan : minimal plastik Ukuran : minimal 35 x 22 x 15 cm	1 Buah
2		Lembar Peraga Mengenal Abjad	Ukuran : minimal 45 x 60 cm Bahan : minimal kain nylax System : Bordir Abjad dibordir dengan system tatami Warna : Berwarna dan menarik	1 Buah
3		Lembar Peraga Mengenal Kata	Ukuran : minimal 35 x 75 cm Bahan : minimal kain nylax System : Bordir Warna : Berwarna dan menarik	1 Buah
4		Lembar Keping ( <i>Badge</i> ) Huruf Kecil	Ukuran : minimal 7 x 8 cm Bahan : minimal kain flanel System : Bordir Warna : Berwarna dan menarik Bisa ditempel ke lembar peraga dengan system lekat	48 Buah
5		Lembar Keping ( <i>Badge</i> ) Gambar	Ukuran : minimal 7,5 x 8,5 cm Bahan : minimal kain flanel System : Bordir Warna : Berwarna dan menarik Bisa ditempel ke lembar peraga dengan sistem lekat	26 Buah
6		Lembar Keping ( <i>Badge</i> ) Kosakata	Ukuran : minimal 4,5 x 19,5 cm Bahan : minimal kain flanel System : Bordir Warna : Berwarna dan menarik Jumlah minimal : 26 pcs Bisa ditempel ke lembar peraga dengan sistem lekat	26 Buah
7		Lembar Keping ( <i>Badge</i> ) Suku Kata	Ukuran : minimal 4,5 x 9 cm Bahan : minimal kain flanel System : Bordir Warna : Berwarna dan menarik Bisa ditempel ke lembar peraga dengan sistem lekat	190 Buah
8		Papan Klasikal	Ukuran : minimal 75 x 80 cm Bahan : minimal dari impraboard dilapisi kain perekat dengan bingkai bahan dari plastik.	1 Buah
9		Tiang Penyangga Papan Klasikal	Ukuran : minimal 50 x 100 cm dengan ketinggian bisa disesuaikan. Bahan : minimal aluminium	1 Buah
10		Panduan bagi guru dalam memanfaatkan alat.	Buku Petunjuk Guru	Ukuran : A4/A5/B5 Bahan Isi : minimal HVS 70 gr Bahan Cover : minimal Ivory/AC 210 gr Jilid : Jahit Kawat, Perfect Binding Cetak Isi : minimal 1 (satu) warna Cetak Cover : full color

CONTOH STANDAR/SPEKIFIKASI TEKNIK  
PERALATAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

No. (1)	Fungsi (2)	Nama Alat (3)	Standard/Spekifikasi Isi (4)
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung kemampuan melafalkan alfabet dengan ucapan yang tepat</li> <li>• Mendukung kemampuan membaca dan menulis kata dengan ucapan yang benar</li> <li>• Mendukung kemampuan membaca dan menulis frasa dengan ucapan yang benar</li> <li>• Mendukung kemampuan membaca dan menulis kalimat sangat sederhana dengan ucapan yang tepat</li> <li>• Mendukung kemampuan membaca kata, frasa, dan kalimat sangat sederhana dengan tekanan dan intonasi yang tepat</li> <li>• Mendukung kemampuan membaca dan menulis teks sangat sederhana</li> <li>• Mendukung kemampuan memahami kalimat sangat sederhana</li> <li>• Mendukung kemampuan memahami pesan tulis sederhana</li> <li>• Mendukung kemampuan memahami kalimat, pesan tertulis, dan teks deskriptif bergambar sederhana secara tepat</li> </ul>	Kotak Peralatan pendidikan Siswa	<p>Terbuat dari karton dilapisi vinyl dan di atasnya terdapat pegangan tangan untuk menjinjing. Kotak peralatan pendidikan adalah tempat menyimpan papan alas, lembar kerja siswa dan keping huruf.</p> <p>Isi minimal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 5 (lima) buah papan alas siswa, terbuat dari plastik cetakan untuk menempatkan keping huruf.</li> <li>2) 5 set (lima) keping huruf terbuat dari Ivory (800 gram)/Art carton (800 gr) yang dilaminating. Huruf di sablon 2 muka (bolak-balik), dengan kombinasi warna.</li> <li>3) Keping huruf terdiri dari a sampai z dan tanda-tanda baca. Jumlah keping huruf yang tersedia mencukupi kebutuhan lembar kerja siswa untuk keperluan cadangan, keping huruf vokal (a,i,u,e,o) masing-masing ditambah 3 keping, sedangkan huruf lainnya dan tanda baca masing-masing ditambah 1 (satu) keping, sehingga masing-masing warna minimal berjumlah 160 keping huruf.</li> <li>4) Lembar Kerja Siswa sebanyak 5 (lima) set, masing-masing terdiri dari 20 lembar kerja bergambar termasuk lembar kerja "Hidden Word", terbuat dari duplex 350 gr, cetak bolak-balik, separasi empat warna.</li> <li>5) CD Interaktif minimal berisi : pengenalan huruf, soal-soal latihan, numerik, <i>hidden word</i>, <i>thematic vocabulary</i>, soal pilihan ganda, kata kerja dan <i>reading time</i>. CD bersifat <i>autorun</i> dan diutamakan yang sudah memiliki hak cipta.                      Ukuran : Compact Disc (CD) diameter 12 cm                      Bahan CD : Polycarbonate, cetak mesin                      Bahan Cover CD : Minimal Plastik                      Cetak label Cover: Full-Color                       CD Original dengan label dan cover CD yang dicetak full Color</li> <li>6) Buku Petunjuk                      Ukuran : Minimal 19cm x 26 cm                      Isi Buku : Minimal 10 -15 Halaman                      Jenis Kertas Isi : Minimal HVS 70 gram, Full Color                      Jenis Kertas Cover : Minimal Art Carton 150 gr, Full Color</li> </ol>



**CONTOH STANDAR/SPEKIFIKASI TEKNIS  
PERALATAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI, OLAH RAGA DAN KESEHATAN**

No	Fungsi	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang bervariasi dalam permainan bola besar beregu dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai kerja sama regu, sportivitas, dan kejujuran</li> <li>Mempraktikkan variasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga bola besar, serta nilai kerja sama, sportivitas, dan kejujuran</li> <li>Mempraktikkan aktivitas untuk kecepatan dan kualitas gerak yang meningkat, serta nilai kerja keras, disiplin, kerjasama, dan kejujuran</li> </ol>	<b>Bola Kaki No. 5</b>	Bahan : Kulit sintetis Polyurethan microfiber, dijahit rapi, menggunakan bola dalam Butyl 80%.  Bentuk : bulat. Keliling 68 s.d 71 cm, berat 396 s.d. 453 gr. Sesuai ketentuan FIFA, SNI 19-9001-2001	2 buah
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang bervariasi dalam permainan bola besar beregu dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai kerja sama regu, sportivitas, dan kejujuran</li> <li>Mempraktikkan variasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga bola besar, serta nilai kerja sama, sportivitas, dan kejujuran</li> <li>Mempraktikkan aktivitas untuk kecepatan dan kualitas gerak yang meningkat, serta nilai kerja keras, disiplin, kerjasama, dan kejujuran</li> </ol>	<b>Bola Futsal No. 4</b>	Bahan : Kulit sintetis Polyurethan Microfiber, dijahit rapi, menggunakan bola dalam Hans/Butyl 80%.  Bentuk : bulat. Keliling 63 s.d. 66 cm, berat 330-370 gr. Sesuai ketentuan FIFA.	2 buah
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempraktikkan gerak dasar berbagai gerakan yang bervariasi dalam permainan bola besar beregu dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai kerja sama regu, sportivitas, dan kejujuran</li> </ol>	<b>Bola Voli</b>	Bahan : kulit sintetis Polyurethan microfiber, dilem rapi, menggunakan bola dalam Butyl 80%, lunak dan lentur,  Bentuk : Bulat, Keliling 65 s.d 67 cm, berat 200 s.d. 280 gr. Dikuliit luar tercetak ukuran tekanan angin. Sesuai Ketentuan FIVB, SNI 12-1286-1996	2 buah
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempraktikkan variasi teknik dasar salah satu permainan dan olahraga bola besar, serta nilai kerja sama, sportivitas, dan kejujuran</li> <li>Mempraktikkan aktivitas untuk kecepatan dan</li> </ol>	<b>Net Bola Voli</b>	Bahan : Terbuat dari bahan nylon atau katun pada bagian atas ditutup dengan kain plastik sebagai tempat tali perentang dengan lebar 4-6 cm.  Bentuk : Berbentuk jaring dengan	2 buah



CONTOH STANDAR/SPEKIFIKASI TEKNIS  
PERALATAN PENDIDIKAN KESENIAN

No.	Fungsi	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menguasai olah vokal, memainkan alat musik, dan apresiasi karya musik melalui permainan alat musik konvensional yakni alat musik nontradisional seperti gitar, piano, biola, drum, saxophone, dll.</li> <li>2. Mengekspresikan diri melalui karya seni music</li> <li>3. Menghubungkan antara simbol nada dengan elemen musik</li> <li>4. Menghubungkan antara simbol nada dengan tempo dalam lagu</li> <li>5. Memainkan alat musik melodis sederhana</li> <li>6. Menyanyikan lagu wajib, daerah dan Nusantara dengan iringan alat musik</li> <li>7. Mementaskan pertunjukan nyanyian lagu daerah dan lagu Nusantara dengan iringan musik sederhana</li> </ol>	Gitar Akustik	Back body : Sengon / Nato / Meranti Top body : Plywood (tripleks) / Spruce Neck : Mahogany (kayu mahoni)/Nato Headstock : Mahogany Fingerboard : Rosewood (sonokeling) Bridge : Rosewood Tuners : Die-cast Crome Saddle & nut : Hard plastic / tulang Body Depth : 80-110mm (3.00"-3.94") Senar : String/Nylon 1,2,3,4,5,6 (terpasang 1 set dan cadangan 1 set) Finish : Gloss Finish	3 buah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MOHAMMAD NUH

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM  
NIP 196108281987031003





PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Komplek. Gabungan Dinas II, Nunukan-77482, Kaltim, Telp. (0556) 24584, Fax. (0556) 24584

Nomor : 893/ 270 /DISDIK-II/III/2014  
 Lampiran : -  
 Perihal : Persetujuan melaksanakan Riset/Survey

Kepada :  
 Yth. Sdr/I. PUTRI PERMATA TAQWA  
 Mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi  
 Universitas Brawijaya Malang

Di-  
 MALANG

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor 1860/UN 10.3/PG/2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang permohonan melakukan Riset/Survey Penelitian pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, maka bersama ini kami memberikan persetujuan untuk ini diberikan kepada :

Nama : PUTRI PERMATA TAQWA  
 NIM : 1050301010111127  
 Fakultas : Ilmu Administrasi  
 Perguruan Tinggi : Universitas Barawijaya Malang  
 Judul Riset/Survey : Perencanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Bidang Pendidikan Dasar di Kawasan Perbatasan ( Studi Pada Dinas Pendidikan Kab. Nunukan )  
 Waktu Riset/Survey : 20 Februari s/d 20 Mei 2014

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nunukan, 06 Maret 2014



Drs. HASMUNI  
 NIP. 196612011995011001

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Barawijaya Malang
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Nunukan
3. Inspektorat Kabupaten Nunukan
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan

